PENENTUAN ALTERNATIF LOKASI IBUKOTA KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN *STAKEHOLDER*

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

Oleh

IMAN TUNAS PRATAMA
NIM. 136030111111013

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Hal:

HALAMAN JUDUL i
IDENTITAS PENGUJI ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI v
PERSEMBAHAN vi
RIWAYAT HIDUP vii
UCAPAN TERIMA KASIH viii
RINGKASAN ix
SUMMARY xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 10
2.2 Konsep Administrasi Publik 13
2.3 Kebijakan Publik 17
2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah 20
2.5 Teori Lokasi 24
2.5.1 Pengertian Teori Lokasi 24
2.5.2 Teori Sewa tanah (Von Thunen) 26
2.5.3 Teori Tempat Central (W. Christaller) 27
2.6 Kota dan Ibukota 32
2.6.1 Tipe, definisi dan Konsep Ibukota 32
2.6.2 Faktor-faktor dalam pengembangan Kota 39
2.6.3 Kebijakan Publik Perkotaan 43
2.6.4 Proses dan Konflik 47
2.7 *Analytical Hierarchy Process (AHP)* 52
2.8 Stakeholder 55
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 58
3.2 Populasi dan Sampel 59
3.3 Lokasi Penelitian 61
3.4 Konsep dan Variabel Penelitian 61

3.5 Sumber dan Pengumpulan Data 63
3.6 Metode Analisa Data 64
3.6.1 Analytical Hierarchy Process 64
3.6.1.1 Prinsip Penyusunan Hirarki 66
3.6.1.2 Validitas dan Reliabilitas 68
3.6.2 Pengolahan Data 69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 80
4.1.1 Kondisi Letak Geografis 80
4.1.1.1 Jarak Terhadap pusat pemerintahan lama dan kecamatan lainnya 83
4.1.1.2 Jarak Terhadap Kota sekitar 84
4.1.2 Kondisi Fisik 85
4.1.2.1 Kemiringan lereng 85
4.1.2.2 Ketersediaan air bersih 86
4.1.2.3 Kerentanan Bencana 88
4.1.3 Ketersediaan Lahan 89
4.1.3.1 Luas Lahan 89
4.1.3.2 Penggunaan Lahan 90
4.1.3.3 Nilai Lahan 91
4.1.4 Historis 92
4.1.4.1 Sejarah Pembentukan Kota 92
4.1.4.2 Sejarah Karisidenan/Kerajaan 92
4.1.5 Kebijakan 93
4.1.6 Aksesibilitas 95
4.1.7 Ketersediaan Sarana Prasarana 95
4.1.8 Kependudukan 97
4.2 Penentuan Prioritas Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten 97
4.2.1 Prioritas Kriteria oleh Para Pakar 99
4.2.2 Prioritas Alternatif Lokasi 107
4.2.3 Hasil Akhir Pemrioritasan Kriteria dan Alternatif Lokasi ... 109
4.3 Keterkaitan peranan stakeholder dengan penetapan kebijakan lokasi 114
4.4 Hubungan hasil penelitian dengan kebijakan publik 116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 121
5.2 Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN 131

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Definisi Ibukota dan Pusat Pemerintahan	38
2.2	Faktor-Faktor Penentu Lokasi Ibukota	52
3.1	Variabel Penelitian	62
3.2	Random Consistency Index (RCI)	69
3.3	Skala Banding Berpasangan	71
4.1	Jarak Lima Kecamatan dengan Kecamatan Lainnya	84
4.2	Luas Daerah pada Lima Kecamatan menurut Klasifikasi Kelerengan/Kemiringan Tanah	86
4.3	Luas dan Letak Daerah Lima Kecamatan	89
4.4	Penggunaan Lahan pada Lima Kecamatan	91
4.5	Nilai Lahan pada Lima Kecamatan	91
4.6	Ketersediaan Aksesibilitas Pada Masing-Masing Lokasi Alternatif Penentuan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto	95
4.7	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	96
4.8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	96
4.9	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	97
4.10	Justifikasi Kriteria dan Alternatif AHP	98
4.11	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 1	99
4.12	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 2	100
4.13	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 3	100
4.14	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 4	100
4.15	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 5	101
4.16	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 6	101
4.17	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 7	101

4.18	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 8	102
4.19	Vektor Bobot dan Consistensi Ratio Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto	102
4.20	Bobot Final dan Urutan Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto	106
4.21	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Letak Geografis	107
4.22	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kondisi fisik	107
4.23	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Ketersediaan Lahan	108
4.24	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Historis	108
4.25	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kebijakan	108
4.26	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Politik dan Keamanan	108
4.27	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Aksesibilitas	109
4.28	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Ketersediaan Sarana Prasarana	109
4.29	Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kependudukan	109
4.30	Bobot Final dan Urutan Prioritas Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan 8 pakar	110
4.31	Bobot Final dan Urutan Prioritas Kriteria dan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Mojokerto	8
3.1	Struktur Hirarki pada Analytical Hierarchy Proses	67
3.2	Struktur Hirarki pada Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto	67
4.1	Grafik bobot prioritas kriteria lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan analisis expert choice	106
4.2	Grafik bobot Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan analisis expert choice	110
4.3	Hierarki dan Bobot Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto	111
4.4	Alur Proses Keterkaitan Penelitian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah	118
4.5	Alur Keterkaitan Hasil Penelitian dalam Proses Pengambilan Kebijakan di Kabupaten Mojokerto	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Perbandingan Berpasangan kriteria oleh tiap pakar	131
2	Perbandingan Berpasangan Alternatif lokasi berdasarkan tiap kriteria oleh tiap pakar	134
3	Analisis Expert Choice (penilaian bobot kriteria)	149
3.1	Analisis Expert Choice (penilaian bobot kriteria oleh tiap pakar	149
3.2	Analisis Expert Choice (Rekapitulasi penilaian bobot kriteria semua pakar)	158
4	Hasil Analisis Expert Choice (Penilaian bobot Kriteria pada setiap lokasi)	159
4.1	Hasil Analisis Expert Choice (Penilaian bobot kriteria tiap pakar pada setiap lokasi)	159
4.2	Hasil Analisis Expert Choice (Rekapitulasi Penilaian bobot kriteria semua pakar pada setiap lokasi)	175
5	Kuesioner *Analytical Hierarchy Process* (AHP)	177

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulai diterbitkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak kewenangan dalam melakukan pengaturan terhadap urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang ada. Otonomi Daerah tersebut diberikan dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan, juga peran serta masyarakat. Pada sisi yang lain, dengan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan daya saing dalam lingkungan strategis globalisasi tanpa meninggalkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan kekhasan daerah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan. Latar belakang peningkatan pelayanan tersebut adalah keinginan dalam rangka pengambilan keputusan agar lebih dekat dengan para *stakeholder* yang merasakan langsung pengaruh program/kegiatan dan pelayanan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini akan menambah tingkat relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Dari beberapa lingkup yang ada dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, menyebutkan tentang adanya penataan daerah, dimana penataan daerah dilakukan dengan tujuan peningkatan pelayanan publik dalam

rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta sebagai sarana pendidikan politik pada level lokal.

Tata pemerintahan yang baik merupakan misi setiap daerah, yang sangat didambakan oleh para *stakeholder* pada suartu daerah. Tata pemerintahan sebagian besar dilihat dari mutu layanan yang diberikan oleh para birokrat atau birokrasi kepada masyarakat pengguna layanan yang kemudian akan memunculkan nilai kepuasan. Aspek aksesibilitas masyarakat terhadap Ibukota serta unsur konektifitas terhadap wilayah maupun daerah lain merupakan beberapa contoh aspek penting dalam hal pemberian layanan tersebut. Oleh karenanya penentuan lokasi ibukota sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan daerah tersebut. Terkait penataan daerah, untuk menertibkan administrasi tata kepemerintahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, serta surat dari Menteri Dalam Negeri RI tanggal 1 Mei 2013, dihasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah perlunya pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto yang saat ini berada di Kota Mojokerto, dan dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto. Pemindahan lokasi Ibu Kota Mojokerto harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, baik aspek fisik, sosial maupun dari aspek kebijakan. Sehingga pemilihan lokasi ibu Kota Kabupaten Mojokerto nantinya sesuai dengan arahan pengembangan Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Ibukota merupakan pusat pemerintahan ayng memiliki status utama dalam suatu roda pemerintahan yang diatur oleh peraturan perundangan yng berlaku. Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibukota secara umum memiliki beberapa fungasi diantara sebagai fungsi politik dan ekonomi, oleh karena itu

ibukota memiliki peranan penting dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Ibukota secara umum memiliki karakteristik sebagai wilayah yang memiliki misi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan sebagai wilayah dalam melakukan berbagai diplomasi dengan wilayah lain.

Berbagai teori dan penelitian mengenai ibukota di masa lalu, menempatkan ibukota dengan titik berat lokasi geografis, yaitu lokasi ibukota yang berada di tengah (sentral) merupakan lokasi yang paling tepat untuk perkembangan ekonomi wilayah. Teori tersebut memiliki berbagai kekurangan yaitu berfokus pada faktor geografi, tanpa mempertimbangkan fakor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sejarah (Wolfel, 2002).

Evaluasi mengenai lokasi dan berbagai faktor yang terkait dengan ibukota sebagai pusat pemerintahan ataupun ibukota sebagai pengembangan kota baru merupaka hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dikarenakan setiap daerah memiliki ciri-ciri dan karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga sangat dimungkinkan akan ditemukan fenomena-fenomena baru yang berbeda dari daerah lainnya.

Pada negara Indonesia penentuan lokasi ibukota kabupaten pada umumnya dibahas oleh beberapa pihak yang terkait, pada umumnya dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didampingi oleh beberapa ahli yang mengetahui mengenai ciri dan karakteristik wilayah serta konsep mengenai ibukota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojoketo, merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur dimana saat ini masih berpusat pada wilayah Kota Mojokerto. Dengan diterimanya surat dari Menteri Dalam Negeri RI

tanggal 1 Mei 2013, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan segera memiliki ibukota yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan dan 304 desa/kelurahan, dimana setiap wilayah terdapat potensi dan ciri khas yang berbeda, dengan potensi ungggulan berupa pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan jasa. Dengan luasan sebesar 969,360 km^2 atau kurang lebih sekitar 2% dari luas Propinsi Jawa Timur dan terletak pada 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30" Lintang Selatan dan jumlah penduduk 1.186.497 di tahun 2015, Kabupaten Mojokerto merupakan daerah penyanggga utama Kota Surabaya.

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional "Gerbangkertosusila" dengan Kota Surabaya sebagai inti. Adapun potensi Kabupaten Mojokerto di bidang industri, lebih ditikberatkan pada industri hasil pengolahan pertanian, meski pada perkembangannya kegiatan industri cenderung berkembang kearah kegiatan industri pengolahan hasil tambang dan manufaktur, yang terdiri dari industri kecil, besar dan menengah. Selain industri, Kabupaten Mojokerto juga memiliki keunggulan dengan berbagai macam obyek wisata yang tersebar pada seluruh wilayah. Wilayah selatan Kabupaten Mojokerto, memiliki karakter tersendiri dengan letaknya yang strategis dan kondisi alam yang merupakan pegunungan memberikan daya tarik khusus bagi kawasan ini. Wilayah ini memiliki beberpa objek wisata yang dapat potensi yang dapat dikembangkan menjadi obek wisata alam yang menarik. Selain wisata alam, Kabupaten Mojokerto yang dikenal sebagai Pusat Kerajaan Mojopahit juga memiliki berbagai macam obyek wisata budaya/historis yang sebagian besar berada di Kecamatan Trowulan.

Wilayah Kecamatan Jetis, merupakan wilayah yang direncanakan sebagai Kota Industri, yang merupakan pusat bagi Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Dawarblandong. Saat ini pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut sangat pesat dibandingkan 5 tahun sebelumnya di setiap wilayah telah dilalui jalan beton dengan lebar minimal 5 meter. Kecamatan Mojosari, saat ini merupakan pusat perdagangan dan jasa dan merupakan Kecamatan yang sangat padat dengan aktivitas, hal ini dikarenakan Kecamatan Mojosari pada masa lalu direncanakan sebagai Kota Praja (Kota Kecil) sebagai pendukung aktivitas pada Kota Mojokerto.

Penentuan lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui proses pengkajian dan perencanaan oleh BAPPEDA selaku dinas yang berwenang dalam perencanaan pembangunan beserta konsultan yang mengkaji dan menilai lokasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mendagri. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terpilihlah Kecamatan Mojosari sebagai Ibukota Kabupaten Mojokerto. Keputusan penetapan Mojosari sebagai Ibukota Kabupaten dengan fungsinya sebagai Ibukota Pemerintahan pada akhirnya telah dicantumkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032, akan tetapi hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana. Dalam perjalanan implementasinya, ada beberapa kendala yang dianggap significant yaitu "Mahalnya Harga Lahan" di Mojosari sehingga Pengembangan Mojosari sebagai Ibukota tidak dapat dilaksanakan. Karena adanya kendala tersebut, wewenang untuk mengubah lokasi dan menunjuk wilayah yang akan ditetapkan sebagai Ibukota, langsung berada di tangan Bupati Mojokerto. Dalam hal ini peranan

BAPPEDA adalah menjadi pelaksana dimana memastikan apakah wilayah tersebut bisa diimplementasikan sebagai Ibukota Kabupaten

Penentuan lokasi dalam hal ini adalah lokasi suatu Ibukota pada dasarnya membutuhkan pertimbangan dari beberapa pihak yang terlibat karena hal tersebut merupakan kaidah dalam perencanaan pembangunan, namun dalam pelaksanaan persetujuannya, hanya beberapa dinas yang mempunyai tanggungjawab maupun wewenang dalam implementasi suatu kebijakan sehingga menjadi wujud riil dalam bentuk implementasi pembangunan fisik. Pada kasus di Kabupaten Mojokerto, karena adanya kendala tersebut maka penetapan keputusan kebijakan mengenai lokasi yang dipilih pada akhirnya ditentukan oleh Bupati yang mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang diutarakan secara pribadi oleh perorangan maupun wakil dari dinas tanpa melalui proses perencanaan/penilaian lagi. Karena usulan lokasi tersebut hanya berdasarkan pertimbangan individu, maka lokasi yang diusulkan tidak memiliki kriteria-kriteria yang komprehensif, hanya didasarkan pada satu atau dua kriteria yang dipahami oleh pihak pengusul hingga sarat dengan adanya kepentingan-kepentingan individu sehingga peluang munculnya kendala lain diluar kriteria yang menjadi pertimbangan pada wilayah yang diajukan sebagai pengganti akan menjadi tinggi. Beberapa wilayah pernah diusulkan kepada Bupati Mojokerto, seperti Kecamatan Bangsal, Kecamatan Trowulan, dan Kecamatan Sooko, dikarenakan pada kondisi lapangan, implementasi tetap sulit dilaksanakan karena adanya kendala-kendala baik minor maupun mayor. Proses pengambilan keputusan tanpa adanya pertimbangan dari beberapa pihak akan menyebabkan muncul “cacat” dalam proses perencanaan dikarenakan tidak adanya unsur pelibatan dinas-dinas atau pihak lain dalam penentuan keputusan suatu perencanaan daerah

Dalam rangka memudahkan Bupati sebagai pengambil keputusan dalam hal penetapan Ibukota Kabupaen Mojokerto, kedepannya dalam pengusulan lokasi-lokasi Ibukota, diperlukan kriteria-kriteria mengenai lokasi yang didapatkan dari pertimbangan banyak pihak meskipun tanpa proses perencanaan yang terlalu rumit supaya proses pengambilan keputusan lebih mudah dilakukan dan bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Salah satu metode pengambilan keputusan adalah dengan alat *Analytic Hierarchi Process* dimana alat ini mampu merangkum dan mengurutkan kriteria-kriteria yang didapatkan dari beberapa pihak yang memiliki pemahaman dan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto. Karena metode ini pada hakekatnya adalah merangkum pertimbangan dari beberapa pihak terkait, maka keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan para pakar yang dianggap mempengaruhi maupun memiliki kepentingan-kepentingan dalam penetapan lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto. Dengan alasan ini maka peneliti tertarik untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang menurut pakar/pihak terkait dibutuhkan dan perlu diperhatikan/dipertimbangkan dalam menentukan Ibukota Kabupaten. Dengan urutan kriteria tersebut, juga akan diperoleh alternative urutan lokasi yang terilih berdasarkan kriteria-kriteria yang dimilikinya.

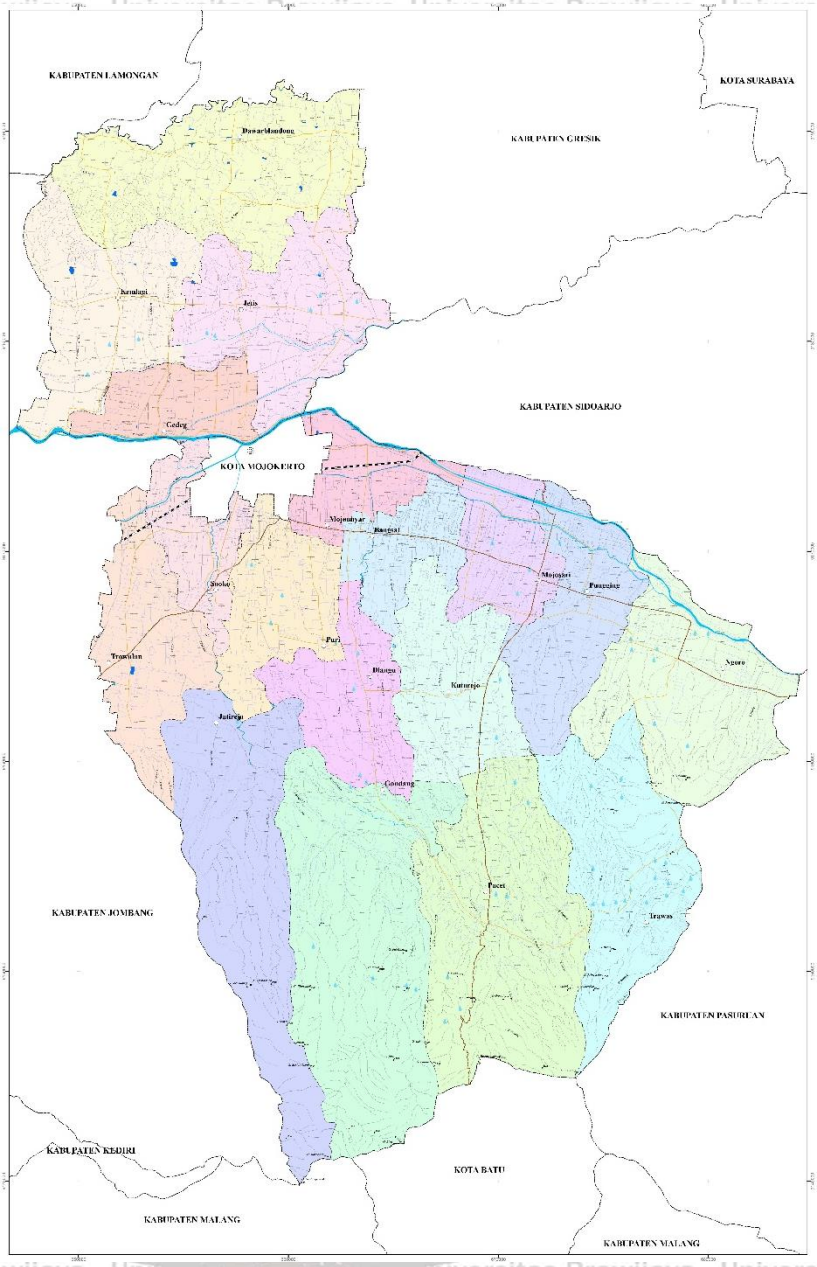

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Mojokerto

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, 2012

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

(1) Kriteria apakah yang menjadi penentu lokasi ibukota di Kabupaten Mojokerto?

(2) Lokasi manakah yang menjadi Alternatif Ibukota di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kriteria lokasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

(1) Mengidentifikasi prioritas kriteria dalam penentuan lokasi ibukota di Kabupaten Mojokerto.

(2) Menetapkan alternatif lokasi yang terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat yang lebih baik ke berbagai kalangan, antara lain:

(1) Secara praktis, untuk memberikan masukan serta pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tentang kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi ibukota serta pertimbangan lokasi yang bisa dijadikan lokasi ibukota berdasarkan kriteria-kriteria yang ada;

(2) Secara akademis, untuk menambah kekayaan keilmuan di bidang administrasi publik khususnya bidang perencanaan pembangunan daerah dalam menemukan kriteria perencanaan lokasi ibukota pada suatu wilayah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan ibukota, dan pengembangan kota baru (*new town*) telah banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia.

Ho Chin Siong tahun 2006 melakukan penelitian mengenai perencanaan, konsep, dan implementasi lokasi Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi tersebut. Berdasarkan penelitiannya, terlihat bahwa keputusan untuk merelokasi pusat pemerintahan Malaysia telah dilalukan mulai tahun 1993, sedangkan pembangunan dilakukan pada tahun 1996, ditindaklanjuti pada tahun 2012 pusat pemerintahan Malaysia resmi dipindahkan ke Putrajaya. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kemacetan di Kuala Lumpur yang semakin hari semakin bertambah. Putrajaya direncanakan berdasarkan konsep *garden city* dan *intelligent city* yang dilengkapi infrastruktur *modern* dan *smart* dengan maksud memudahkan bagi para penghuninya. Lokasi Putrajaya yang terletak 25 km dari Kuala Lumpur, tidak menjadi permasalahan berarti dikarenakan kelengakapan aksesibiltas yang dibangun. Faktor-faktor yang mempengaruhi atas terpilihnya Putrajaya sebagai pusat pemerintahan yang baru adalah harga lahan yang relatif lebih minim dibanding dengan daerah lain dan kalkulasi biaya pembangunan infrastruktur yang tidak besar, lokasi Putrajaya sangat strategis karena berada pada wilayah pertumbuhan, Putrajaya sudah memiliki transportasi dan

aksesibilitas yang baik, bentuk lahan dan jenis vegetasi yang memungkinkan dalam pembangunan, Putrajaya merupakan lokasi potensial untuk pengembangan wilayah sekitar, serta lokasi yang paling memiliki dampak konflik komunitas lokal yang paling minim.

Moh. Fitra U. Ali pada penelitian tesis pada tahun 2010 melakukan studi mengenai evalusai lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah di Kota Weda. Berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa faktor-faktor yang menentukan Kota Weda dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah adalah karena letak geografis, pemanfaatan lahan, ketersediaan sumber air, dan aksesibilitas jaringan jalan yang baik. Namun, indikator yang membuat Kota Weda masih belum layak untuk dijadikan pusat pemerintahan adalah kerentanan terhadap bencana banjir dan perekonomian masyarakat yang masih didominasi oleh sektor pertanian.

Penelitian lain mengenai evaluasi lokasi juga dilakukan oleh A. Malik Ibrahim pada penelitian tesis tahun 2001 yaitu evaluasi terhadap lokasi ibukota Provinsi Kabupaten Maluku Utara, yakni Sofifi. Dalam penelitiannya, Malik membandingkan tiga wilayah untuk mengentahui kelayakannya, yakni KotaTernate, Kabupaten Sofifi, dan Kabupaten Sidangdoli. Berdasarkan perbandingan di ketiga wilayah itu, maka Malik merekomendasikan Kabupaten Sofifi sebagai ibukota Kabupaten Maluku Utara, hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemilihan Kabupaten Sofifi sebagai ibukota provinsi dipengaruhi oleh faktor-faktor lahan kosong yang masih luas, terhindar dari jalur bencana gempa bumi, berada pada posisi yang sentral secara regional. Akan tetapi dalam perkembangannya sebagai ibukota provinsi, Kabupaten Sofifi

masih memerlukan strategi pemantapan fungsi dan peran kota sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Penelitian lanjutan terhadap penetapan Ibukota Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh Muslihin pada tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa implementasi pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara mengalami keterlambatan dikarenakan faktor sosio-kultural dan historis. Keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh penting dan perebuatan daerah kekuasaan dua kesultanan, serta fenomena konflik sosial yang terjadi di Maluku Utara merupakan fenomena yang terjadi dalam proses pemindahan ibukota provinsi tersebut. Selain faktor tersebut ada faktor lain yaitu faktor ekonomi, sebagai akibat masih minimnya pembangunan fasilitas yang menunjang pemindahan ibukota, serta faktor politik sebagai akibat ketidak setujuan sebagian perangkat pemerintahan terhadap pemindahan ibukota sehingga menimbulkan konflik poltik.

Arry Ronny Danny Deda pada tahun 2002 melakukan evaluasi penetapan lokasi ibukota Kabupaten Jayapura di wilayah Sentani dengan tujuan untuk melihat konsep dan norma yang digunakan dalam penetapan lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa antar teori dan norma yang digunakan dalam menentukan kriteria lokasi ibukota kabupaten terdapat hubunggan yang signifikan, kriteria hubungan tersebut adalah kriteria ketersediaan lahan dan kriteria aksesibilitas intra maupun inter regional. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang kontradiktif antara kriteria penetapan lokasi ibukota dalam penelitian dengan yang dilakukan oleh pemerintah, perbedaan tersebut terkait dengan kesesuain kondisi fisik dan ketersediaan lahan datar pada lokasi terpilih, selain itu juga terdapat perbedaan kontradiktif antara norma dan

konsep pemerintah kabupaten dalam penetapan lokasi ibukota, yakni berkaitan dengan aspek fisik, lokasi strategis, keadaan ekonomi, dan aspek pembiayaan.

Rahab, *et al.* (2013) dalam laporan penelitiannya yang menggunakan metode analisis interaktif, yaitu *Analytic Hierarchy Process* dan *Interpretive Structural Modeling,* menyatakan bahwa ekonomi daerah dapat didorong melalui pengembangan industri kecil dan menengah dengan membangun kompetensi inti industri daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah melalui kompetensi inti industri daerah berdasarkan komoditi unggulan dari Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi penggalian data sekunder, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Dapat dismpulkan bahwa batik merupakan industri yang paling potensial untuk dijadikan sebagai kompetensi inti industri Kabupaten Banyumas. Dalam proses strategi pencapaian berbagai keunggulan kompetitif dari batik sebagai kompetensi inti industri Kabupaten Banyumas dilakukan melalui tiga tahap berikut: (1) tahap awal (perbaikan infrastruktur, keuangan dan perundang-undangan yang mendukung); (2) tahap utama (pengembangan sumber daya manusia, manajemen dan pemasaran, *branding* dan penciptaan keunikan batik); dan (3) tahap akhir (peningkatan produktivitas dan inisiasi industri terkait dan mendukung).

2.2 Konsep Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari kata bahasa inggris *administration* (*to administer*) yang dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan) yang berarti bahwa administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Dalam bahasa belanda adalah *administratie* dalam artian

kegiatan penatausahaan dan manajemen. Beberapa istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu meiliki arti sebagai suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya (latin); kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya (Inggris) serta berarti sebagai kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketata usahaan. Perkembangan administrasi sebagai cabang ilmu membawa perkembangan pada pengertian administrasi menjadi sebagai usaha, manajemen, proses sampai dengan pemerintahan (Indradi, 2010).

Menurut Indradi (2010) terdapat beberapa definisi administrasi yaitu dalam arti sempit sebagai tata usaha, administrasi sebagai seni, administrasi sebagai teknik dan ketrampilan, administrasi sebagai ilmu, administrasi sebagai manajemen serta administrasi dalam arti luas sebagai proses atau kegiatan. Administrasi dalam arti luas ditemukan dalam beberapa rumusan berikut:

1. Administrasi adalah suatu usaha atau upaya manusia yang kooperatif dan mempunyai tingkat rasionalitas tinggi (Waldo,1971);
2. Administrasi adalah seluruh aktivitas ataupun kegiatan individu-individu dalam suatu organisasi/lembaga/perusahaan berkaitan dengan tugas memerintah, memajukan dan mejadi pelengkap suatu usaha bersama dari kelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu (Tead, 1951);
3. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses manajerial diantara dua orang atau lebih, berdasarkan azas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya (Siagian, 1985);

4. Dalam pengertian lebih luas, administrasi merupakan aktivitas suatu kelompok (individu) yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Simon, 1959);
5. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan utama yang dilakukan secara berkelompok untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie, 1965);
6. Administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan bersama secara efisien dengan dan melalui orang lain (Robins, 1983);

Administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik selanjutnya disebut dengan administrasi publik. Administrasi publik merupakan terjemahan dari *public administration* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi publik atau administrasi pemerintahan (Indradi, 2010). Menurut Chandler dan Plano (1988) dalam Indradi (2010) pengertian administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Felix A. Nigro (1977) dalam Darmadi dan Sukidin (2011) menegaskan bahwa administrasi publik berhubungan tidak hanya dengan lembaga-lembaga publik sebagai suatu organisasi, tetapi berhubungan dengan kelompok-kelompok lain dan juga dengan lingkungannya. Dengan demikian studi administrasi publik akan banyak menyentuh dan diwarnai oleh ilmu-ilmu sosial lain dan juga ilmu alam.

Dikatakan oleh Robert Presthus (1975) dalam Darmadi dan Sukidin (2011) bahwa administrasi publik adalah satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan manusia dan barang yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan sosial kolektif, melibatkan berbagai ilmu sosial. Salah satu ilmu yang

erat hubungannya dengan ilmu administrasi publik adalah ilmu ekonomi. Ada beberapa tahapan kebijakan publik seperti formulasi dan implementasi yang mempunyai dimensi ekonomi.

Sebagian besar persoalan administrasi publik bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi publik adalah suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis Oleh karena itu, Gerald Caiden sebagaimana dikutip oleh Thoha (2010) menyatakankan bahwa disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*).

Menurut Thoha (2010) saat ini administrasi publik berorientasi pada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat, sehingga lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Peran administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik mengupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

Administrasi publik dalam perkembangannya mengalami perubahan pemikiran dimana administrasi publik tidak semata-mata hanya berkaitan dengan ilmu administrasi tapi juga memberikan perhatian kepada teori pembangunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1995) bahwa para ilmuwan bidang administrasi negara memberikan *point* utama terhadap dua hal yaitu administrasi pada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan (dari masyarakat agraris ke arah masyarakat maju dan mulai

mengembangkan industri) dan permasalahan *interrelasi* terhadap administrasi sebagai ilmu ataupun sebagai praktek dibidang kehidupan lainnya.

Pernyataan diatas didukung oleh Kartasasmita (1997) yang mengatakan bahwa administrasi negara (publik) telah berkembang menjadi administrasi pembangunan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dalam melaksanakan program-program bagi tercapainya tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan suatu proses maupun prosedur administrasi dalam usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis serta inovatif dalam rangka berupaya melakukan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui pengerahan alokasi sumber daya untuk terwujudnya pembangunan.

2.3 Kebijakan Publik

Ilmu kebijakan *(policy science)* mempelajari tentang pemahaman berbagai proses keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga umum maupun perseoranggan, serta membahas penilaian dari seluruh pengggetahuan untuk tujuan pembuatan keputusan. Kebijakan Publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat pada wilayah pemerintahannya. Istilah kebijakan atau kebijaksanaan sebagai terjemahan dari kata *policy*, pada umumnya memang berada di wilayah kekuasaan maupun keputusan pemerintah, hal tersebut dikarenakan pemerintahlah yang memiliki tugas dan wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu.

Kebijakan memiliki unsur-unsur untuk dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada, yaitu tujuan kebijakan, permasalahan, tuntutan (demand), dan dampak atau outcomes. (Handoyo, 2012).

Thomas Dye dalam Abidin, 2012 menyebutkan kebijakan merupakan sebuah pilihan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Handoyo, 2012, sebagaimana yang diungkap oleh Hogwood dan Gunn, seperti dikutip Parsons (2005:15) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai penanda sebuah bidang aktivitas, sebagai bentuk ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Berdasarkan berbagai pemahaman diatas, maka didapatkan suatu kesimpulan tentang konsep kebijakan, bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang terkait dengan berbgai permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Tujuan atau sasaran dimaksud merupakan tujuan publik, bukan tujuan individu atau kelompok tertentu.

Kata publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Kata publik dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah *private.* Pemilahan publik dan privat dalam konteks ruang, dalam praktik kehidupan tidaklah mudah. Hubungan antara ruang publik dengan ruang privat sangat kompleks dan mencerminkan interdependensi. Kepentingan publik dan privat pun bisa saling bertentangan. Cara memaksimalkan kepentingan individu dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan kekuatan pasar (Parsons 2005). Berfungsinya kebebasan individu

dalam menentukan pilihan dapat memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kesejahteraan publik. Dalam kaitan ini, peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat dijamin. Itulah sebabnya, pemerintah tidak boleh banyak mencampuri urusan individu.

Sektor publik tidak selalu hanya mengejar keuntungan finansial. Sektor ini bisa mengejar keuntungan finansial, tetapi dapat juga mengutamakan kesejahteraan sosial. Jika yang dikejar adalah kesejahteraan sosial, maka sektor publik ini tergolong sektor nonprofit, yang ciri-cirinya adalah (1) sektor ini tidak mengejar keuntungan, (2) cenderung menjadi organisasi pelayanan, (3) ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun, (4) lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumberdaya finansialnya, (5) lebih didominasi oleh kelompok profesional, (6) akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat atau provit, (7) manajemen puncak tidak mempunyai tanggung jawab yang sama atau imbalan finansial yang sama, (8) organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik, dan (9) tradisi kontrol manajemennya kurang (Parsons 2005).

Kebijakan publik merupakan bagian dari komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen

negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

Output kebijakan bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau pun Peraturan Daerah, baik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, finansial, maupun bidang-bidang lain yang menyentuh kehidupan masyarakat atau publik. Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama (Nugroho 2009). Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan.

2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembahasan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah, dalam hal peran pemerintah daerah di era otonomi sangatlah diperlukan karena proses pelaksanaan pembangunan didesentralisaskan dari pemerintah pusat kepada pemerinta daerah. Perlunya pemahaman terlebih dahulu mengenai perencanaan pembangunan, ketika menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah. Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004) menyatakan dalam bukunya, bahwa

perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Dikarenakan berfungsi sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan dijadikan bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan *(action plan)*.

Menurut Sjafrizal (2016), perencanaan pembangunan merupakan suatu cara atau teknik untuk dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien yang disesuaikan dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan sebaiknya memiliki karakteristik yang bersifat *implementif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Pada pendapat yang lain, ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2016) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih terperinci tentang Perencanaan Pembangunan, yaitu Perencanaan Pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah dengan maksud mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Pada dasarnya, kegiatan perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan penelitian, dimana saat proses pelaksanaannya menggunakan metode-metode penelitian, diawali teknik pengumpulan data, analisis data, sampai dengan studi lapangan/kelayakan dengan tujuan mendapatkan data-data yang akurat.

Perencanaan pembangunan haruslah melihat kondisi riil di lapangan untuk melihat realita yang terjadi dan sangat tidak mungkin apabila hanya dilakukan diatas meja. Data-data realita tersebut digunakan sebagai data primer untuk bahan dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya perencanaan pembangunan mempunyai arti sebagai proses perumusan berbagai alternatif maupun keputusan, dimana penentuan keputusan maupun alternatif yang akan dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) disandarkan pada data-data serta berbagai fakta yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk, dapat dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungan dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada serta harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah; 2004:7)

Menurut Syafrizal, 2016 perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki 4 ruang lingkup, yaitu *pertama*, perencanaan makro, dimana perencanaan ini memiliki ruang lingkup yang bersifat menyeluruh meliputi seluruh aspek pembangunan juga sector pembangunan yang ada dalam bentuk kegiatan maupun program yang memiliki dampak secara menyeluruh terhadap kinerja pembangunan bukan hanya pada sebagian sector atau beberapa sector pembangunan saja. Pada umumnya pembahasan mengenai perencanaan makro ini meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan ekonomi daerah, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, suber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, kebutuhan investasi, serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Bentuk riil dari perencanaan semacam ini pada umumnya

berupa Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) ataupun RPJM (Rencana Program Jangka Menengah). *Kedua*, perencanaan sektoral, merupakan perencanaan yang dilakukan pada satu sektor saja atau pada bidang tertentu, semisal perencanaan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, dan seterusnya. Perencanaan ini sebagai turunan dari perencanaan makro, sehingga penyusunan rencana sectoral ini haruslah mengacu pada rencana makro yang telah ditetapkan, yang kemudian penyusunannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sector yang ada. Secara umum, kita mengenal dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perengkat Daerah (Renstra SKPD), dokumen inilah yang dinamakan dokumen perencanaan sectoral, yang kemudian di tindaklanjuti dengan Rencana Program dan Kegiatan yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja (Renja) SKPD. *Ketiga,* perencanaan wilayah (regional), merupakan perencanaan yang memiliki unsur penataan ruang yang terintegrasi dengan unsur kegiatan ekonomi sosial yang ada pada suatu wilayah. Perencanaan jenis ini sering disebut dengan *Spatial Planning* atau *Regional Planning* atau *Urban Planning.* Sasarn utama perencanaan jenis ini adalah menyusun kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan memanfaatkan potensi wilayah dan keunggulan lokasi yang ditampilkan dalam peta sebagai arahan pembangunan wilayah. Dalam perencanaan ini aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek perencanaan struktur ruang dan aspek perencanaan penggunaan tanah (pola ruang). Menurut UU No. 26 tahun 2007 aspek stuktur ruang adalah aspek yang berupa susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan aspek pola ruang merupakan upaya pendistribusian

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pada umumnya dikenal dokumen yang terkait dengan perencanaan ini adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kawasan Strategis Nasional (RKSN), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan lain sebagainya. *Keempat,* perencanaan proyek atau kegiatan, perencanaan iniadalah perencanaan yang disusun ketika sedang dan/atau akan melaksanakan suatu kegiatan/proyek tertentu. Perencanaan inisangat penting apabila kegiatan/proyek tersebut dilakukan dengan nilai yang sangat besar dan juga memiliki dampak yang sangat besar, semisal pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, pembangunan pusat perkantoran pemerintahan, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Perencanaan jenis ini haruslah memperhitungkan suatu dampak kegiatan terhadap lingkungan, yang pada umumnya tertuang dalam Analisis biaya dan manfaat. Pada praktiknya, perencanaan ini, haruslah memiliki tahapan identifikasi, tahapan persiapan proyek, tahapan pelaksanaan, serta tahapan evaluasi. Tahapan tersebut disebut dengan *siklus proyek.*

2.5 Teori Lokasi

2.5.1. Pengertian Teori Lokasi

Suatu kegiatan dalam sitem keruangan (spasial), baik itu yang terbentuk secara alamiah ataupun melalui berbagai kajian dan analisis yang tertuang dalam proses perencanaan, seluruhnya memiliki alasan-alasan yang mendasarinya dan kuat untuk ditetapkan menjadi pilihan tertentu yang dapat diterima oleh para pelaku kegiatan tersebut. Hal tersebut terbukti melalui sejarah perkembangan wilayah sejak peradaban manusia pertama, dimana mereka pada awalnya

menempati lahan-lahan subur di sepanjang pinggiran dan lembah-lembah sungai, di sekitaran khatulistiwa, sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan penggunaan ruang berlangsung sangat kompleks sehingga membutuhkan ruang yang lebih kompleks dan memerlukan pengaturan terhadap penggunaan ruang yang semakin hari semakin terbatas akan tetapi pola kegiatan manusia terus berkembang.

Pengertian dari teori lokasi semula merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tata ruang *(spatial order)* dari suatu pola kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki fungsi alokasi geografis sumber-sumber yang potensial, serta berbagai hubungannya atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan baik secara ekonomi maupun secara sosial (Tarigan, 2006:77). Pengertian lain dari teori lokasi berupa penjelasan secara teoritis terkait penataan ruang suatu kegiatan ekonomi.

Tingkat aksesibilitas adalah factor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan dalam pencapaian suatu lokasi dari lokasi lain di wilayah sekitarnya (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, 2006, variable yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas adalah jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Pada awalnya teori-teori yang berkenaan dengan lokasi digali oleh para ahli ekonomi abad ke-18 dan semakin berkembang pada abad ke-19 dengan faktor-faktor yang terkait ruang, jarak, dan waktu dalam analisa perekonmian. Perkembangan selanjutnya dari teori ini banyak dilakukan oleh para ahli bidang perencanaan kota dan geografi.

Perencanaan pengembangan wilayah sangat dinamis dan mengalami perubahan sejalan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan yang terjadi di setiap wilayah. Tujuan utama dari perencanaan wilayah adalah tercapainya sasaran dari sub-sistem pembangunan wilayah yang terorganisir secara spasial maupun secara territorial. Oleh karena itu dalam melakukan penyusunan perencanaan wilayah, diperlukan perangkat teori sebagai dasar pemikiran sebelum melangkah pada tahapan analisa dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Beberapa teori lokasi yang masih relevan untuk digunakan dalam melakukan kajian perencanaan pengembangan wilayah, diantara sekian banyak teori lokasi yang ada adalah teori yang diungkapkan oleh Von Thunen (1826) dan W. Christaller (1933).

2.5.2. Teori Sewa Tanah (Von Thunen)

Von Thunen (1826) mengungkapkan teori tentang hubungan antara lokasi tata ruang dengan pola penggunaan tanah, yang dilakukannya pada tanah pertanian. Melalui pengamatannya tersebut didapatkan lokasi yang semakin dekat dengan pusat pasar (pusat penjualan hasil produksi pertanian), maka sewa tanahnya semakin tinggi, serta biaya transportasi akan semakin rendah. Dan berlaku sebaliknya, yaitu lokasi yang semakin jauh dari pasar, maka sewa tanahnya semakin rendah serta biaya transportasinya semakin tinggi.

Berdasarkan penemuannya tersebut Von Thunen menggambarkan pola penggunaan tanah dengan bentuk lingkaran-lingkaran konsentris sebagai gambaran perbedaan penggunaan tanah di kota. Teori ini berlaku dalam keadaan dengan asumsi, *pertama,* wilayah tersebut tidak dipengaruhi oleh wilayah lain yang bersebelahan (terisolasidari pengaruh luar, atau berdiri sendiri)., *kedua,* penduduk

di wilayah tersbut memiliki kecenderungan untukbermukim secara terpusat. *Ketiga,* produktivitas tanah di wilayah tersebut memiliki kualitas yang sama secara fisik. *Keempat,* di wilayah tersebut kondisi transportasinya memiliki keseragaman. (Adisasmita, 2010)

Teori ini, apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini, jika dilihat pada beberapa sisi masih layak diterapkan, tetapi bila di lihat dari sisi yang lain sudah tidakbisa diterapkan. Kondisi pengembangan teori ini saat ini, tergambarkan dalam,bahwa harga lahan semakin dekat dengan pusat kota, harga atau sewa lahannya akan semakin mahal. Hal ini berkakibat, pemilik lahan akan menggunakan tanahnya dengan efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, maka secara spesifik, tanah/lahan yang dekat dengan pusat kota akan dipergunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Di lain sisi, pembangunan sector transportasi untuk memfasilitasi wilayah-wilayah *hinterland,* yang pada umumnya berupa lahan pertanian juga sedang *massive* dilakukan oleh pemerintah, sehingga para pelaku pertanian di wilayah *hinterland* akan termudahkan dalam hal aksesibilitasnya menuju pasar atau dalam kasus ini adalah pusat kota.

2.5.3. Teori Tempat Sentral (W. Christaller)

Pelayanan merupakan hal yang wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah, untuk masyarakat. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, dan pelayanan telah sampai dan diterima oleh setiap individu masyarakat tanpa terkecuali menurut prinsip penyediaan pelayanan umum.

Teori pusat pelayanan sebagai dampak dari pemindahan ibukota kabupaten erat kaitannya dengan teori lokasi yang dikemukakan oleh *Christaller*. *Walter Christaller* (1933) menjelaskan tentang susunan dan ukuran kota, jumlah

kota, dan distribusi/jarak di dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diaplikasikan dalam ibukota kabupaten sebagai pusat distribusi barang dan jasa kepada penduduk yang tersebar, dan prinsip pengoptimalan.

Teori pemusatan lokasi diperkenalkan pertama kali oleh *Christaller* (1933 dalam Hartshorn, 1980) dan dinyatakan sebagai teori pertumbuhan perkotaan menyatakan bahwa pertumbuhan kota tergantung pada kekhususannya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh wilayah *hinterland* akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan) tersebut. Dalam penyataannya *Christaller* menyebutkan lokasi yang positif sebagai lokasi yang memberikan dukungan terhadap pusat kota. Pusat kota diperuntukkan sebagai pemberi jasa utama sehingga harus disediakan tanah/lingkungan. Kota merupakan pusat daerah yang produktif, dan tingkat distribusi yang tinggi, sehingga area yang disebut sentral adalah pusat kota.

Berdasarkan prinsip aglomerasi ekonomi, kota besar menjadi pusat bagi dirinya sendiri dan pusat kegiatan bagi kota yang lebih kecil. Hal ini berarti kota kecil akan bergantung pada tersedianya dan terpengaruh pada aktivitas yang ada pada kota besar/pusat kota/ central place. Teori Christaller didasarkan pada pembedaan wilayah pusat sebagai penyedia kebutuhan dan jasa, dan wilayah perifer sebagai wilayah pelengkap wilayah pusat.

Terdapat 4 variabel/ffaktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan, yaitu Faktor lokasi ekonomi, Faktor ketersediaan sumberdaya, Kekuatan aglomerasi, dan Faktor investasi pemerintah

Pada tahun 1933, Walter Christaller mengamatai adanya susunan kota-kota ayng tersebar secara beraturan di Jerman Tengah. Berdasarkan hal tersebut

dia melakukan analisa mengenai pusat-pusat pelayanan yang terlihat adanya hirarkhi dari pusat pelayanan tersebut, yang kemudian disebit dengan hirarkhi perkotaan. *Christaller* juga mendasarkan teorinya berdasarkn konsep *range* (jangkauan) dan *threshold* (ambang). Jarak yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dikatakan sebagai *Range* (jangkauan), sedangkan *threshold* (ambang) merupakan jumlah minimal penduduk suati wilayah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan supply barang.

Menurut Christaller, pusat suatu lokasi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tempat sentral yang berhierarki 3 (K = 3), berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah sekitarnya, atau disebut juga pasar optimal, sebagai pusat pelayanan.
2. Tempat sentral yang berhierarki 4 (K = 4), merupakan optimalisasi kondisi lalu-lintas. Wilayah yang bercirikan kondisi tersebut dan wilayah sekitarnya yang terpengaruh oleh tempat sentral tersebut senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien.
3. Tempat sentral yang berhierarki 7 (K = 7), merupakan optimalisasi dari situasi administratif. Tempat sentral dengan kondisi ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah-wilayah tetangganya.

Adanya range dan threshold dalam tingkatan pelayanan yang dipengaruhi oleh volume pelanggan yang diperlukan untuk penyediaan layanan yang menguntungkan. Hal ini meyebabkan masyarakat akan lebih memilih untuk memanfaatkan pusat pelayanan kecil yang tersebar karena lebih mudah dan dekat dengan masyarakat.

Teori Chistaller yang menyatakan tentang terjadinya model area pusat pelayanan heksagonal digambarkan melalui suatu proses, yaitu pertama,

terbentuk areal pusat-pusat pelayanan suatu berbentuk lingkaran-lingkaran. Dimana setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold dari pelayanan tersebut. Kemudian lingkaran-lingkaran yang digambarkan tersebut merupakan range dari pelayanan, dimana lingkarannya boleh tumpang tindih. Pada akhirnya, range yang tumpang tindih dibagi diantara kedua pusat yang berdekatan, maka kemudian terbentuklah areal yang heksagonal dimana area tersebut menutupi seluruh daratan sehingga menjadi tidak tumpang tindih.

Ada beberapa asumsi yang berkembang dalam teori Christaller, yaitu pertama, konsumen memiliki kewajiban untuk menanggung ongkos angkutan, sehingga jarak menuju pusat pelayanan dinyatakan dalam biaya dan waktu. Kedua, *range* suatu barang ditentukan oleh jarak, yang kemudian dinyatakan dalam biaya dan waktu. Ketiga, konsumen akan memilih pusat pelayanan yang paling dekat dalam rangka mendapatkan barang dan jasa. Keempat, kota-kota yang ada akan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Kelima, wilayah dimaksud berupa dataran yang rata, bercirikan ekonomi sejenis dan persebaran penduduknya merata.

Dikarenakan pusat pemerintahan merupakan lokasi yang vital dan menjadi pusat administrasi, maka pemilihan lokasi pusat pemerintahan harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dikarenakan perkembangan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berjalan seiringan, pemilihan tempat sebagai pusat pemerintahan, seharusnya memperhatikan aspek fisik, letak strategis, kondisi sosial ekonomi, serta budaya. Lokasi yang menjadi tempat pemindahan pusat pemerintahan, pusat pelayanan, dan ibukota kabupaten harus cukup mandiri dan siap menjadi pusat yang baru. Maka kondisi fisik daerah tersebut, kondisi perekonomian dan budaya masyarakat harus mendukung adanya perubahan ini.

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomr 22 Tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten berarti akan terbentuknya sebuah pusat yang akan melayani daerah sekitarnya. Dan hal ini dapat dihubungkan dengan teori *Central Place* oleh Christaller. Teori ini menjelaskan mengenai sebuah kota yang menjadi pusat bagi penduduknya. Pusat dalam sebuah kota pada teori ini harus mampu memberikan pelayanan barang dan jasa. Sebuah pusat pelayanan dengan wilayah yang besar akan memberikan pelayanan relatif lebih luas jika dibandingkan dengan pusat pelayanan dengan wilayah yang lebih kecil. Sehingga dengan pemindahan ibukota kabupaten ini akan memberikan dampak yang relatif cukup luas terkait kegiatan sosial dan ekonomi selaku inti dari pusat pelayanan.

Teori Christaller juga menjelaskan bagaimana sebuah kota akan memiliki pusat-pusat lain yang tersebar dan dekat dengan penduduk melalui model wilayah heksagonal. Permodelan wilayah heksagonal ini akan terbagi ke dalam hierarki atau tingkatan. Tetapi sebelumnya wilayah harus dimodelkan terlebih dahulu menggunakan bangun segienam yang memiliki pusat. Melalui bangun segienam ini semua wilayah dari kabupaten akan terakomodir dan tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan tidak efisien. Pusat-pusat yang berada pada heksagon akan menjadi pusat-pusat kecil yang tersebar mendekati masyarakat. Dengan adanya pusat-pusat yang merata diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan ekonomi.

2.6 Kota Dan Ibukota

Menurut pengertian secara geografis, kota merupakan tempat dimana penduduknya rapat, keberadaan rumah secara berkelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan di bidang pertanian. Bintarto dalam Marangkup dan Eka (2006), menyebutkan kota dalam tinjauan geografi merupakan suatu bentang budaya yang timbul oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Perkembangannya, konsep tentang kota dapat dilihat melalui empat sudut pandang, yaitu segi fisik, administratif, sosial, dan fungsional.

Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisikal dari lingkungan kota. Smailes dalam Marangkup dan Eka (2006) memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan dan tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu Conzen dalam Marangkup dan Eka (2006) juga mengemukakan unsur -unsur yang serupa dengan yang dikemukakan Smailes, yaitu *plan, architectural style,* dan *land use*. Berdasarkan pada berbagai macam unsur morfologi kota yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa secara umum unsur-unsur morfologi kota berkisar antara karakteristik bangunan, pola jalan dan penggunaan lahan. Unsur-unsur ini yang paling sering digunakan untuk mengenali suatu daerah secara morfologis.

2.6.1. Tipe, Definisi dan Konsep Ibukota

Dalam menjalankan perannya, ibukota memiliki beberapa tipe yang berbeda. Sebuah kota ada yang menjadi pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, dan ada kota yang menjadi pusat salah satu dari fungsi tersebut saja.

Meskipun sebagian besar ibukota memiliki fungsi yang paling dominan dalam pemerintahan, namun tidak semua kota sama. Hall (2006) membagi kota dalam tujuh tipe, yaitu:

1. *Multi-Function Capitals*: mengkombinasikan semua atau sebagian besar fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di level nasional (London, Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo).
2. *Global Capitals*: kondisi spesial dari tipe pertama dimana ibukota juga memiliki peran di tingkat super-nasional dalam politik, komersial (ekonomi), atau keduanya (London, Tokyo).
3. *Political Capitals*: memiliki fungsi sebagai kota pusat pemerintahan, tetapi tidak memiliki peran sebagai kota pusat ekonomi (The Hague, Bonn, Washington, Ottawa, Canberra, Brasília).
4. *Former Capitals*: kota yang pernah menjadi ibukota (tidak lagi memiliki status sebagai ibukota) tetapi tetap memertahankan fungsi historisnya (St. Petersburg, Philadelphia, Rio de Janeiro).
5. *Ex-Imperial Capitals*: kondisi spesial dari tipe ketiga, dimana kota merupakan mantan ibukota dimasa kerajaan yang kembali menjadi ibukota dimasa modern. Kota tersebut juga memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi dan budaya untuk wilayah mantan kerajaannya (London, Madrid, Lisbon, Vienna).
6. *Provincial Capitals*: kondisi spesial dalam negara federal. Mirip seperti tipe ketiga, sebuah kota pernah memiliki status sebagai ibukota secara *de facto*, namun di era modern telah kehilangan statusnya. Perubahan status tersebut tidak memengaruhi fungsi mereka terhadap daerah di sekelilingnya (Milan, Turin, Stuttgart, Munich, Montréal, Toronto, Sydney, Melbourne).

7. *Super Capitals*: kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat dari organisasi internasional. Kota ini hanyalah kota biasa ataupun kota yang memiliki status sebagai sebuah ibukota (Brussels, Strasbourg, Geneva, Rome, New York).

Selain tujuh tipe diatas, Campbell (2004) merangkum berbagai macam tipe ibukota dan membaginya kedalam enam kategori utama. Campbell merangkum dengan mempertimbangkan aspek historis yang ada dalam kota tersebut. Kategorinya adalah:

1. *Classic Capitals*: Jakarta, Bogota, Caracas, London, Madrid, Mexico City).
2. *Relocated Capitals:* Ankara (dari Istanbul 1923, Turki), Astana (dari Almaty 1998, Kazakhstan), Lilongwe (dari Blantyre 1976, Malawi).
3. *Constructed Capitals*: Abuja (dari Lagos 1991, Nigeria), Brasilia (dari Rio de Janeiro 1960, Brasil), Canberra (dari Melbourne 1927, Australia), Islamabad (dari Karachi 1960, Pakistan).
4. *Federal Capitals*: Canberra (Australia), Kinshasa (Kongo), Moscow (Rusia), Ottawa (Kanada).
5. *Split Capitals*: Amsterdam/ The Hague (Belanda), Bloemfontein/ Cape Town (Afrika Selatan).
6. *Archipelago Capitals*: Jakarta (di pulau Jawa, Indonesia), Tokyo (di pulau Honshu, Jepang).
7. *Capitals with Unique Jurisdictions*: Abuja (*Federal Capital Territory*, Nigeria), Brasilia (*Federal District*, Brasil), Mexico City (*Federal District*, Meksiko).

Berdasarkan pengkategorian dari Hall dan Campbell, sebuah ibukota yang memindahkan ibukotanya dapat dikategorikan dalam tipe *former capitals*, *relocated capitals*, dan *constructed capitals*.

Seringkali masyarakat banyak mengartikan bahwa ibukota dan pusat pemerintahan adalah dua hal yang sama. Hingga saat ini, masih banyak perdebatan diantara keduanya. Banyak ilmuan mencoba untuk mendefinisikan pengertian ibukota. Claval (2000) menyatakan bahwa ibukota dapat diartikan sebagai refleksi dari sifat dan organisasi sebuah wilayah yang mana fungsi kehidupan nya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain disekitarnya dengan sistem terpusat yang dalam penentuannya menggunakan hukum kontinental dan berada pada pengawasan sistem kekuasaan. Fungsi-fungsi yang berada dalam sebuah ibukota mencakup fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi pemerintahan. Claval (2000) mengungkapkan pula bahwa kajian mengenai ibukota juga banyak dikaji oleh geografi, dimana pada ilmu geografi ibukota difokuskan pada pengertian sebuah tempat yang memiliki jumlah individu yang tinggi, tradisi yang kuat, wilayah dengan peninggalan historis dan monumen yang mencolok, serta wilayah tersebut terkadang memiliki nilai yang tinggi. Sependapat dengan pengertian yang diungkapkan oleh Claval, Wusten (2000) juga mengungkapkan bahwa ibukota diartikan sebagai pusat administrasi dan politik yang menjadi simbol kekuasaan yang didalamnya terdapat banyak fungsi dan hierarki yang berbeda, seperti fungsi pelayanan, fungsi agama, fungsi pemerintahan, dan fungsi militer. Dalam hal ini Wusten (2000) juga menambahkan bahwa ibukota adalah sebuah simbol sebuah pusat wilayah. Qi (2008) juga mendefinisikan bahwa pada mulanya ibukota dibangun sebagai sebuah simbol dari lahirnya atau berdirinya sebuah wilayah dan juga sebagai sebuah simbol peradaban.

Sedangkan, Dashcer (2000) mengungkapkan bahwa ibukota biasa diinterpretasikan sebagai seperangkat pemerintahan yang keberadaannya adalah hasil dari aktivitas politik. Dalam hal ini Dashcer (2000) juga mengungkapkan ada

dua tipe ibukota di dunia yakni ibukota yang terletak pada kota terbesar utama, dan ibukota yang terletak tidak di kota terbesar utama. Sejalan dengan Dasher, Traugott (1995) juga mendefinisikan ibukota sebagai seperangkat sistem kepemerintahan yang mengontrol wilayah secara langsung yang memiliki aturan tertentu. Spate (1942) juga mendefinisikan ibukota sebagai tempat dimana kekuasaan politik terkonsentrasi. Sedangkan Dijkink (2000) mendefinisikan ibukota adalah sebuah pusat dari berdirinya wilayah yang akan menjadi pusat kehidupan individu dalam mendefinisikan ruang perkotaan dan memiliki fungsi pemerintahan, sosial, dan dianggap pula sebagai sebuah simbol lingkungan wilayah utama.

Pusat pemerintahan didefinisikan sebagai tempat yang menjadi kedudukan utama pemerintahan (KBBI, 1994). Tidak seperti ibukota, penetapan pusat pemerintahan tidak lahir seiring dnegan lahirnya daerah secara administratif, dan tidak dilegalkan secara perundangan Nasional, namun istilah pusat pemerintahan ini lahir seiring dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah dan pemerintah daerah sebagai acuan banyak daerah untuk memindahkan salah satu fungsi, yakni fungsi kepemerintahan pada wilayah lain. Dalam fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pusat pemerintahan ialah salah satu fungsi wilayah yang terdapat pada sebuah ibukota. Secara sederhana, pusat pemerintahan didefinisikan sebagai wilayah sebagai sebuah fungsi, bukan sebuah teritorial yang bersifat tetap secara yuridis. Sayangnya, pemisahan pengertian pusat pemerintahan dan ibukota memang tidak diatur secara jelas pada perundangan di Indonesia, sehingga cukup membingungkan dalam melakukan pembatasan pengertian.

Fawcett dan Litt (1918) menyatakan bahwa pemindahan ibukota dipengaruhi oleh beberapa hal, dan politik merupakan salah satu faktor yang mendominasinya. Wusten (2000) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pembentukan sebuah ibukota berkaitan dengan kekuasaan politik dan kekuasaan sistem peemrintahan. Pada beberapa kasus seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, pemindahan ibukota ke lokasi baru dikarenakan untuk meletakkan ibukota pada lokasi strategis yang dapat diakses secara mudah oleh semua daerah federasi, dan untuk menghindari memberikan keuntungan yang lebih kepada salah satu daerah federasi terhadap posisi ibukota yang lama (Fawcett dan Litt 1918). Sedangkan Spate (1942) mengungkapkan di beberapa kasus di dunia faktor-faktor yang membentuk ibukota lebih dikarenakan oleh faktor pertimbangan politik dibandingkan oleh faktor pertimbangan ekonomi dan lokasi yang strategis, sehingga seiring dengan perkembangan wilayah kota, kompleksitas fungsi dalam ibukota mendesak pemerintah untuk memindahkan ibukota pada lokasi lainnya. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Dijkink (2000) bahwa dalam sejarah pembentukan ibukota di Benua Eropa merupakan bentuk intervensi dan bentuk batas politik.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan bukti empiris penelitian terdahulu, maka yang penting untuk dipahami bersama ialah batasan definisi dan pemahaman mengenai ibukota. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahpaham mengenai konteks pembahasan dalam penelitian. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, definisi Ibukota belum terdefinisi secara jelas dan masih banyak perbedaan dalam pendefinisiannya.

Begitupula dengan definisi pusat pemerintahan yang masih sangat minim dalam pendefinisiannya, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. Secara umum, pusat

pemerintahan dalam kajian ini didefinisikan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh Ibukota. Secara umum, pusat pemerintahan lebih melihat wilayah secara fungsional, bukan teritorial. Jadi, pemindahan pusat pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pemindahan salah satu fungsi Ibukota, dan bukan pemindahan secara teritorial.

Tabel 2.1 Definisi Ibukota dan Pusat Pemerintahan

Ibukota	Pusat Pemerintahan	Ibukota dalam Daerah Penelitian
1. Ibukota didefinisikan sebagai seperangkat pemerintahan yang merupakan hasil dari aktivitas politik (Dascher, 2000).	1. Pusat Pemerintahan ialah tempat kedudukan utama pemerintah (KBBI, 1994)	Ibukota dalam konteks daerah penelitian didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi pemerintahan, yang didalamnya memuat pusat kantor-kantor pemerintah yang dibangun secara terpadu, berbagai fasilitas dan utilitas penunjang, dan juga sistem, kegiatan, serta mobilitas yang berkaitan dengan aktivitas kepemerintahan.
2. Ibukota sebagai sistem kepemerintahan yang mengontrol wilayah (Traugott, 1995).		
3. Ibukota adalah pusat wilayah dan pusat individu dalam mendefinisikan ruang perkotaan yang memiliki fungsi pemerintahan, sosial, dan simbol lingkungan.		
4. Ibukota adalah simbol pusat sebuah wilayah (Wusten,2000)		
5. Ibukota adalah simbol berdirinya sebuah wilayah dan peradaban (Qi,2008)		
6. Ibukota adalah pusat administrasi yang memiliki banyak fungsi, fungsi pelayanan, agama, pemerintahan, dan militer (Wusten, 2000).		

7. Ibukota adalah wilayah yang memiliki fungsi yang lebih tinggi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang penentuannya menggunakan hukum kontinental		

Sumber: berbagai literatur

2.6.2. Faktor-Faktor Dalam Perkembangan Kota

Dalam perkembangan kota terdapat banyak faktor yang memengaruhinya, baik sosial, ekonomi, maupun geografi, yang seringkali sangat signifikan. Raharjo dalam Marangkup dan Eka (2006) mengungkapkan variabel-variabel yang memengaruhi perkembangan kota, yaitu:

1. Pendudk, keadaan penduduk, prose penduduk, lingkungan sosial penduduk.
2. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi.
3. Fungsi kawasan perkotaan.
4. Kelenkapan fasilitas sosial ekonomi yag merupakan faktor utama timbulnya perkembanan dan pertumbuhan pusat kota.
5. Kelegkapan sarana dan prasarana transportasi dengan tujuan peningkatan aksesibilitas penduduk ke segala arah.
6. Kesesuaian lahan.
7. Kemajuan dan peningkatan teknologi untuk mempercepat proses pusat kota menuju perubahan yang lebih maju.

Hendarto dalam Novita (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan kota didasarkan pada pengertian secara kuantitas, dengan indikasi berupa besaran faktor produksi yang dianut oleh sistem perekonomian kota tersebut. Sedangkan perkembangan kota yang didasarkan pada kualitas merupakan suatu proses menjadi keadaan yang lebih baik, denggan indikasi berupa peralihan struktur

kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder atau tersier. Kota akan bertumbuh dan berkembang melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam di kota yang bersangkutan. Pada umumya terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perkembangan kota, yaitu:

1. Faktor penduduk, berupa pertambahan penduduk yang disebabkan karena pertambahan alamiah maupun migrasi.
2. Faktor social dan ekonomi, berupa perkembangan perekonomian ataupun kegiatan usaha masyarakat
3. Faktor sosial budaya, berupa adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat sebagai akibat infiltrasi luar berupa komunikasi maupun sistem informasi.

Dalam menentukan perkembangan kota memang terdapat berbagai variabel yang diukur. Mengenai hal ini Campbell (2004) menentukan tiga faktor penting yang dapat membedakan perkembangan ibukota yaitu ukuran dan struktur pemerintahan, kondisi ekonomi sebuah negara, dan waktu dimana ibukota sudah bisa berdiri stabil relatif terhadap kondisi politik dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Penentuan faktor ini berguna agar penggunaan variabel yang terlalu banyak dapat dihindari, dan sebaliknya, tiga faktor tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sehingga dapat menentukan variabel-variabel baru yang dapat diukur untuk menentukan perkembangan sebuah kota ataupun ibukota.

Golany (1976) menyatakan ada lima kriteria dalam menentukan lokasi sebuah kota baru, yakni (1) kriteria fisik, (2) kriteria sosial dan ekonomi, (3) kriteria potensi sumberdaya lokal, (4) kriteria lingkungan, dan (5) kriteria politik.

Perencanaan harus memperhatikan kriteria fisik seperti topografi, tanah, penggunaan lahan, serta kerentanan bencana. Topografi sebuah wilayah dapat menentukan pola penggunaan lahan, bentuk kota, dan intensitas pembangunan. Jenis tanah dapat berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan kerentanan bencana, seperti kepekaan terhadap erosi, ketahanan terhadap konstruksi, dan manajemen jalan. Penggunaan lahan suatu wilayah dapat mempengaruhi luasan lahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kota baru.

Kriteria sosial ekonomi berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penting yang ada disekitar lokasi perencaan, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi, serta jarak terhadap fasilitas tersebut. Kedekatan terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat menjadi nilai lebih. Lokasi yang memiliki sumberdaya lokal yang melimpah, dapat menjadi lokasi kotabaru yang potensial dan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap wilayah sekitar. Perencanaan kota baru harus mempertimbangkan lingkungan lokasi dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Lingkungan yang masih alami dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta merupakan kawasan lindung tidak tepat dipilih sebagai lokasi kota baru. Hal ini dikarenakan pembangunan kota baru justru akan merusak sistem lingkungan yang ada. Isu politik dalam sebuah wilayah menjadi konsentrasi yang penting bagi para perencana. Perencana harus menginvestigasi kekuatan politik di lokasi dan disekitar lokasi. Perencana juga harus menginvestigasi struktur politik yang ada di lokasi yang direncanakan, hal ini akan berkaitan dengan kemampuan wilayah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Siong (2006), Putra jaya dipilih sebagai lokasi pusat pemerintahan Malaysia yang baru dikarenakan beberapa faktor, yakni: (1) ketersediaan lahan yang masih cukup dan kalkulasi biaya infrastruktur yang lebih

rasional, (2) lokasi strategis yang berada pada koridor pertumbuhan, (3) aksesibilitas yang baik dan jaringan transportasi, (4) jenis dan kerapatan vegetasi yang dapat mendukung kebijakan, (5) bentuk lahan, dan (6) dampak minimum terhadap masyarakat lokal. Syarif (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dan perkembangan sebuah kota, yakni faktor geografis, jenis tanah, ketersediaan air, spekulasi tanah, keberadaan fasilitas, aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, kebijakan perkotaan, pendapatan penduduk, dan keberadaan industri.

Ricks (1970) menjelaskan bahwa dalam memilih lokasi kota baru diperlukan beberapa pertimbangan, yakni harga lahan, aksesibilitas, dan tenaga kerja yang dimiliki. Ali (2010) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pusat pemerintahan, yakni : (1) letak geografis yang strategis dan berada pada dataran rendah (< 3%), (2) ketersediaan lahan yang cukup, (3) penggunaan lahan yang bukan lahan pertanian, (4) status lahan, (5) bukan daerah rawan bencana, (6) ketersediaan sumberdaya air yang memadai, (7) aksesibilitas yang baik, (8) jumlah penduduk, (9) kepadatan penduduk, (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama, etnis), dan (11) ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit, air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik).

Di Indonesia, lokasi ibukota ditetapkan oleh peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD, namun dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 mengatur pembentukan ibukota harus memperhatikan berbagai faktor, yakni tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, politik, dan budaya. Seiring dengan pemekaran wilayah, baik penggabungan wilayah maupaun pemisahan wilayah, pembentukan

ibukota baru menjadi hal yang penting sebagai pelengkap administrasi dalam legalitas kebijakan pemekaran wilayah. Untuk itulah pemerintah membuat aturan dalam kajian pembentukan ibukota.

2.6.3. Kebijakan Publik Perkotaan

Kebijakan merupakan sebuah konsep yang dapat mewadahi beberapa dimensi yang berbeda (Torjman, 2005). Lebih lanjut Torjman (2005) menjelaskan bahwa kebijakan publik perkotaan merupakan sebuah keputusan yang diambil secara sengaja sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Sebagai sebuah hal yang dapat mewadahi berbagai dimensi, kebijakan diharapkan dapat dapat diterima oleh seluruh penduduk perkotaan. Winarno (2002) mencoba menjelaskan berbagai definisi kebijakan publik dari beberapa ilmuan, yakni diantaranya ialah Dye (1975) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah semua semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, Friederich yang mengatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Selain itu, Winarno (2002) juga menjelaskan bahwa definisi kebijakan juga muncul dari Anderson yang mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah tindakan yang mempunyai maksud tertentu yang ditentukan oleh seorang atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah tertentu.

Nagel (1984) mencoba mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang didesain dari berbagai macam hal untuk melindungi lingkungan, kriminalitas, pengangguran, dan mengatasi berbagai permasalahan sosial lainnya. Santoso (1993 dalam Winarno 2002) menjelaskan bahwa terdapat dikotomi pemahaman terhadap kebijakan, pernyataan yang pertama menyebutkan

bahwa kebijakan publik adalah sebuah instruksi dari para pembuat keputusan yang memuat tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik juga mengandung serangkaian keputusan dan tindakan. Berdasarkan berbagai definisi yang telah diungakapkan, diketahui bahwa kebijakan dirumuskan dalam rangka penyelesaian permasalahan.

Secara umum, dibentuknya sebuah kebijakan perkotaan ialah untuk membuat kota berjalan lebih efektif dan efisien, serta membuat keadaan yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan (Linn, 1983). Tujuan lain dibuatnya kebijakan perkotaan ialah untuk mencegah agar kekayaan kota tidak hilang dan meningkatkan kualitas hidup kota, serta sebagai usaha untuk merancang, mengawasi, menata, mengatur pembangunan dan pengembangan kota (Heryanto,2011). Kebijakan perkotaan umumnya dibuat berdasarkan diagnosis permasalahan perkotaan yang terjadi (Linn, 1983). Pembuatan kebijakan sebagai sebuah solusi dari permasalahan ialah mencari alternatif yang terbaik atau solusi yang paling efektif dari berbagai pilihan yang ada (Simeon, 1976). Kebijakan perkotaan dibuat dan diimplementasikan oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan, kemampuan, dan pengaruh yang besar terhadap kelompok masyarakat (Northam, 1979). Dalam hal ini, pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan perkotaan. Kebijakan yang dibuat akan diimplementasikan pada satu wilayah atau satu lokasi yang memiliki permasalahan yang sama (Northam,1979). Adanya konsep penerapan/adaptasi tersebut, negara-negara berkembang cenderung melihat dari pengalaman negara-negara yang lebih maju dan sukses menerapkan kebijakan perkotaan sebelumnya. Namun tidak semua kebijakan di negara maju dapat diaplikasikan di

negara berkembang, sehingga dalam pemilihan kebijakan harus melihat latar belakang, karakteristik, potensi, dan permasalahan wilayah.

Secara konseptual, domain dari suatu kebijakan sangatlah luas, dan meliputi berbagai proses tahapan didalamnya, diantaranya yang dikemukakan oleh Dunn (1998 dalam Winarno 2002) yang membagi tahapan-tahapan kebijakan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Lebih lanjut Winarno (2002) jug menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik terdapat tiga pokok yang perlu untuk diperhatikan, yakni penjelasan kebijakan itu sendiri, sebab dan konsekuensi dari kebijakan yang diketahui bersarakan metodologi ilmiah, serta analisis pengembangan teori kebijakan, sehingga dapat diaplikasikan pada lingkungan yang berbeda.

Pada tahun 1960an, Issard (dalam Barlow 1981) memperluas teori lokasi klasik dengan memasukan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, dan menjadi bagian yang penting didalamnya. Murphy (1966 dalam Barlow 1981) juga menekankan bahwa ada elemen politik yang signifikan terhadap pembentukan struktur ruang perkotaan setelah dirinya melakukan sikusi dan melihat proses dalam administrasi politik. Lebih lanjut Barlow (1981) menjelaskan bahwa pada akhir tahun 1960 an politik menjadi bagian yang penting dalam pengambilan keputusan. Salah satunya terjadi di Kota Chicago yang menetapkan lokasi fasilitas publik berdasarkan unsur politik.

Salah satu kebijakan perkotaan Amerika Serikat yang masih dilakukan hingga saat ini ialah kebijakan perkotaan yang komprehensif dan memiliki konsep *partnership*, yang pertama kali dikemukakan oleh Jimmy Carter tahun 1978. Konsep kebijakan *partnership* dinilai lebih kooperatif dan dapat meningkatkan

hubungan kerja antara pemerintah dan swasta dalam sebuah program atau proyek, serta dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam membantu program yang ditujukan untuk mereka (Hartshorn, 1980). Lebih lanjut Hartshorn (1980) menjelaskan bahwa kebijakan yang dikemukakan oleh Carters ini disebuat juga dengan program kemandirian lingkungan dalam hal permukiman, sosial, kesehatan, transportasi, kriminal, taman, dan rekreasi. Untuk mejalankan kebijakan partnership ini, pemerintah Amerika Serikat membuat sembilan program yang akan dilaksakan secara bersama, yakni : 1) meningkatkan perencanaan lokal dan menejemen kapasitas, 2) meningkatkan kapasitas negara sebagai partner kota-kota di Amerika, 3) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan organisasi secara suka rela, 4) menyediakan layanan keringanan permasalahan keuangan kepada masyarakat kelas bawah, 5) mendorong investasi swasta dalam pembangunan masyarakat, 6) menyediakan kesempatan kerja kepada pengangguran dan masyarakat kelas bawah, 7) meningkatkan akses untuk memberi kesempatan kepada masyarakat korban diskriminasi sosial, 8) meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan, serta 9) meningkatkan kondisi lingkungan perkotaan, budaya, keindahan kehidupan perkotaan dan mengurangi *urban sprawl* (Hartshorn, 1980).

Lain halnya dengan Amerika Serikat, Jepang mengalami tantangn perkotaan dalam hal urbanisasi. Jepang dapat mengatasi permasalahan urbanisasi lebih sukses dibandingkan negara lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Permasalahan perkotaan di Jepang dapat diatasi dengan adanya inisiatif dari berbagai *stakeholder* yang berpartisipasi dalam proses pembangunan perkotaan dan perumusan kebijakan perkotaan (Zetter, 1986). Zetter (1986) terdapat beberapa tantangan kebijakan perkotaan di Jepang, yakni kebijakan

mengenai perumahan, kebijakan dalam penyedian infrastruktur, kebijakan mengenai kerentanan terhadap bencana, kebijakan mengenai harga lahan, kebijakan mengenai *urban sprawl*, kebijakan renovasi permukiman, partisipasi publik, dan *urban decline*.

2.6.4. Proses Dan Konflik

Rijanta (2006) menyebutkan bahwa sebagain besar justifikasi dalam pembentukan wilayah baru ialah percepatan pembangunan di daerah dengan menyediakan pelayanan yang lebih baik, meskipun diantara justifikasi tersebut terdapat kekecawaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan tersebut terkait dengan seringnya keputusan ditumpangi dengan ambisi sesorang atau sekelompok, ditambah isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan), bahkan permasalahan pembentukan wilayah baru di Indonesia setelah tahun 1998 juga semakin rumit seiring dengan semangat demokratisasi dan kebebasan berpendapat setiap masyarakat (Rijanta, 2006). Lebih lanjut Rijanta (2006) juga menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan wilayah baru sering kali muncul konflik antar pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat yang diwarnai kekerasan maupun tidak yang disebabkan oleh kompleksitas permasalahan dan juga ketidaksepahaman birokrasi dan normatif perencanaan diantara keduanya.

Pembentukan wilayah baru (pemekaran wilayah), pemindahan ibukota, maupun pemindahan pusat pemerintahan bukan menjadi fenomena perkotaan yang baru di Indonesia. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang direvisi pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membuat daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan

menyelenggarakan kepemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Adanya perundangan ini menjadi dasar bagi beberapa daerah di Indonesia untuk memindahkan ibukota maupun pusat pemerintahannya ke daerah lain yang lebih dengan alasan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah juga menguatkan fenomena pembentukan kota baru di Indonesia.

Beberapa kasus dalam pembentukan daerah baru, pemindahan ibukota maupun pusat pemerintahan di Indonesia juga melalui proses yang berbeda, dengan konflik maupun tanpa konflik, dan melalui intervensi politik maupun kajian akademis. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gottman (1969 dalam Barlow 1981) yang menyebutkan bahwa ekspansi perkotaan merupakan sebuah proses politik, sedangkan Eyre (1969 dalam Barlow 1981) menjelaskan bahwa dalam setiap proses politik yang terjadi, akan terdapat konflik batasan antar elemen di pemerintahan. Rein dan Rabinovits (1978 dalam Nakamura dan Smalwoods 1980) mengatakan bahwa dalam sebuah proses implementasi tidak hanya memiliki satu dimensi saja, melainkan proses transisi pada berbagai level yang membentuk sebuah sistem sirkular tertentu, yang didalamnya saling mengintervensi bagian satu sama lain. Intervensi ini seringkali menimbulkan konflik dalam proses implementasi kebijakan. Kasus pemekaran wilayah di Indonesia lainnya ialah pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Darmawan (2014) dalam penelitian tesisnya menyebutkan bahwa pembentukan Kabupaten Kolaka Timur ditengarai banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal dan pusat yang memiliki tujuan tertentu, meskipun juga

didorong oleh keinginan dari masyarakat untuk menjadi kabupaten mandiri. Kepentingan politik ini memiliki peran yang besar dalam pembentukan kabupaten, dimana para elit politik menjadi katalisator melalui hubungan relasi yang dimiliki dan bantuan dana yang diberikan. Namun, intervensi politik yang cukup besar dalam pembentukan kabupaten baru ini menimbulkan berbagai permasalahan di Kabupaten Kolaka Timur, salah satunya ialah permasalahan ekonomi wilayah, dimana pendapatan asli daerah masih rendah dan tidak berimbang dengan dana yang dikeluarkan. Sebenarnya, Kabupaten Kolaka Timur telah memenuhi beberapa aspek prasyarat dalam pemekaran wilayah, seperti faktor kependudukan, lokasi geografis, luas daerah, sosial budaya, sosial politik, dan potemsi daerah. Namun, dalam sektor kemampuan keuangan wilayah masih cukup rendah.

Salah satu kasus pemindahan pusat pemerintahan di Indonesia ialah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Revid (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia berdampak pada pemisahan Kota Pariaman menjadi sebuah kota administratif sendiri. Lepasnya Kota Pariaman dari Kabupaten Pariaman membawa dampak bagi Kabupaten Pariaman untuk merelokasi ibukota kabupaten yang semula berada di Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Revid (2010) menjelaskan bahwa proses pemindahan ibukota ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan melibatkan peran akademis dalam menentukan lokasi yang tepat sebagai ibukota baru. Berdasarkan kajian akademis terhadap studi kelayakan lokasi-lokasi yang memungkinkan, maka Nagari Palit Malintang dipilih sebagai lokasi ibukota Kabupaten Pariaman yang baru. Kajian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah, yang kemudian resmi memindahkan pusat

pemerintahannya ke Nagari Palit Malintang. Proses pemindahan ibukota ini tidak diwarnai oleh konflik dan berbagai permasalahan, bahkan mendapat dukungan oleh masyarakat sekitar lokasi pemindahan.

Contoh lain dalam relokasi ibukota ialah pemindahan ibukota administrasi Maluku Utara dari Kota Ternate ke Sofifi yang telah tercantum pada Undang-undang No 46 Tahun 1999. Namun sayangnya pemindahan ibukota tersebut mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muslihin (2008) menjelaskan bahwa keterlambatan pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, yakni faktor sosio kulural dan historis, ekonomi, dan faktor politik yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses implementasinya. Dilihat dari segi sosio kultural dan historis, pada proses penetapan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara tidak melibatkan masyarakat dan komunitas lokal serta berkaitan dengan sejarah perkembangan berdirinya empat kasultanan yang masing-masing memiliki batas teritorial kekuasaan tertentu, sehingga menimbulkan perebutan wilayah kekuasaan antara kasultanan Tidore dan Ternate. Konflik sosial yang terjadi yang melibatkan suku dan agama menglihkan perhatian pemerintah terhadap fokus pemindahan ibukota. Secara ekonomi, keterlambatan ini disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur penunjang di Sofifi, seperti transportasi, jaringan listrik, komunikasi, air, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan faktor politik yang mempengaruhi keterlambatan implementasi pemindahan ini merupakan intervensi yang cukup besar dari para pelaku politik, sehingga mengesankan pemindahan ibukota ke Sofifi dipengaruhi oleh faktor politik saja. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya konflik politik internal beberapa aparat birokrasi yang tidak menginginkan pemindahan ibukota ini, demi mempertahankan *status quo*.

Berdasarkan penelitian tersebut, intervensi politik masih menjadi kendali yang besar dalam perumusan dan proses implementasi kebijakan sebuah kota. Para pelaku politik masih memaksakan kehendak masing-masing demi mencapai tujuan tertentu dengan mengatasnamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian beberapa daerah juga telah mempertimbangkan aspek-aspek akademis dan mengikutsertakan akademisi dalam perumusan dan implementasi kebijakan wilayah.

Berdasarkan kajian-kajian terhadap penentuan pemilihan lokasi kota baru (*new town)/*ibukota baru/ pusat pemerintahan baru yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat sebuah peraturan perundangan yang telah ditetapkan di Indonesia mengenai lokasi ibukota baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah pasal 12 ayat 3, disebutkan bahwa

> "Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya."

Dan ditegaskan kembali pada Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota pasal 9 ayat 1, disebutkan bahwa

> "Persyaratan calon lokasi ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota mencakup a) kondisi geografis; b) kesesuaian dengan rencana tata ruang; c) ketersediaan lahan; d) sosial, budaya, dan sejarah; e) politik dan keamanan;

f) sarana dan prasarana; dan g) aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat"

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, serta hasil kajian pada beberapa penelitian dan literatur yang terkait terhadap fakor penentuan lokasi, dapat ditetapkan faktor apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2.2. Faktor-faktor penentu lokasi ibukota

Faktor	Parameter
Letak geografis	Jarak terhadap pusat pemerintahan lama
	Jarak terhadap kota sekitar
Kondisi Fisik	Kemiringan lereng
	Ketersediaan air bersih
	Kerentanan bencana
Ketersediaan Lahan	Status lahan
	Luas lahan
	Harga Lahan
	Penggunaan lahan
Historis	Sejarah pembentukan kota
	Sejarah karisidenan/kasultanan/kerajaan
Kebijakan	Rencana Tata Ruang
	Praktek perizinan
Politik dan keamanan	Kesepakatan masyarakat
	Visi Misi Kepala Daerah
Aksesibilitas	Sarana dan prasarana transportasi
	Jaringan jalan
Ketersediaan Sarana Prasarana	Fasilitas kesehatan
	Fasilitas ekonomi
	Fasilitas sosial
	Jaringan utilitas
Kependudukan	Jumlah penduduk
	Tingkat pertumbuhan penduduk
	Angkatan kerja
	Mata pencaharian penduduk
	Heterogenitas suku, agama, dan etnis

Sumber: berbagai kajian literatur

2.7 *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Thomas L. Saaty, Profesor pada Wharton School of Economics, Amerika serikat (1971-1915) mengembangkan suatualat ukur yang dinamakan AHP untuk membantu proses pengambilan keputusan. Penggambilan suatu keputusan di era

yang berkembang pesat dan dinamis seperti saat ini merupakan sebuah tantangan bagi lembaga, organisasi maupun individu. Pengambilan keputusan pada dasarnya melibatkan beberapa alternatif serta pilihan yang paling tepat untuk menentukan keputusan terhadap alternatif-alternatif tersebut. Setiap individu merupakan pengambil keputusan terhadap segala sesuatu yang dilakukan secara sadar atau tidak. Informasi yang dikumpulkan akan membantu untuk memahami kejadian, mengembangkan penilaian yang baik, yang selanjutnya untuk membuat keputusan tentang kejadian tersebut.

Hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia merupakan faktorl yang paling utama dalam AHP. Dengan adanya suatu hirarki, permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompoknya, kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. AHP. Kompleksitas suatu permasalahan dapat disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi dalam pengambilan keputusan serta belum tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan dapat dibilang tidak ada sama sekali. Adakalanya timbul suatu masalah dan harus mengambil keputusan secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi variasinya yang tergolong rumit sehingga data dari permasalahan tersebut tidak mungkin dapat dicatat secara numerik.

Metode AHP memiliki kelebihan dan kelemahan, sama seperti metode-metode lainnya yang sejenis. Adapun kelebihan metode AHP, yaitu 1) kesatuan, AHP menjadikan permasalahan yang tidak terstruktur menjadi sebuah model yang mudah dipahami dan flexible; 2) kompleks, AHP menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan sistem pendekatan dan pengintegrasian yang dilakukan secara deduktif; 3) Saling ketergantungan, AHP dapat diimplementasikan pada

elemen-elemen sistem yang tidak saling berhubungan dan tidak memerlukan hubungan linier; 4) Struktur Hirarki, AHP mewakili pemikiran alamiah yang mengelompokkan elemen sistem ke dalam level-level yang berbeda dimana masing-masing level berisikan elemen yang serupa; 5) Pengukuran, AHP merupakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan nilai prioritas masing-masing elemen kriteria; 6) Konsistensi, AHP mempertimbangkan suatu nilai konsistensi yang logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas; 7) Sintesis, AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan alternatif dalam hirarki untuk mengetahui seberapa diinginkannya masing-masing alternatif yang ada; 8) *Trade Off*, AHP mempertimbangkan prioritas relatif masing-masing faktor yang terdapat pada sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan; 9) Penilaian dan Konsensus, AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil dari sebuah penilaian yang berbeda; 10) Pengulangan Proses, AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Sedangkan kelemahan AHP adalah 1) Metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah; 2) Metode AHP ini hanya metode matematis. Tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. (Saaty, 1993)

2.8 *Stakeholder*

Stakeholder adalah sekelompok orang (Individu organisasi, asosiasi atau bagian terkecil lainnya) yang memiliki keterikatan didalam pengembangan wisata serta memberi kontribusi. Stakeholder merupakan individu-individu atau kelompok-kelompok yang ahli dan mempunyai andil di dalam suatu kebijakan (Dunn, 2003).

Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan pengaruh dari setiap *stakeholder.* Kepentingan (*importance*) menurut Reed et al (2009) adalah merujuk pada kebutuhan *stakeholder* dalam pencapaian *output* atau tujuan. Sedangkan pengaruh menurut Reed et al (2009) adalah merujuk pada kekuatan yang dimiliki *stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil keputusan. Menurut Al Hakim (2014) tingkat kepentingan terdiri dari:

1. Keterlibatan *stakeholde*r dalam pengelolaan suatu wilayah. Keterlibatan *stakeholder* yang dimaksud adalah suatu proses perkelanjutan *stakeholder* dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan.
2. Ketergantungan *stakeholder* dalam pengelolaan suatu wilayah. Ketergantungan *stakeholder* yang dimaksud adalah hubungan sosial dari setiap *stakeholder* terhadap kebutuhan adanya pengembangan suatu wilayah.
3. Peran masing-masing *stakeholder* terhadap pengelolaan suatu wilayah. Peran *stakeholder* yang dimaksud adalah tugas dari setiap *stakeholder* terhadap keberhasilan pengelolaan suatu wilayah.
4. Manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan suatu wilayah. Manfaat yang dimaksud adalah Keuntungan yang diterima *stakeholder* dengan adanya suatu lokasi perencanaan.

5. Kepentingan *stakeholder* terhadap pengelolaan suatu wilayah. Kepentingan yang dimaksud adalah relevansi atau dasar dari keterkaitan *stakeholder* terlibat dalam pengelolaan suatu wilayah.

Sedangkan, tingkat pengaruh terdiri dari:

1. Instrumen dan sumber kekuatan (*power*) yang dimiliki masing-masing *stakeholder*. Sumber kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan atau kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi kebijakan atau kelembagaan yang berpangkal pada kontrol keputusan dengan efek positif atau negatif.
2. Posisi derajat *stakeholder* dalam pembuatan keputusan. Posisi derajat *stakeholder* yang dimaksud adalah tingkatan dimana *stakeholder* dapat membujuk atau memaksa orang lain untuk membuat keputusan, serta mengikuti rangkaian tindakan tertentu.
3. Dukungan SDM terhadap pengelolaan suatu wilayah. Dukungan SDM yang dimaksud adalah potensi yang dimiliki setiap *stakeholder* untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan atau karakteristik tertentu yang spesifik sesuai dengan konteks dan lokasinya, seperti pengetahuan yang dimiliki *stakeholder*.
4. Kemampuan pendanaan dan manajemen terhadap pengelolaan suatu wilayah. kemampuan pendanaan yang dimaksud adalah posisi *stakeholder* dalam mendukung pendanaan dan penetapan anggaran dalam pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto
5. Interaksi dengan *stakeholder* yang lain. Interaksi dengan *stakeholder* lain dilihat dari hubungan interaktif dengan *stakeholder* lain yang berkaitan dengan Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh setiap stakeholder maka stakeholder dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (Reed et al, 2009):

1. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest yang tingi tetapi memiliki pengaruh (power) yang rendah diklasifikasi sebagai subyek (subject).
2. Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players).
3. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai pengikut lain (Crowd) atau disebut juga dengan penonton (*spectator*)
4. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (Contest setters) disebut juga dengan aktor (*actor*).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dimana masalah yang ada adalah bentuk penyelewengan terhadap adanya aturan dengan pelaksanaan, teori dengan prakteknya, perencanaan dengan pelaksanaan, dan lain-lain (Sugiyono, 2012, h.29).

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan pengukuran cermat atau fenomena sosial tertentu yang memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep dan menghimpun data namun tanpa melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2011).

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk melakukan uji teori-teori tertentu dengan cara melakukan penelitian terkait hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang sudah ditentukan diukur menggunakan instrumen-instrumen penelitian sehingga data berupa angka dapat dilakukan analisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Metode penelitian berupa “metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandasi oleh filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono, 2012, h.11).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukann pengembangan konsep dengan cara/tahapan pengumpulan fakta-fakta untuk menjawab

permasalahan yang sudah ada dengan penggunaan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Penelitian ini mengggunakan kuisioner yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi fakta dari responden sebagai bahan identifikasi faktor-faktor penentu dalam pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun 2011). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012, h.120) sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik suatu populasi. Bila populasi berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari serta memahami semua karakter populasi karena dana, tenaga serta waktu yang terbatas, sehingga peneliti juga dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Hasil Kesimpulan yang diperoleh dari sampel tersebut dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Oleh karena itu pengambilan sampel dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Pengambilan sampel yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik penentuan sampel yang termasuk ke dalam jenis non-probability sampel yang artinya adalah sampel dengan estimasi mendapat pembenaran dari hipotesis pada berbagai bidang daripada jumlah populasi nyata. *Purposive sampling* sama dengan

judgement sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan kebijakan peneliti, penentuan kriteria pemilihan sampel ditetapkan sesuai target dari informan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sari, 2013) atau dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Penggunaan teknik ini dilakukan disebabkan karena responden pada metode AHP adalah *expertise*/pakar, sehingga dalam penelitian ini dipilih responden yang terlibat langsung dalam perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto serta orang-orang yang memiki kompetensi mengenai pengembangan wilayah dan perencanaan kota.

Penentuan jumlah *expert* yang disyaratkan sebagai responden untuk memberikan penilaian pada kuisioner AHP sebenarnya sangat relatif. Satu orang yang benar-benar menguasai permasalahan dimungkinkan memberikan hasil yang lebih konsisten dan baik dibandingkan oleh penilaian banyak responden yang tidak terlalu memahami permasalahan. Namun, apabila respondennya terlalu sedikit, dan apabila penilaian yang diberikan bias, maka hasil analisis secara keseluruhan akan menjadi kurang baik. Untuk menghindari hal tersebut, maka *exper*t yang dipilih jumlahnya tidak terlalu sedikit, sehingga apabila ada penilaian yang agak janggal dapat dinetralkan dengan penilaian rata-rata sejumlah *expert*. Adapun responden tersebut berasal dari:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Kepala Sub Bidang Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3. Kepala Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

4. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
6. Wakil Masyarakat Kabupaten Mojokerto
7. Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
8. Konsultan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Provinsi Jawa Timur)

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah pelaksanaan penelitian. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2006, h.128). berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tersebut maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mojokerto.

3.4 Konsep dan Variabel Penelitian

Setiap penelitian kuantitatif dimulai dengan menjelaskan konsep penelitian yang digunakan, karena konsep merupakan kerangka acuan bagi peneliti dalam mendesain instrumen penelitian sehingga mempermudah pemahaman bagi orang yang membaca terkait dengan pengertian variabel, indikator, parameter, maupun skala pengukuran yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya. Konsep dibangun

dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan di teliti (Bungin, 2009, h.57).

Menurut Sugiyono (2012, h.64) variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu atribut atau nilai atau sifat dari orang, kegiatan atau obyek yang memiliki ragam tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya yang dapat diubah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis maka variable penelitian perlu dijelaskan dan ditentukan terlebih dahulu. Penentuan variabel penelitian pada penelitian ini terdiri dari *independent variable atau* variabel bebas, serta *dependent variable* atau variabel tergantung maupun variabel kontrol (*intervening variable*) (Bungin, 2009, h.93). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 9 (sembilan) variabel, yaitu Letak geografis, Kondisi Fisik, Aksesibilitas, Ketersediaan Lahan, Kependudukan, Ketersediaan Sarana Prasarana, Kebijakan, Politik dan keamanan, Historis.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Tujuan Penelitian	Variabel	Parameter	Data Yang diperlukan
1. Mengidentifikasi prioritas kriteria dalam penentuan lokasi ibukota di Kabupaten Mojokerto	Letak geografis	Jarak terhadap pusat pemerintahan lama	• Penilaian tingkat kepentingan antara variabel dan sub variabel yang terbentuk berkaitan dengan penentuan lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto
		Jarak terhadap pusat provinsi	
	Kondisi Fisik	Kemiringan lereng	
		Ketersediaan air bersih	
		Kerentanan bencana	
	Ketersediaan Lahan	Status lahan	
		Luas lahan	
		Harga Lahan	
		Penggunaan lahan	
	Historis	Sejarah pembentukan kota	
		Sejarah karisidenan / kasultanan / kerajaan	
	Kebijakan	Rencana Tata Ruang	
		Prosedur perizinan	
		Kesepakatan masyarakat	

	Politik dan keamanan	Visi Misi Kepala Daerah	
	Aksesibilitas	Sarana dan prasarana transportasi	
		Jaringan jalan	
	Ketersediaan Sarana Prasarana	Fasilitas kesehatan	
		Fasilitas ekonomi	
		Fasilitas sosial	
		Jaringan utilitas	
	Kependudukan	Jumlah penduduk	
		Tingkat pertumbuhan penduduk	
		Angkatan kerja	
		Mata pencaharian penduduk	
		Heterogenitas suku, agama, dan etnis	
2. Menetapkan lokasi yang terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto	Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota	Kecamatan Terpilih	• Hasil analisis *AHP* berupa bobot pada masing-masing kriteria

3.5 Sumber dan Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

1) Kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data berupa pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Kuisioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup, yang diberikan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2012, h.192-193).
2) Teknik Dokumentasi, dokumentasi artinya mengumpulkan data dengan cara mencatat ulang atau mendokumentasikan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain atau suatu badan (Hakim, 2004, h. 36). Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pendukung

untuk sempurnanya penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada dokumen-dokumen tercatat yang ada pada lokasi penelitian.

3) Wawancara, suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Tujuan menggunakan teknik wawancara yaitu penggalian informasi data yang lebih luas sesuai dengan penelitian.

3.6 Metode Analisa Data

3.6.1 *Analytical Hierarchy Process*

Pengambilan keputusan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan pada suatu permasalahan sehari-hari, seringkali setiap pengambil keputusan dihadapkan pada dua atau bahkan lebih suatu pilihan, baik pilihan yang mudah maupun pilihan yang sulit. Proses pengambilan keputusan pada suatu negara/perusahaan/organisasi akan menjadi sangat sulit apabila hanya mengandalkan intuisi, sehingga keputusan harus dilakukan melalui suatu proses tertentu. *Analytical Hierarchy Process (AHP*) merupakan model pengambilan keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. AHP didesain dalam rangka menangkap persepsi orang secara rasional yang terkait dengan permasalahan tertentu melalui sebuah tahapan yang dirancang sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai alternatif. penyusunan atau pemilihan prioritas dilakukan melalui suatu prosedur yang terstruktur dan logis. Penyusunan strategi dilakukan dengan memilih ahli-ahli yang berpengalaman dan mampu mewakili sesuai dengan alternatif yang akan disusun prioritasnya (Saaty, 1993). Sehingga, model AHP diharapkan dapat membantu

mempermudah dalam pemecahan persoalan yang kompleks dengan cara menyusun hirarki berbagai kriteria, yang dinilai dan disusun secara subjektif oleh pakar atau pihak yang terkait serta berkepentingan yang digunakan untuk memutuskan berbagai pertimbangan dalam rangka memperoleh bobot atau prioritas (kesimpulan). AHP teerbukti merupakan metode yang dapat diandalkan, karena didalam AHP prioritas yang disusun dihasilkan dari berbagai pilihan yang bias berupa kriteria yang telah di strukturkan terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas yang dihasilkan didasarkan pada suatu proses yang terstruktur.

Adapun urutan pelaksanaan dalam metode AHP adalah sebagai berikut:

1) Mengindentifikasi masalah serta menentukan solusi yang diinginkan, dengan cara diskusi dengan pakar-pakar yang mengetahui permasalahan serta didukung dengan kajian referensi hingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2) Menyusun suatu struktur hirarki yang dimulai dari tujuan umum, sub-tujuan, kriteria hingga penentuan sejumlah alternatif, berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya penentuan kriteria dan alternatif akan diperoleh dari hasil observasi dan hasil diskusi dengan pakar.
3) Menyebarkan kuesioner terkait elemen-elemen terkait permasalahan yang dibahas kepada pakar-pakar untuk penentuan pengaruh masing-masing elemen terhadap masing-masing aspek atau kriteria dengan membuat matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Pengisian matriks perbandingan berpasangan diakukan dengan menggunakan bilangan/skala yang berbeda yang mengambarkan kepentingan suatu elemen dibanding elemen yang lain.

4) Menyusun matrik pendapat individu dari para pakar dan gabungan dari hasil rata-rata yang diperoleh dari pakar yang kemudian diolah dengan bantuan expert choice versi 9.0. Jika nilai konsistensinya > 0,1 maka hasil jawaban dianggap tidak konsisten dan jika nilai konsistensinya < 0,1 maka hasil jawaban dianggap konsisten.
5) Langkah terakhir adalah menggunakan prioritas kriteria dan alternatif yang telah didapatkan tersebut digunakan untuk menyusun strategi.

3.6.1.1 Prinsip Penyusunan Hirarki

Prinsip dasar dari penyusunan hirarki adalah pemecahan suatu sistem yang kompleks menjadi berbagai elemen yang merupakan elemen pokoknya dan menyusunnya menjadi sebuah hirarki. Terdapat dua macam hirarki, yaitu:

a) Hirarki struktural, sistem yang kompleks disusun kedalam komponen-komponen pokoknya yang digambarkan dalam urutan menurun menurut sifat strukturalnya, misalnya: ukuran, bangun, warna, umur, dan sebagainya.
b) Hirarki fungsional menguraikan sistem yang merupakan system kompleks menjadi elemen-elemen pokoknya menurut hubungan esensialnya (Saaty, 1993).

Hirarki yang akan disusun dalam penelitian ini merupakan hirarki fungsional karena tujuan yang diinginkan terdiri dari elemen-elemen yang saling memiliki hubungan esensial. Menurut Saaty (1993) setiap set elemen dalam hirarki fungsional menduduki satu tingkat hirarki. Tingkat puncak disebut fokus/goal, terdiri atas satu elemen yang merupakan sasaran keseluruhan yang sifatnya luas.

Dalam penelitian ini terdapat tiga hirarki dengan goal yaitu Penetuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan prioritas kriteria lokasi. Tingkat-

tingkat berikutnya masing-masing dapat memiliki beberapa elemen. Elemen-elemen dalam setiap tingkat harus dari orde (derajat) yang sama, karena elemen-elemen dalam tiap tingkat tersebut akan dibandingkan satu dengan lainnya terhadap suatu kriteria yang berada ditingkat atas berikutnya (Saaty,1993). Kriteria-kriteria dari masing-masing hirarki dalam penelitian ini sesuai dengan gambar 3.1.

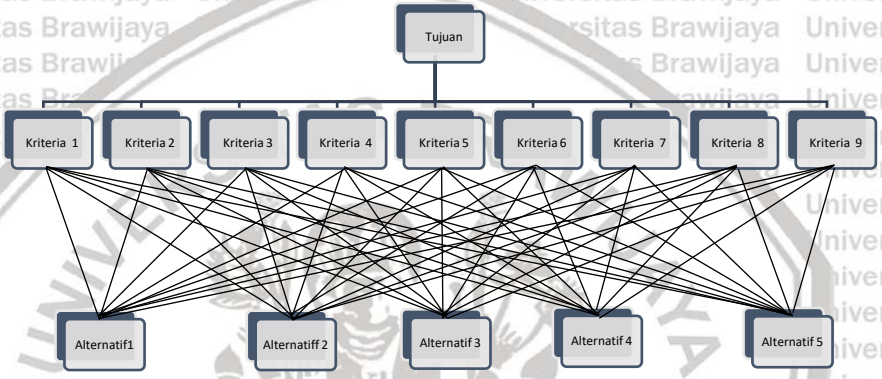

Gambar 3.1 Struktur Hirarki pada **Analytical Hierarchy Process**

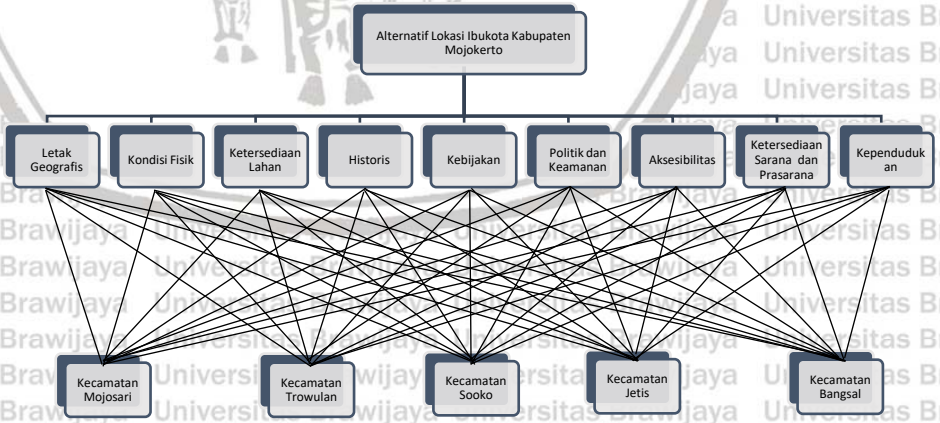

Gambar 3.2 Struktur Hirarki pada Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto

3.6.1.2 Validitas dan Reliabilitas

Menurut Syaifullah (2010) metode AHP memiliki kelemahan, salah satunya adalah sebuah metode matematis yang tidak terdapat proses pengujian secara statistik sehingga tidak diketahui batas kepercayaan dari kebenaran model yang telah terbentuk. Metode AHP mengukur rasio konsistensi dengan melihat hasil dari index konsistensi. Nilai Konsistensi yang diharapkan adalah yang nilai mendekati sempurna agar bisa menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Untuk mencapai dan merumuskan hasil keputusan yang sempurna, rasio konsistensi harus bernilai kurang dari atau sama dengan 10 %.

Indikator terhadap konsistensi AHP diukur berdasarkan *Consistensy Index (CI)* (Saaty, 1993). Berikut rumus untuk pengukuran *Consistensy Index (CI)* :

CI = (λ maks -n)/(n-1).

λ maks = eigen value maksimum

n = ukuran matriks.

Selanjutnya AHP mengukur seluruh konsistensi penilaiaan dengan menggunakan hasil dari *Consistency Ratio* (CR), dengan rumusan sebagai berikut:

$$CR = \frac{CI}{Ranidom}$$

Penentuan nilai tingkat konsistensi sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas sehingga bisa didapatkan hasil kesimpulan yang sah. Nilai CR tidak diperbolehkan lebih dari 10 %. Jika tidak, berarti penilaian yang telah di buat dimungkinkan telah dilakukan secara random sehingga perlu direvisi.

Tabel 3.2 Random Consistency Index (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51

Sumber : Saaty, 1993.

3.6.2 Pengolahan Data

Pengolahan data metode AHP dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice*.

Secara garis besar proses pengolahan data dengan menggunakan metode AHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemecahan Masalah (Dekomposisi Masalah)

   Dekomposisi masalah merupakan langkah ketika goal (tujuan) sudah ditentukan yang kemudian diuraikan secara sistematis pada struktur yang menyusunn rangkaian sistem hingga tujuan tersebut dapat dicapai secara rasional. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa suatu goal (tujuan) yang utuh, didekomposisi ke dalam unsur penyusunannya. Jika unsur tersebut adalah kriteria yang dipilih seharusnya meliputi semua unsur penting yang terkait dengan *output* yang ingin dicapai. Namun, peneliti harus mempertimbangkan sehingga kriteria yang dipilih benar-benar memiliki arti terhadap pengambilan keputusan. Jadi, walaupun kriteria pilihannya hanya sedikit tetapi mempunyai arti yang significant terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jika kriteria sudah ditetapkan maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan alternatif atau pilihan-pilihan dalam penyelesaian masalah.

2. Pembobotan dengan membandingkan variabel-variabel

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah tahap dekomposisi masalah adalah melakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan). Langkah ini dilakukan pada masing-masing hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Dapat dilihat pada contoh gambar 3.3, perbandingan dilakukan pada hirarki III yaitu antara alternatif serta pada hirarki II yaitu antara kriteria.

Tujuan penilaian atau pembobotan pada hirarki III adalah membandingkan nilai atauu karakter pilihan berdasarkan setiap kriteria yang ada. Sebagai contoh antara pilihan 1 dan pilihan 2 pada kriteria 1, yang lebih penting adalah pilihan 1. Atau pada pilihan 1 dan pilihan 3, yang lebih penting adalah pilihan 3. Langkah tersebut diulangi pada setiap pilihan dengan membandingkan secara satu persatu semua pilihan atau secara berpasangan. Hasilnya adalah berupa nilai/bobot masing-masing alternative yang tergambarkan karakternya

Penilaian berupa proses pembobotan yang dilakukan pada Hierarki II, dimaksudkan untuk memperbandingkan nilai masing-masing kriteria dalam rangka mencapai tujuan. Pembobotan tingkat kepentingan tiap-tiap kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan diperoleh dari langkah perbandingan yang telah dilakukan

Tata cara penilaian perbandingan berpasangan dalam metode *Analysis Hierarchi Process* didasarkan pada skor penilaian Thomas L Saaty sebagai perumus metode AHP, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Banding Berpasangan

Tingkat Kepercayaan	Definisi	Keterangan
1	Sama penting	Kedua elemen memberikan nilai kontribusi yang sama terhadap tujuan

Tingkat Kepercayaan	Definisi	Keterangan
3	Suatu elemen sedikit lebih penting dari lainnya.	Pengalaman atau penilaian sedikit memihak pada salah satu elemen.
5	Suatu elemen sesungguhnya lebih penting dari lainnya.	Pengalaman atau penilaian kuat memihak pada salah satu elemen.
7	Suatu elemen betul-betul lebih penting dari lainnya.	Suatu elemen betul-betul lebih disukai dan dalam praktek lebih dominan dari yang lain.
9	Suatu elemen mutlak lebih penting dari lainnya	Terbukti memang suatu elemen jauh lebih disukai bila diperlukan komposisi di dua tingkat kepentingan.
S2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua nilai berurutan antara dua elemen.	Nilai ini diberikan bila diperlukan komposisi di dua tingkat kepentingan.
J = 1/i	Nilai kebalikan	Jika suatu aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan aktivitas j maka mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i

Sumber: Saaty, 1993.

Penggunaan skala digunakan untuk mendifinisikan dan memberikan penjelasan dari nilai 1 sampai dengan 9 yang ditetapkan untuk pertimbangan dalam membandingkan elemen yang sejenis di setiap tingkat hirarki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya. Pengalaman telah membuktikan bahwa skala dengan sembilan satuan dapat diterima dan mencerminkan sampai mana derajat dapat dikatakan mampu membedakan intensitas hubungan diantara elemen. Apabila pemakai skala itu dalam konteks sosial, psikologi atau politis, utarakan terlebih dahulu pertimbangan verbalnya, lalu terjemahkan ini menjadi nilai-nilai numerik.

Bila membandingkan satu elemen dalam matriks dengan elemen itu sendiri, misalkan A1 dengan A1 maka perbandingan tersebut diberi nilai bilangan 1 karena

elemen yang sama memberikan nilai skala 1 (sama pentingnya). Selalu membandingkan elemen pertama dari suatu pasangan (elemen di kolom sebelah kiri matriks) dengan elemen kedua (elemen di baris puncak matriks) dan tentukan nilai numeriknya dari skala dalam tabel. Nilai kebalikannya digunakan untuk pembandingan berpasangan elemen kedua terhadap elemen pertama tadi.

Untuk memperoleh peringkat prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan, haruslah menyatukan dan mensintesis pertimbangan yang dibuat dalam melakukan perbandingan berpasangan, yaitu harus melakukan pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang dapat menunjukkan prioritas dari setiap elemen.

3. Penyusunan matriks dan uji consistensi

Apabila proses pembobotan atau proses pengisian kuisioner telah dilaksanakan dan diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan yang berfungsi untuk melakukan tahap normalisasi nilai atau bobot tingkat kepentingan pada setiap elemen pada hirarkinya masing-masing.

Pada tahapan normalisasi ini analisisnya dapat dilakukan secara manual seperti dengan program excel maupun dengan penggunaan program komputer Expert Choice.

Apabila dilakukan secara manual , maka nilai-nilai yang diperoleh selanjutnya perlu disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan yang ditulis sama seperti matriks yang digunakan pada kuisioner matriks yang telah dijelaskan diatas. Semua kotak harus diisi saat menyusun matriks data secara manual.

Langkah pertama: yaitu dengan menyatukan pendapat pakar dari beberapa kuisioner, dengan menggunakan persamaan rata-rata geometri:

$$GM = \sqrt[n]{(X_1)(X_2) \ldots . (X_n)}$$

Dimana:

GM = Geometric Mean
X1 = Pakar ke-1
X2 = Pakar ke-2
Xn = Pakar ke-n

Langkah kedua: penyusunan matriks perbandingan, berikut penjelasan untuk langkah kedua:

Kriteria/ Alternatif	1	2	3	N
1	1	GM_{12}	GM_{13}	GM_{1n}
2	GM_{21}	1	GM_{23}	GM_{2n}
3	GM_{31}	GM_{32}	1	GM_{3n}
n	GM_{n1}	GM_{n2}	GM_{n3}	1

Terdapat tahapan yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam tahapan iterasi yang bertujuan untuk menetapkan prioritas pada pilihan alternatif atau menetapkan tingkat kepentingan kriteria yaitu tahapan berupa uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan terhadap masing-masing kuisioner/pakar yang memberikan nilai atau memberikan pembobotan. Apabila syarat konsistensi tidak dapat dipenuhi oleh kuisioner atau pakar maka hasil kuisioner tersebut dapat dianulir atau dipending untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Prinsip dasar atau logika pada uji konsistensi ini adalah apabila A lebih penting dari B, kemudian B lebih penting dari C, maka tidak mungkin C lebih penting dari A. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai adalah *Consistency Ratio* (CR) yang diperoleh dari perbandingan antara *Consistency Index* (CI) dengan *Ratio Index* (RI)

Ratio Indeks (RI) yang umumnya digunakan pada setiap ordo matriks adalah sebagai berikut:

Urutan Matriks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Langkah ketiga: uji konsistensi harus terlebih dahulu dilakukan dengan cara menyusun tingkat kepentingan relatif pada masing-masing kriteria (alternative) yang disebut *normalized relative weight* atau bobot relatif ternormalisasi. Normalisasi Bobot relatif adalah bobot nilai relatif untuk masing-masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah masing-masing elemen:

Kriteria/ Alternatif	1	2	3	N
1	1	GM_{12}	GM_{13}	GM_{1n}
2	GM_{21}	1	GM_{23}	GM_{2n}
3	GM_{31}	GM_{32}	1	GM_{3n}
n	GM_{n1}	GM_{n2}	GM_{n3}	1
∑	$GM_{11\text{-}n1}$	$GM_{12\text{-}n2}$	$GM_{13\text{-}n3}$	$GM_{1n\text{-}ni}$

Maka bobot relatif ternormalisasi adalah:

Kriteria/ Alternatif	1	2	3	N
1	$1/ GM_{11\text{-}n1}$	$GM_{12}/ GM_{12\text{-}n2}$	$GM_{13}/GM_{13\text{-}n3}$	$GM_{1n}/ GM_{13\text{-}n3}$
2	$GM_{21}/ GM_{11\text{-}n1}$	$1/GM_{12\text{-}n2}$	$GM_{23}/ GM_{13\text{-}n3}$	$GM_{2n}/ GM_{13\text{-}n3}$
3	$GM_{31}/ GM_{11\text{-}n1}$	$GM_{32}/ GM_{12\text{-}n2}$	$1\ GM_{13\text{-}n3}$	$GM_{3n}/ GM_{13\text{-}n3}$
n	$GM_{n1}/ GM_{11\text{-}n1}$	$GM_{n2}/ GM_{12\text{-}n2}$	$GM_{n3}/ GM_{13\text{-}n3}$	$1\ GM_{13\text{-}n3}$

Langkah Selanjutnya dapat yaitu menghitung **Eigen faktor** yang merupakan hasil normalisasi dengan cara merata-rata jumlah tiap baris pada matriks.

Kriteria/ Alternatif	1	2	3	N	Eigen Faktor Utama
1	$1/ GM_{11-n1}$	GM_{12}/ GM_{12-n2}	GM_{13}/GM_{13-n3}	GM_{1n}/ GM_{13-n3}	Rerata row1/4 ($\dot{X}_1$)
2	GM_{21}/ GM_{11-n1}	$1/GM_{12-n2}$	GM_{23}/ GM_{13-n3}	GM_{2n}/ GM_{13-n3}	Rerata-row2/4 ($\dot{X}_2$)
3	GM_{31}/ GM_{11-n1}	GM_{32}/ GM_{12-n2}	$1\ GM_{13-n3}$	GM_{3n}/ GM_{13-n3}	Rerata-row3/4 ($\dot{X}_3$)
n	GM_{n1}/ GM_{11-n1}	GM_{n2}/ GM_{12-n2}	GM_{n3}/ GM_{13-n3}	$1\ GM_{13-n3}$	Rerata-rown/4 ($\dot{X}_n$)

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai CI (*Consistency Index*). Langkah ini dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda\, maksimum - n}{n-1}$$

Keterangan :

CI : indeks konsistensi

Lamda maks : nilai eigen terbesar matriks ber ordo n

Nilai eigen terbesar yaitu jumlah hasil kali perkalian antara jumlah kolom dengan eigen vaktor utama. Lamda maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\lambda maksimum = \left(\sum \mathrm{GM_{11-n1}} \times \bar{X}1\right) + \cdots + \left(\sum \mathrm{GM_{1n-ni}} \times \bar{X}n\right)$$

Setelah diperoleh nilai *lambda* maksismum selanjutnya dapat ditentukan hasil nilai CI. Apabila hasil nilai CI adalah nol (0) maka matriks dianggap konsisten.

Apabila dihasilkan nilai CI lebih besar dari 0 (CI>0), maka diperlukan uji batas ketidak konsistenan yang diukur dengan menggunakan Nilai indeks CR atau *Consistency Ratio*, atau dengan cara menghitung perbandingan antara CI dan RI:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai RI harus sesuai dengan ordo n matriks, dimana CR matriks nilainya harus lebih kecil dari 10% (0,1) dimana nilai tersebut artinya ketidak konsistenan pendapat masing-masing pakar dianggap masih dapat diterima.

4. Penetapan prioritas tiap hierakhi

Penetapan prioritas pada tiap-tiap hierarki akan dilakukan melalui proses Iterasi atau perkalian matriks. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengubah bentuk nilai-nilai pembobotan kedalam bentuk desimal.

Salah satu contoh data hasil penilaian seorang pakar pada suatu penelitian dengan menggunakan langkah-langkah AHP dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tahap pertama adalah membuat data matriks dari kuisioner tiap pakar

	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Kekuatan	1/1	1/2	3/1	4/1
Kelemahan	2/1	1/1	1/3	3/1
Peluang	1/3	3/1	1/1	2/3
Ancaman	1/4	1/3	3/2	1/1

b. Tahap kedua adalah mengubah Data Matriks yang semulanya berbentuk fraksi menjadi bentuk desimal yang disebut sebagai Matriks 1

	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Kekuatan	1.00	0.50	3.00	4.00
Kelemahan	2.00	1.00	0.33	3.00
Peluang	0.33	3.00	1.00	0.67
Ancaman	0.25	3.00	1.50	1.00

c. Tahap ketiga adalah mengkuadratkan matriks 1 yaitu jumlah baris dikalikan jumlah kolom yang disebut sebagai Iterasi I

	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Kekuatan	1.00	0.50	3.00	4.00
Kelemahan	2.00	1.00	0.33	3.00
Peluang	0.33	3.00	1.00	0.67
Ancaman	0.25	3.00	1.50	1.00

(x)

	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Kekuatan	1.00	0.50	3.00	4.00
Kelemahan	2.00	1.00	0.33	3.00
Peluang	0.33	3.00	1.00	0.67
Ancaman	0.25	3.00	1.50	1.00

(1.00*1.00) + (0.05*2.00) + (3.00*0.33) + (4.00*0.25) = 3,99 dst...

3,99	22,00	12,17	11,51
4,86	11,99	11,16	11,16
6,83	8,18	3,99	11,66
7,00	10,63	4,74	12,01

Matriks 2

d. Tahap keempat adalah menjumlahkan angka dalam matriks berdasarkan barisnya

3,99	+	22,00	+	12,17	+	11,51	49,67	0,32
4,86	+	11,99	+	11,16	+	11,16	39,17	0,25
6,83	+	8,18	+	3,99	+	11,66	30,65	0,20
7,00	+	10,63	+	4,74	+	12,01	34,37	0,22
							153,85	**1,00**

e. Tahap kelima adalah mengolah bentuk Matriks 2 sama seperti pengolahan Matriks 1 yang disebut Iterasi II, yang dilanjutkan dengan menjumlahkan hasil perkalian silang matriks berdasarkan baris

286,38	+	573,30	+	397,09	+	571,47	1828,25	0,3169
231,90	+	460,46	+	290,29	+	453,84	1436,49	0,2490
175,73	+	404,69	+	245,44	+	356,26	1182,12	0,2049
195,87	+	447,59	+	279,46	+	398,48	1321,40	0,2291
							5768,26	1,00

f. Tahap keenam menghitung selisih antara vektor Matriks 1 dan 2 dalam Iterasi II

0,3228	-	**0,3169**	=	**0,0059**
0,2546	-	**0,2490**	=	**0,0056**
0,1992	-	**0,2049**	=	**-0,0057**
0,2234	-	**0,2291**	=	**-0,0057**

g. Iterasi dilakukan kembali untuk Matriks 3. Langkah ini kemudian diulang, sampai tidak adanya perubahan lagi pada nilai selisih antar iterasi (=0). Nilai iterasi yang diperoleh tersebut selanjutnya disusun menjadi urutan prioritas sebagai berikut

Kekuatan	0,3227	=	Prioritas utama
Kelemahan	0,2546	=	Prioritas kedua
Peluang	0,1991	=	Prioritas terakhir
Ancaman	0,2228	=	Prioritas ketiga

h. Demikian seterusnya sama seperti Langkah-langkah diatas yaitu sampai pada tingkatan hierarki selanjutnya atau pilihan-pilihan alternatif. Pembobotan dengan menggunakan bantuan program komputer Expert Choice lebih memudahkan dalam penglahan data dibandingkan cara manual

5. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada langkah manual maupun bantuan expert choice dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai/ bobot total yang merupakan nilai sensitivitas dari masing-masing elemen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Letak Geografis

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto juga merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yaitu "Gerbangkertasusila" (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan).

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Kecamatan Sooko, Gedeg, Jetis, Kemlagi, dan Dawarblandong.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan

Sebelah barat : Kabupaten Jombang

Sebelah selatan : Kabupaten Malang Kota Batu

Kabupaten Mojokerto mengelilingi Kota Mojokerto.

Pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto sebelumnya berada di Kota Mojokerto. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi serta pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga perlu adanya penentuan altenatif lokasi ibu kota di Kabupaten Mojokerto. Adapun beberapa kecamatan yang menjadi alternatif yaitu Kecamatan Mojosari, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko,

Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal merupakan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

A. Kecamatan Mojosari

Kecamatan Mojosari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 26,65 km^2 dan memiliki ketinggian wilayah 100 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Mojosari terbagi menjadi 19 Desa/kelurahan yaitu Desa Sumber Tanggul, Belahan Tengah, Awang-awang, Kauman, Sarirejo, Sawahan, Mojosari, Wonokusumo, Seduri, Leminggir, Mojosulur, Randubango, Jotangan, Menanggal, Pakukuhan, Modopuro, Kebondalem, Kedung Gempol, dan Ngimbangan.

Adapun batas wilayah kecamatan Mojosari sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo

Sebelah Timur :Kecamatan Pungging Kab. Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Kutorejo Kab. Mojokerto

Sebelah Barat : Kec. Bangsal Kab Mojokerto

B. Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 57,17 km^2 dengan tinggi rata-rata 60 m di atas permukaan laut. Kecamatan Jetis terbagi menjadi 16 Desa/ Kelurahan diantaranya adalah Desa Mlirip, Penompo, Canggu, Ngabar, Banjarsari, Sawo, Mojorejo, Jolotundo, Kupang, Bendung, Mojolebak, Parengan, Jetis, Perning, Sidorejo, dan Lakardowo.

Adapun batas wilayah kecamatan Jetis sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Dawar Blandong

Sebelah Timur : Kab Gresik dan Kab Sidoarjo

Sebelah Selatan : Kota Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Gedeg

C. Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 23,46 km^2 dan memiliki ketinggian wilayah 64 m di atas permukaan laut. Kecamatan Sooko terbagi menjadi 15 desa diantaranya adalah Desa Gemekan, Blimbingsari, Brangkal, Kedungmaling, Klinterejo, Modongan, Sambiroto, Jampirogo, Japan, Sooko, Wringinrejo, Karangkedawang, Mojoranu, Tempuran dan Ngingasrembyong.

Adapun batas wilayah Kecamatan Sooko sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec Gedeg dan Kota Mojokerto

Sebelah Timur : Kec Puri

Sebelah Selatan : Kec Trowulan dan Kec Puri

Sebelah Barat : Kec. Trowulan dan Kab Jombang

D. Kecamatan Trowulan

Kecamatan Trowulan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 39,20 km2 dan memiliki ketinggian wilayah 60m di atas permukaan laut. Kecamatan Trowulan terbagi menjadi 16 Desa diantaranya Desa Pakis, Sentonorejo, Temon, Beloh, Domas, Jambuwok, Watesumpak, Jatipasar, Trowulan, Bejijong, Kejagan, Wonorejo, Panggih, Tawangsari, Balongwono dan Bicak.

Adapun batas wilayah Kecamatan Trowulan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang

Sebelah Timur : Kecamatan Sooko, Kec Puri, dan Kec Jatirejo

Sebelah Selatan : Hutan KPH Kab Jombang

Sebelah Barat : Kab Jombang

E. Kecamatan Bangsal

Kecamatan Bangsal merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 24,06 km^2 dan memiliki ketinggian wilayah 60 m di atas permukaan laut. Kecamatan Bangsal terdiri dari 17 desa diantaranya Desa Sumberwono, Desa Peterongan, Kedunguneng, Kutoporong, Ngastemi, Mojotamping, Ngrowo, Sumbertebu, Sidomulyo, Puloniti, Bangsal, Pacing, Gayam, Pekuwon, Salen, Mejoyo dan Tinggarbuntut.

Adapun batas wilayah Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ds. Jumeneng, Kec Mojoanyar

Sebelah Timur : Ds. Modopuro Kec Mojosari

Sebelah Selatan : Ds. Kaligoro Kec Kutorejo

Sebelah Barat : Ds. Gayaman Kec Mojoanyar

4.1.1.1 Jarak Terhadap Pusat Pemerintahan Lama dan Kecamatan Lainnya

Salah satu kriteria yang dapat menjelaskan kondisi geografis wilayah studi adalah jarak antara lokasi alternatif ibu Kota Kabupaten Mojokerto terhadap pusat pemerintahan lama. Pusat pemerintahan lama kabupaten Mojokerto berada di Kota Mojokerto. Adapun jarak antara lokasi alternatif ibu kota Kabupaten Mojokerto terhadap pusat pemerintahan yang lama sebagai berikut:

A. Kecamatan Mojosari memiliki jarak sejauh 15 km terhadap Kota Mojokerto
B. Kecamatan Jetis memiliki jarak sejauh 14 km terhadap Kota Mojokerto
C. Kecamatan Sooko memiliki jarak sejauh 5,2 km terhadap Kota Mojokerto
D. Kecamatan Trowulan memiliki jarak sejauh 12 km terhadap Kota Mojokerto
E. Kecamatan Bangsal memiliki jarak sejauh 10 km terhadap Kota Mojokerto

Tabel 4.1 Jarak Lima Kecamatan dengan kecamatan lainnya

Kecamatan	Jatirejo	Gondang	Pacet	Trawas	Ngoro	Pungging	Kutorejo	Mojosari	Bangsal	Mojoanyar	Dlanggu	Puri	Trowuan	Sooko	Gedeg	Kemlagi	Jetis	Dawablandong
Mojosari	34	19	21	23	12	3	9	0	11	13	12	31	30	23	24	32	26	35
Bangsal	23	15	24	34	23	14	12	11	0	2	9	11	19	12	13	21	15	26
Trowulan	18	28	35	45	42	33	25	30	19	21	22	15	0	7	18	26	20	29
Sooko	11	21	28	38	35	26	18	23	12	14	15	8	7	0	11	19	13	22
Jetis	24	32	39	49	38	29	29	26	15	11	24	21	20	13	12	6	0	14

Sumber : Dokumen Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2017

4.1.1.2 Jarak Terhadap Kota Sekitar

Kriteria jarak yang dibahas selain terhadap pusat pemerintahan lama juga jarak antara lokasi alternatif ibu kota kabupaten Mojokerto terhadap kota sekitar (Kota Surabaya). Berikut jarak masing-masing lokasi alternative ibu kota Kabupaten Mojokerto terhadap Kota Surabaya:

A. Kecamatan Mojosari memiliki jarak sejauh 47 km terhadap Kota Surabaya
B. Kecamatan Jetis memiliki jarak sejauh 54 km terhadap Kota Surabaya
C. Kecamatan Sooko memiliki jarak sejauh 56 km terhadap Kota Surabaya
D. Kecamatan Trowulan memiliki jarak sejauh 62 km terhadap Kota Surabaya
E. Kecamatan Bangsal memiliki jarak sejauh 58 km terhadap Kota Surabaya

Dari kondisi jarak, rata-rata jarak antara alternative lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur adalah 47-62 km. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Trowulan memiliki jarak terjauh dengan Ibukota Propinsi meskipun rata-rata jarak 4 kecamatan lainnya juga tidak berbeda siginificant dengan kecamatan terjauh. Berdasarkan teori

pelayanan kota, jarak dengan kota lain khususnya dengan pusat pelayanan yang memiliki hierarki lebih tinggi akan mempengaruhi perkembangan wilayah secara positif dan significant. Semakin dekat jarak dengan Ibukota Propinsi maka kecamatan yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten tersebut akan mendapatkan multiplier effect positif baik secara fisik maupun non fisik dengan lebih cepat. Dengan demikian kecamatan sebagai ibukota Kabupaten juga akan semakin berkembangan dengan significant dan dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi wilayah sekitarnya

4.1.2 Kondisi Fisik

Kondisi fisik suatu wilayah penentuan lokasi alternatif ibu kota Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan berdasarkan kemiringan lereng, ketersediaan air bersih dan kerentanan bencana setiap daerah. Berikut penjelasan masing-masing kondisi fisik pada lokasi alternatif ibu kota Kabupaten Mojokerto.

4.1.2.1 Kemiringan Lereng

A. Kecamatan Mojosari memiliki tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 3044,88 Ha.
B. Kecamatan Jetis memiliki tiga klasifikasi tingkat kemiringan lereng yaitu 0-2 derajat, 2-15 derajat dan 15-40 derajat. Adapun luas wilayah yang berada pada tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat seluas 5008,33 Ha; kemiringan lereng 2-15 derajat seluas 48 Ha dan kemiringan lereng 15-40 derajat seluas 32 Ha.
C. Kecatamatan Sooko memiliki tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 2497,32 Ha
D. Kecamatan Trowulan memiliki tingkat kemiringan lereng yaitu 0-2 derajat, 2-15 derajat dan 15-40 derajat. Adapun luas wilayah yang berada pada tingkat

kemiringan lereng 0-2 derajat seluas 4402,14 Ha; kemiringan lereng 2-15 derajat seluas 180 Ha dan kemiringan lereng 15-40 derajat seluas 65 Ha.

E. Kecamatan Bangsal memiliki tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 2373,70 Ha.

Tabel 4.2 Luas Daerah pada Lima Kecamatan menurut Klasifikasi Kelerengan/Kemiringan Tanah

Kecamatan	Klasifikasi Kemiringan				Jumlah total
	0-2 derajat	2-15 derajat	15-40 derajat	>40 derajat	
Mojosari	3.044,38	0	0	0	3.044,38
Bangsal	2.373,70	0	0	0	2.373,70
Trowulan	4.402,14	180	65	0	4.465,14
Sooko	2.497,32	0	0	0	2.497,32
Jetis	5.008,33	1.037	20	0	6.065,33

Sumber : Dokumen Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2017

Dalam mendukung perkembangan fisik maupun mendukung perkembangan kegiatan pelayanan, diperlukan kondisi bentang alam yang memiliki daya dukung yang tinggi. Berdasarkan kondisi kelerengan, lokasi yang memiliki kelerengan landai lebih cenderung memiliki daya dukung/kemampuan lahan yang tinggi dalam mendukung perkembangan pusat pelayanan dikarenakan tidak adanya hambatan alam sehingga wilayahnya dapat dikembangkan ke segala arah. Karena Ibukota Kabupaten adalah sebagai pusat pelayanan kegiatan kabupaten maka dapat dipastikan bahwa akan membutuhkan banyak lahan yang berdaya dukung tinggi yaitu utamanya yang berlereng rendah. Dari data diperoleh gambaran bahwa kecamatan yang memiliki kelerengan relative datar adalah Kecamatan Mojosari, Sooko dan Bangsal. Sedangkan kecamatan Trowulan dan Jetis beberapa bagian wilayahnya memiliki kelerengan diatas 2% namun dengan % luasan lahan yang cukup kecil

4.1.2.2 Ketersediaan Air Bersih

Berikut merupakan ketersediaan air bersih di setiap lokasi alternatif pemilihan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

A. Sebagian besar wilayah Kecamatan Mojosari memiliki kualitas air tanah yang baik dan sebagian besar masyarakat menggunakan sumur bor sebagai akses untuk mendapatkan air bersih. Selain itu juga terdapat lokasi sumber air baku PDAM di Kecamatan Mojosari berada di Desa Awang-awang dan Desa Candirejo.

B. Sebagian besar wilayah kecamatan Sooko memiliki kualitas air tanah yang baik dan sebagian besar masyarakat menggunakan sumur bor sebagai akses untuk mendapat kan air bersih. Adapun lokasi sumber air baku PDAM di Kecamatan Jetis berada di Desa Jetis.

C. Wilayah Kecamatan Sooko memiliki kualitas air yang baik dengan keriteria tidak bewarna, berbau dan tidak berasa. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sooko menggunakan sumur sebagai akses mendapatkan air bersih.

D. Wilayah Kecamatan Trowulan memiliki kualitas air yang baik. Sebagian besar masyarakat juga menggunakan sumur sebagai akses mendapatkan air bersih. Adapun lokasi sumber air baku PDAM di Kecamatan Trowulan berada di Desa Domas

E. Wilayah Kecamatan Bangsal memiliki kualitas air yang baik dengan kriteria tidak bewarna, berbau dan tidak berasa. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sooko menggunakan sumur sebagai akses mendapatkan air bersih.

Berdasarkan data ketersediaan air bersih, semua kecamatan telah terlayani air bersih khususnya jaringan PDAM dengan baik karena kelima kecamatan ini termasuk dalam wilayah tengah dengan aksesibilitas yang baik

sehingga jaringan pipa PDAM mampu menjangkau kelima wilayah ini dengan mudah.

4.1.2.3 Kerentanan Bencana

Kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah kekeringan, tanah longsor dan banjir (Kementrian Bappenas, 2017).

1. Resiko kekeringan

Resiko keketingan tertinggi berada pada tengah wilayah punggung gunung di bagian selatan dan dataran rendah bagian utara mojokerto. Meskipun memiliki beberapa sumber air namun kepadatan populasi dibagian utara Kabupaten Mojokerto juga tinggi, sehingga tingkat kebutuhan air tinggi dengan sumber-sumber air yang terbatas. Lima kecamatan yang merupakan alternative lokasi Ibukoa Kabupaten, semuanya bukan merupakan Kawasan yang rawan resiko kekeringan

2. Banjir

Berdasarkan BNPB Kabupaten mojokerto rentan terhadap bencana banjir, khususnya di daerah dataran rendah seperti Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Puri, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet dan Trawas. Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Bangsal, Mojosari dan Sooko merupakan wilayah yang merupakan Kawasan rawan bencana banjir

3. Longsor

Selain terjadi banjir, adapun kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, khususnya pada wilayah Kecamatan Gondang dan Jatirejo di lereng pegunungan Anjasmoro, Pacet di lereng gunung Welirang dan Trawas serta Ngoro

di lereng Gunung Penanggungan. Lima kecamatan yang merupakan alternative lokasi Ibukoa Kabupaten, semuanya bukan merupakan Kawasan yang rawan resiko longsor

4.1.3 Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek diantaranya luas lahan dan penggunaan lahan. Berikut penjelasan dari masing-masing ketersediaan lahan.

4.1.3.1 Luas Lahan

Lima kecamatan yang terpilih sebagai alternative ibukota Kabupaten Mojokerto rata-rata memiliki luas mulai 23,46 sampai 57,17 km2. Daerah terluas adalah Kecamatan Jetis dan yang terkecil adalah Kecamatan Sooko. Luas daerah tidak tidak terkait langsung dengan potensi suatu kecamatan sebagai Ibukota Kabupaten, hanya saja terkait dengan ketersediaan lahan yang dibutuhkan dalam pengembangan fisik suatu Ibukota Kabupaten. Semakin luas wilayah maka semakin besar pula peluang lahan-lahan yang potensial yang dapat mendukung perkembangan pembangunan daerah. Dalam hal ini Kecamatan Jetis secara luas daerah, dianggap lebih potensial dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Rincian luas daerah pada lima kecamatan terdapat pada **Tabel 4.3**

Tabel 4.3 Luas dan Letak Daerah Lima Kecamatan

Kecamatan	Tinggi rata-rata dari permukaan air laut (m)	Luas Daerah (Km2)
Mojosari	100	26,65
Bangsal	60	24,06
Trowulan	60	39,20
Sooko	64	23,46
Jetis	60	57,17

Sumber : Dokumen Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2017

4.1.3.2 Penggunaan Lahan

Lima kecamatan yang terpilih sebagai alternative ibukota Kabupaten Mojokerto penggunaan lahan rata-rata didominasi oleh penggunaan lahan sawah dengan proporsi hampir 50% dari total luas daerah. Proporsi Luas lahan sawah terbesar ada di Kecamatan Mojosari (62%) sedangkan terkecil ada di Kecamatan Jetis (38%). Diasumsikan bahwa semakin besar luas lahan sawah pada suatu kecamatan maka semakin kecil pula potensi lahan yang dapat mendukung pembangunan pada wilayah tersebut dikarenakan guna lahan sawah khususnya berupa sawah beririgasi teknis merupakan lahan produktif yang masih harus dipertahankan keberadaannya apabila memungkinkan. Namun secara fungsi perwilayahan, kelima kecamatan diatas memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan/perkembangan kota sehingga perubahan alih fungsi lahan sawah sangat memungkinkan untuk terjadi.

Sedangkan luas lahan bukan sawah meliputi perkebunan, ladang/tegalan, hutan dll, yang terluas ada di Kecamatan Jetis dan yang terkecil ada di Kecamatan Mojosari. Luas lahan bukan sawah pada intinya masih merupakan lahan produktif sehingga lahan-lahan tersebut sangat terbatas peluangnya untuk bisa mendukung pembangunan daerah. Pada lahan bukan sawah, lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan adalah lahan tegalan/ladang karena diasumsikan nilai produktifitas lahan pada lahan tegalan memiliki nilai yang kecil sehingga dapat dialihfungsikan sebagai lahan potensial pembangunan. Sehingga, kecamatan Jetis memiliki potensial lahan lebih tinggi dalam mendukung pembangunan Ibukota Kabupaten dibandingkan dengan kecamatan lainnya

Penggunaan lahan bukan pertanian dalam hal ini berupa permukiman dan lahan kosong, terluas ada di Kecamatan Jetis dan terkecil ada di Kecamatan

Bangsal. Didalam klasifikasi guna lahan bukan pertanian, terdapat penggunaan lahan kosong yang artinya lahan-lahan yang masih belum terbangun dapat digunakan sebagai pendukung pembangunan fisik Ibukota Kabupaten. Diasumsikan bahwa semakin besar luas lahan non pertanian pada suatu kecamatan maka semakin besar pula potensi lahan yang dapat mendukung pembangunan pada wilayah tersebut. Pada lima kecamatan, luas terbesar ada di Kecamatan Trowulan dan terkecil ada di kecamatan Mojosari

Tabel 4.4 Penggunaan Lahan pada Lima Kecamatan

Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Luas Lahan (Ha)			Luas Total
		Lahan sawah	Lahan Bukan sawah	Lahan bukan pertanian	
Mojosari	26,65	1659	80	930	2669
Bangsal	24,06	1506	241	782	2529
Trowulan	39,20	2469	420	1512	4401
Sooko	23,46	1256	94	993	2343
Jetis	57,17	2519	2780	1386	6685

Sumber : Dokumen Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2017

4.1.3.3 Nilai Lahan

Nilai Lahan dalam hal ini diwakili oleh data NJOP pada 5 (lima) Kecamatan yang terpilih sebagai alternative ibukota Kabupaten Mojokerto. Nilai lahan disajikan dengan range NJOP terendah sampai tertinggi di wilayah Kecamatan Terpilih.

Tabel 4.5 Nilai Lahan pada Lima Kecamatan

Kecamatan	tertinggi	terendah	Rata-rata
Mojosari	Rp. 1.573.000	Rp.48.000	Rp. 451.230
Bangsal	Rp. 802.000	Rp.36.000	Rp. 243.222
Trowulan	Rp. 614.000	Rp.48.000	Rp. 180.385
Sooko	Rp. 1.274.000	Rp.64.000	Rp. 336.339
Jetis	Rp. 1.274.000	Rp.27.000	Rp. 174.262

Sumber : Bapenda, 2018

Berdasarkan table atas Nilai tanah tersebut diatas Kabupaten Mojosari memiliki nilai tanah tertinggi dengan NJOP senilai Rp. 1.573.000 dengan rata-rata

NJOP senilai Rp. 451.230. sedangkan nilai tanah terendah ada di Kecamatan Jetis senilai Rp. 27.000 dengan rata-rata NJOP senilai Rp. 174.262.

4.1.4 Historis

Historis Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan berdasarkan sejarah pembentukan kota, dan sejarah karisidenan. Berikut penjelasan historis masing-masing lokasi alternatif pemilihan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto.

4.1.4.1 Sejarah Pembentukan Kota

Hari jadi Kabupaten Mojokerto ditetapkan pada tanggal 20 Juni 1918 pada zaman pemerintahan Belanda-Jepang. Pembentukan pemerintahan Kabupaten Mojokerto diawali melalui status sebagai staadsgemente, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918.

Kecamatan Mojosari pada sekitar tahun 1980-an merupakan Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kota Praja (Kota Kecil) oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai alternative pelayanan Kota Mojokerto, yang kemudian pada tahun 2012 direncanakan sebagai Kecamatan dengan fungsi Pusat Pemerintahan.

4.1.4.2 Sejarah Karisidenan/Kerajaan

Dari 5 kecamatan yang menjadi alternatif lokasi, Kecamatan yang mempunyai sejarah terkait dengan identitas Kabupaten Mojokerto adalah Kecamatan Trowulan. Kecamatan Trowulan memiliki Situs Trowulan yaitu kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia . Situs Trowulan telah didaftarkan untuk menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2009. RTRW Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032 telah menetapkan Kecamatan Trowulan sebagai Kawasan Strategis Cagar Budaya Nasional. Berbagai temuan yang diangkat di sini menunjukkan ciri-ciri pemukiman yang cukup maju.

Berdasarkan kronik, prasasti, simbol, dan catatan yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut, diduga kuat situs ini berhubungan dengan Kerajaan Majapahit.

Kawasan berdirinya struktur-struktur besar (candi, makam, dan kolam) mencakup wilayah sekitar 5 km × 5 km, dipotong oleh jalan negara yang menghubungkan kota Jombang dan Surabaya.

4.1.5 Kebijakan

Dalam rencana RTRW Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032, berdasarkan rencana pengembangan sistem perkotaan, lima kecamatan yang merupakan lokasi alternatif Ibukota, diarahkan menjadi 3 jenis 3 (tiga) Pusat Kegiatan yaitu ;

1. Pusat Kegiatan Lokal “Promosi” (PKL Promosi)
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Perkotaan Kecamatan Jetis dan Sooko dikondisikan untuk dapat melayani beberapa kawasan perkotaan disekitarnya. Kawasan perkotaan Mojosari memiliki lokasi yang relatif strategis karena terletak pada jalur regional sehingga perkotaan ini diarahkan sebagai pusat pelayanan dari wilayah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Kecamatan Bangsal dan Trowulan direncanakan sebagai pusat pelayanan lingkungan

Adapun fungsi untuk tiap pusat kegiatan pada lima kecamatan adalah sebagai berikut ini ;

1. Perkotaan Mojosari (PKLp) dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman skala regional, pusat pendidikan skala

regional, pusat kesehatan skala regional, pusat perdagangan jasa skala regional, pusat pelayanan pariwisata dan pusat transportasi skala kabupaten.

2. Perkotaan Jetis (PKLp) dengan fungsi pengembangan sebagai pusat industri skala nasional dan regional, pusat pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
3. Perkotaan Sooko (PKLp) dengan fungsi pengembangan sebagai pusat permukiman skala kabupaten, pusat pelayanan pendidikan skala dasar hingga menengah, pusat pelayanan kesehatan skala local dan pusat perdagangan dan jasa skala regional dan lokal.
4. Kawasan Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : Perkotaan Bangsal dan Trowulan

Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan yang ada di kabupaten Mojokerto direncanakan terdiri atas :

A. Kawasan industri skala menengah hingga berat terdapat di perkotaan Jetis, sedangkan untuk industri skala kecil terdapat di perkotaan Sooko dan Trowulan.
B. Kegiatan perdagangan utama Kabupaten Mojokerto terdapat di perkotaan Sooko, sedangkan untuk perdagangan tingkat regional yang menampung hasil produksi industri, pertanian dan perkebunan dengan lingkup skala regional terdapat di perkotaan Sooko dan Mojosari serta tetap berorentasi juga ke Kota Mojokerto
C. Pusat kegiatan pendidikan hingga tingkat tinggi yang terdapat kecamatan Sooko dan didukung oleh Trowulan, dan Perkotaan Bangsal.

Jadi, secara kebijakan sistem perwilayahan, 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mojosari, Kecamatan Jetis dan Sooko memiliki fungsi/hierarki pelayanan yang

lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Bangsal dan Trowulan. Namun secara keseluruhan fungsi, semua kecamatan memiliki potensi cepat tumbuh karena merupakan lokasi yang secara kebijakan merupakan wilayah yang punya fungsi sebagai pusat pelayanan baik skala local, Kawasan maupun regional.

4.1.6 Aksesibilitas

Aksesibilitas dapat dijelaskan melalui jaringan jalan atau tipe jalan yang ada di masing-masing lokasi alternatif penentuan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan penjelasan aksesibilitas tersebut.

Tabel 4.6 Ketersediaan Aksesibilitas Pada Masing-Masing Lokasi Alternatif Penentuan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto

No	Lokasi	Jalan Tol Nasional	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Kereta Api
1	Kecamatan Mojosari	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2	Kecamatan Jetis	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
3	Kecamatan Sooko	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Kecamatan Trowulan	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
5	Kecamatan Bangsal	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua lokasi alternatif pemilihan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto keberadaan jalan tol hanya ada di Kecamatan Jetis dan keberadaan jalan kereta api ada di Kecamatan Sooko. Sedangkan jalan nasional, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan local terdapat di seluruh lokasi alternatif. Ini mengartikan bahwa seluruh moda transportasi besar maupun kecil dapat melewati Kecamatan Mojosari, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, dan Kecamatan Bangsal. Selain itu dapat diketahui juga bahwa di Kecamatan Sooko juga memiliki akses atau dilewati jalan kereta api.

4.1.7 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

A. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto terdiri dari rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, poliklinik desa dan posyandu. Berikut ketersediaan fasilitas kesehatan di masing-masing lokasi alternatif penentuan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.7 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Lokasi Alternatif Penentuan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Klinik Bersalin	Balai pengobatan	Puskesmas	Poliklinik Desa	Posyandu
1.	Mojosari	3	1	5	5	19	79
2.	Jetis	0	2	1	5	16	89
3.	Sooko	1	1	0	4	15	77
4.	Trowulan	0	0	1	5	16	62
5.	Bangsal	1	1	1	3	17	56

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa di Kecamatan Mojosari terdapat fasilitas kesehatan yang lengkap dibandingkan lokasi alternatif yang lain. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Kecamatan Trowulan memiliki ragam fasilitas kesehatan yang paling sedikit dibandingkan kecamatan yang lain. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Trowulan adalah balai pengobatan, puskesmas, poliklinik desa dan posyandu.

B. Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial adalah sarana atau kegiatan sosial berbasis masyarakat. Adapun fasilitas sosial yang dimaksud adalah pengajian, arisan, usaha kelompok, pendidikan, remaja masjid, sinoman, dan persekutuan doa. Berikut ketersediaan fasilitas sosial di masing-masing lokasi alternatif penentuan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.8 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

No	Kecamatan	Pengaji-an	Arisan	Usaha Kelompok	Pendidik-an	Remaja Masjid	Sinoman	Persek u-tuan Doa
1.	Mojosari	13	14	8	7	6	-	4
2.	Jetis	43	46	-	7	24	14	8
3.	Sooko	-	15	-	49	15	-	-
4.	Trowulan	24	10	1	11	17	-	1
5.	Bangsal	66	77	3	-	37	1	-

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki fasilitas sosial yang lebih lengkap adalah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Trowulan. Ketiga kecamatan tersebut terdapat fasilitas sosial berupa pengajian, arisan, pendidikan, remaja masjid, sinoman dan persekutuan doa.

4.1.8 Kependudukan

Kependudukan dapat dijelaskan dengan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, angkatan kerja dan mata pencaharian penduduk. Berikut merupakan penjelasan kependudukan pada masing-masing lokasi alternatif pemilihan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.9 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	Tahun 2000	Tahun 2010	Tingkat Pertumbuhan penduduk
1.	Mojosari	65.978	73.945	1,15
2.	Jetis	68.026	79.967	1,63
3.	Sooko	58.172	68.759	1,39
4.	Trowulan	59.830	68.154	1,31
5.	Bangsal	56.925	46.625	-1,98

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Kecamatan Mojosari, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Trowulan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Sedangkan

Kecamatan Bangsal mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun 2000 hingga tahun 2010.

4.2 Penentuan Prioritas Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten

Prioritas alternatif lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto ditentukan dengan teknik analisis AHP yang melibatkan para pakar. Pakar-pakar yang dimaksud meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (pakar 7), Kepala Sub Bidang Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (pakar 1), Kepala Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (pakar 6), Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto (pakar 5), Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (pakar 3), Konsultan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Provinsi Jawa Timur) (pakar 4), Anggota Dewan/DPRD Kabupaten Mojokerto (pakar 8) dan Wakil masyarakat (pakar 2).

Tabel 4.10 Justifikasi Kriteria dan Alternatif AHP

Kriteria	Parameter
Letak Geografis	Jarak terhadap pusat pemerintahan lama
	Jarak terhadap kota sekitar
Kondisi Fisik	Kemiringan lereng
	Ketersediaan air bersih
	Kerentanan bencana
Ketersediaan Lahan	Status lahan
	Luas lahan
	Harga Lahan
	Penggunaan lahan
Historis	Sejarah pembentukan kota
	Sejarah karisidenan / kasultanan / kerajaan
Kebijakan	Rencana Tata Ruang
	Prosedur perizinan
Politik Dan Keamanan	Kesepakatan masyarakat

	Visi Misi Kepala Daerah
Aksesibilitas	Sarana dan prasarana transportasi
	Jaringan jalan
Ketersediaan Sarana Prasarana	Fasilitas kesehatan
	Fasilitas ekonomi
	Fasilitas sosial
	Jaringan utilitas
Kependudukan	Jumlah penduduk
	Tingkat pertumbuhan penduduk

Melalui **Tabel 4.10** akan mengeluarkan prioritas kriteria dan pilihan-pilihan lokasi yang terpilih berdasarkan prioritas kriteria yang diperlukan oleh suatu lokasi Ibukota Kabupaten berdasarkan stakeholder

4.2.1 Prioritas Kriteria oleh Para Pakar

Pada **Tabel 4.10,** kriteria lokasi Ibukota Kabupaten adalah Letak geografis, Kondisi fisik, Ketersediaan lahan, Historis, Kebijakan, Politik dan keamanan, Aksesibilitas, Ketersediaan sarana prasarana dan Kependudukan. Antar kriteria tersebut dibandingkan oleh para pakar dengan hasil perbandingan yang disajikan pada **Tabel 4.11 - Tabel 4.18**. Hasil perbandingan tersebut diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada para pakar dan diubah dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan setiap kriteria lokasi Ibukota Kabupaten. Seluruh pendapat pakar digunakan untuk menentukan bobot kriteria.

Tabel 4.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 1

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesi bilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Ke-Pendudu-kan
Letak Geografis	1.00	0.25	0.14	3.00	2.00	2.00	2.00	0.20	0.20
Kondisi Fisik	4.00	1.00	0.25	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00
Ketersediaan Lahan	7.00	4.00	1.00	9.00	9.00	9.00	6.00	4.00	5.00
Historis	0.33	0.20	0.11	1.00	3.00	1.00	0.33	0.20	0.14
Kebijakan	0.50	0.25	0.11	0.33	1.00	1.00	0.50	0.17	0.20
Politik Dan Keamanan	0.50	0.20	0.11	1.00	1.00	1.00	0.50	0.17	0.20
Aksesibilitas	0.50	0.20	0.17	3.00	2.00	2.00	1.00	0.20	0.20
Ketersediaan Sarana Prasarana	5.00	0.33	0.25	5.00	6.00	6.00	5.00	1.00	1.00
Kependudukan	5.00	0.25	0.20	7.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00
Total	23.83	6.68	2.34	34.33	33.00	32.00	25.33	9.93	11.94

Tabel 4.12 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 2

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesi bilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Ke-Pendudu-kan
Letak Geografis	1.00	0.14	0.14	3.00	3.00	3.00	1.00	0.50	0.50
Kondisi Fisik	7.00	1.00	0.33	3.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00
Ketersediaan Lahan	7.00	3.00	1.00	8.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00
Historis	0.33	0.33	0.13	1.00	0.33	0.50	0.33	0.25	0.20
Kebijakan	0.33	0.25	0.17	3.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20
Politik Dan Keamanan	0.33	0.20	0.17	2.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.33
Aksesibilitas	1.00	0.33	0.17	3.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25
Ketersediaan Sarana Prasarana	2.00	0.20	0.20	4.00	5.00	4.00	4.00	1.00	0.33
Kependudukan	2.00	0.20	0.20	5.00	5.00	3.00	4.00	3.00	1.00
Total	21.00	5.66	2.50	32.00	26.33	24.50	21.33	15.45	12.82

Tabel 4.13 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 3

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaa n Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamana n	Aksesi bilitas	Ketersediaa n Sarana Prasarana	Ke-Pendudu-kan
Letak Geografis	1.00	4.00	0.50	3.00	3.00	1.00	0.25	0.33	3.00
Kondisi Fisik	0.25	1.00	0.25	2.00	4.00	1.00	0.33	0.25	3.00
Ketersediaan Lahan	2.00	4.00	1.00	7.00	7.00	7.00	1.00	3.00	7.00
Historis	0.33	0.50	0.14	1.00	2.00	1.00	0.14	0.20	0.33
Kebijakan	0.33	0.25	0.14	0.50	1.00	2.00	0.17	0.17	3.00
Politik Dan Keamanan	1.00	1.00	0.14	1.00	0.50	1.00	0.14	0.20	3.00
Aksesibilitas	4.00	3.00	1.00	7.00	6.00	7.00	1.00	1.00	9.00
Ketersediaan Sarana Prasarana	3.00	4.00	1.00	5.00	6.00	5.00	1.00	1.00	7.00
Kependudukan	0.33	0.33	0.14	3.00	0.33	0.33	0.11	0.14	1.00
Total	12.25	18.08	4.32	29.50	29.83	25.33	4.15	6.29	36.33

Tabel 4.14 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 4

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaa n Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamana n	Aksesi bilitas	Ketersediaa n Sarana Prasarana	Ke-Pendudu-kan
Letak Geografis	1.00	0.33	0.20	2.00	4.00	2.00	4.00	0.33	0.25
Kondisi Fisik	3.00	1.00	0.50	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00
Ketersediaan Lahan	5.00	2.00	1.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00
Historis	0.50	0.20	0.14	1.00	3.00	1.00	2.00	0.33	0.25
Kebijakan	0.25	0.25	0.17	0.33	1.00	1.00	3.00	0.33	0.25
Politik Dan Keamanan	0.50	0.20	0.17	1.00	1.00	1.00	3.00	0.50	0.50
Aksesibilitas	0.25	0.20	0.20	0.50	0.33	0.33	1.00	0.50	0.25
Ketersediaan Sarana Prasarana	3.00	0.33	0.20	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.50
Kependudukan	4.00	0.25	0.17	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	1.00
Total	17.50	4.77	2.74	23.83	26.33	20.33	29.00	13.00	13.00

Tabel 4.15 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 5

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesibilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Kependudukan
Letak Geografis	1.00	1.00	0.25	0.11	0.33	0.33	0.20	0.20	0.20
Kondisi Fisik	1.00	1.00	0.33	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	0.33
Ketersediaan Lahan	4.00	3.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.33	0.50	2.00
Historis	9.00	3.00	3.00	1.00	5.00	3.00	2.00	1.00	3.00
Kebijakan	3.00	0.33	1.00	0.20	1.00	1.00	0.33	0.20	1.00
Politik Dan Keamanan	3.00	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.33	0.50	1.00
Aksesibilitas	5.00	1.00	3.00	0.50	3.00	3.00	1.00	0.50	3.00
Ketersediaan Sarana Prasarana	5.00	1.00	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	1.00	3.00
Kependudukan	5.00	3.00	0.50	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00
Total	36.00	14.33	12.08	4.14	20.33	13.33	7.53	5.23	14.53

Tabel 4.16 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 6

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesibilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Kependudukan
Letak Geografis	1.00	9.00	0.33	3.00	1.00	0.50	1.00	1.00	2.00
Kondisi Fisik	0.11	1.00	0.20	3.00	0.33	0.25	0.25	0.50	1.00
Ketersediaan Lahan	3.00	5.00	1.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Historis	0.33	0.33	0.11	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Kebijakan	1.00	3.00	1.00	5.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Politik Dan Keamanan	2.00	4.00	1.00	5.00	0.33	1.00	3.00	3.00	3.00
Aksesibilitas	1.00	4.00	1.00	5.00	0.33	0.33	1.00	1.00	3.00
Ketersediaan Sarana Prasarana	1.00	2.00	1.00	5.00	0.33	0.33	1.00	1.00	3.00
Kependudukan	0.50	1.00	1.00	5.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00
Total	9.94	29.33	6.64	41.00	4.87	6.95	10.78	11.03	17.20

Tabel 4.17 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 7

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesibilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Kependudukan
Letak Geografis	1.00	0.20	0.20	1.00	0.33	0.50	0.50	1.00	3.00
Kondisi Fisik	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00
Ketersediaan Lahan	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	8.00
Historis	1.00	0.20	0.20	1.00	0.14	0.25	0.20	0.20	0.20
Kebijakan	3.00	1.00	1.00	7.00	1.00	9.00	0.50	9.00	7.00
Politik Dan Keamanan	2.00	1.00	0.20	4.00	0.11	1.00	2.00	5.00	3.00
Aksesibilitas	2.00	1.00	1.00	5.00	2.00	0.50	1.00	5.00	5.00
Ketersediaan Sarana Prasarana	1.00	0.33	0.20	5.00	0.11	0.20	0.20	1.00	1.00
Kependudukan	0.33	0.33	0.13	5.00	0.14	0.33	0.20	1.00	1.00
Total	20.33	6.07	4.93	38.00	5.84	17.78	6.60	30.20	31.20

Tabel 4.18 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria oleh Pakar 8

Kriteria	Letak Geografis	Kondisi Fisik	Ketersediaan Lahan	Historis	Kebijakan	Politik Dan Keamanan	Aksesibilitas	Ketersediaan Sarana Prasarana	Kependudukan
Letak Geografis	1.00	5.00	0.14	3.00	0.33	0.20	0.25	0.20	0.33
Kondisi Fisik	0.20	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50
Ketersediaan Lahan	7.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.20	0.50	1.00	0.33
Historis	0.33	1.00	0.50	1.00	1.00	0.33	0.20	0.20	1.00
Kebijakan	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.33	0.20	1.00	2.00
Politik Dan Keamanan	5.00	2.00	5.00	3.00	3.00	1.00	2.00	5.00	5.00
Aksesibilitas	4.00	1.00	2.00	5.00	5.00	0.50	1.00	1.00	2.00
Ketersediaan Sarana Prasarana	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	0.20	1.00	1.00	3.00
Kependudukan	3.00	2.00	3.00	1.00	0.50	0.20	0.50	0.33	1.00
Total	28.53	16.00	14.64	22.00	13.33	3.47	6.65	10.73	15.17

Sumber : Hasil analisis, 2018

Setelah **diperoleh** matriks perbandingan berpasangan setiap kriteria, selanjutnya ditentukan vektor bobot masing-masing kriteria (**Tabel 4.18**). Berdasar hasil perhitungan *consistency ratio* menggunakan Persamaan, diperoleh ukuran kekonsistenan pendapat pakar dalam mengisi kuesioner. **Tabel 4.18** dan **Lampiran 3.1** menunjukkan pendapat para pakar dalam membandingkan kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten telah konsisten. Nilai *CR*<0.1 yang berarti tingkat konsistensinya ≥90%, sehingga pernyataan pakar dapat menjadi acuan memprioritaskan langkah penentuan Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.19 Vektor Bobot dan Consistensi Ratio Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto

Keterangan		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8
Vektor Bobot	Letak Geografis	0,047	0,058	0,224	0,070	0,029	0,134	0,05	0,035
	Kondisi Fisik	0,200	0,237	0,128	0,092	0,084	0,040	0,142	0,080
	Ketersediaan Lahan	0,371	0,343	0,109	0,261	0,099	0,160	0,240	0,087
	Historis	0,022	0,026	0,034	0,034	0,228	0,023	0,025	0,049
	Kebijakan	0,031	0,037	0,080	0,038	0,056	0,204	0,237	0,090
	Politik Dan Keamanan	0,026	0,035	0,087	0,046	0,065	0,173	0,088	0,280
	Aksesibilitas	0,041	0,044	0,180	0,237	0,152	0,102	0,175	0,166
	Ketersediaan Sarana Prasarana	0,134	0,097	0,112	0,192	0,203	0,100	0,041	0,126
	Kependudukan	0,129	0,123	0,046	0,030	0,085	0,064	0,038	0,087
Consistency Ratio		0,07	0,09	0,07	0,09	0,08	0,09	0,099	0,099

Sumber : Hasil analisis, 2018

Tabel 4.20 dan **gambar 4.1** merupakan hasil perhitungan prioritas Kriteria penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan perhitungan detail perbandingan berpasangan pada **Lampiran 2** dan bobot kriteria semua pakar pada **Lampiran 3.2**, dengan temuan bahwa berdasarkan urutan kriteria dari yang paling utama yang diperlukan oleh suatu Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan stakeholder adalah Ketersediaan lahan (1), aksesibilitas (2), ketersediaan sarana prasarana (3), kondisi fisik (4), politik dan keamanan (5), Kebijakan (6), kependudukan (7), letak geografis (8) dan historis (9). Ketersediaan lahan merupakan kriteria utama yang menentukan apakah suatu wilayah sesuai difungsikan sebagai Ibukota Kabupaten karena keberadaan lahan diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan zona perkantoran terkait dengan fungsi pelayanan ibukota, juga diperlukan dalam mendukung perkembangan zona-zona lain yang tumbuh akibat keberadaan fungsi pelayanan tersebut

Berdasarkan analisis AHP, diperoleh gambaran bahwa para pakar yang terdiri dari dinas baik yang memiliki kepentingan tinggi maupun kepentingan rendah serta pengaruh yang tinggi maupun yang rendah, memiliki pertimbangan bahwa lokasi suatu Ibukota harus memiliki keunggulan adanya lahan yang dapat memfasilitasi pembangunan suatu Ibukota Kabupaten. Namun apabila kriteria ini diterapkan di 5 kecamatan terpilih, tidak semua wilayah memiliki ketersediaan lahan khususnya di Kabupaten Mojokerto yang rata-rata penggunaan lahannya adalah pertanian maupun permukiman. Kecamatan Mojosari yang pada awalnya diarahkan sebagai Ibukota Kabupaten Mojokerto, juga mengalami kendala ketersediaan lahan terkait dengan Harga lahan yang tinggi sehingga pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mampu mengaksesnya. Beberapa kecamatan lainnya

juga terbatas keberadaan lahannya sehingga kriteria yang menjadi pertimbangan pemangku keputusan justru berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan

Pertimbangan kedua adalah terkait dengan “aksesibilitas” dimana akses ini artinya kemudahan jangkauan dengan Ibukota Propinsi. Semakin dekat dengan Ibukota Propinsi maka Ibukota Kabupaten akan semakin cepat berkembang dan mempermudah juga proses mendapatkan informasi terkait rencana-rencana pengembangan daerah. Berdasarkan kondisi di lapangan, beberapa kecamatan berada pada jalur Primer sehingga mempermudah akses ke Propinsi. Kriteria ini dimiliki hampir semua kecamatan. Pertimbangan ketiga adalah “Ketersediaan Sarana Prasarana”. Kecamatan yang memiliki sarana prasarana lengkap akan lebih mempermudah perkembangan suau Ibukota karena sifat ibukota Kabupaten adalah menjadi pusat pelayanan bagi wilayah lainnya sehingga lokasi yang telah memiliki sarana prasarana lengkap akan mempermudah fungsi pelayanan tersebut. Hampir semua kecamatan terpilih mempunyai sarana prasarana yang cukup lengkap pada pada eksisting kecamatan-kecamatan tersebut.

Pertimbangan keempat adalah kondisi fisik. Pada Ibukota Kabupaten, pembangunan fisik berpeluang berkembang dengan sangat pesat sehingga untuk mendukung hal ini diperlukan daya dukung fisik lahan yang dapat mendukung perkembangan fisik kota ke segala arah. Semakin landai kelerengan maka semakin tinggi daya dukung lahannya. Semua kecamatan memiliki kelerengan rendah sehingga semua kecamatan berpeluang tinggi sebagai ibukota Kabupaten.

Pertimbangan kelima adalah “Politik dan Keamanan” yang terkait dengan penerimaan masyarakat dan visi misi kepala daerah. Pertimbangan penerimaan masyarakat terkait dengan banyak hal yang dapat menghalangi maupun mempermudah perkembangan wilayah menjadi Ibukota Kabupaten. Sedangkan

visi misi kepala daerah terkait dengan alokasi wilayah-wilayah yang direncanakan sebagai wilayah unggulan yang dapat mendukung terpenuhinya visi misi Kepala Daerah. Beberapa kecamatan termasuk unggulan dalam mendukung visi misi kepala daerah sehingga potensial sebagai Ibukota Kabupaten. Pertimbangan keenam adalah “Kebijakan”. Yang dimaksud kebijakan adalah peraturan daerah maupun peraturan lain yang mendukung perkembangan suatu wilayah. Apabila suatu wilayah masuk dalam arahan rencana sebagai wilayah yang memiliki keunggulan, maka wilayah tersebut akan diprioritaskan pembangunannya. Beberapa kecamatan termasuk dalam kebijakan pengembangan Kabupaten maupun Propinsi dan Nasional sehingga kecamatan tersebut berpeluang tinggi sebagai Ibukota Kabupaten. Pertimbangan ketujuh adalah “Kependudukan” dimana terkait dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Pakar mempertimbangkan kependudukan sebagai kondisi yang harus dipertimbangkan setelah kebijakan. Posisi kependudukan termasuk kriteria utama yang tidak menjadi pertimbangan bagi pakar dalam menentukan lokasi Ibukota karena penduduk akan berkembang mengikuti perkembangan kota dan juga sebaliknya. Pada wilayah yang pertumbuhannya tinggi memang menggambarkan perkembangan kegiatan pada suatu wilayah namun Ibukota Kabupaten pada dasarnya tidak harus berada pada wilayah yang sudah berkembang. Justru akibat perkembangan suatu Ibukota Kabupaten akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertimbangan kedelapan dan kesembilan adalah letak geografis dan Historis. Dari keseluruhan kriteria di atas, maka pengambil keputusan dapat memperoleh gambaran mengenai pendapat dan pertimbangan dari semua pihak terkait dalam hal ini yang tertuang dalam hasil AHP mengenai urutan prioritas Kriteria suatu Lokasi Ibukota Kabupaten

Tabel 4.20 Bobot Final dan Urutan Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto

Kriteria	Rata-Rata Geometrik Vektor Bobot Para Pakar	Urutan Prioritas
Letak Geografis	0,076	8
Kondisi Fisik	0,126	4
Ketersediaan Lahan	0,213	1
Historis	0,045	9
Kebijakan	0,088	6
Politik Dan Keamanan	0,091	5
Aksesibilitas	0,144	2
Ketersediaan Sarana Prasarana	0,139	3
Kependudukan	0,077	7

Sumber : Analisis, 2018

Urutan Prioritas	Kriteria
1	Ketersediaan Lahan
2	Aksesibilitas
3	Ketersediaan Sarana Prasarana
4	Kondisi Fisik
5	Politik Dan Keamanan
6	Kebijakan
7	Kependudukan
8	Letak Geografis
9	Historis

Sumber : Analisis, 2018

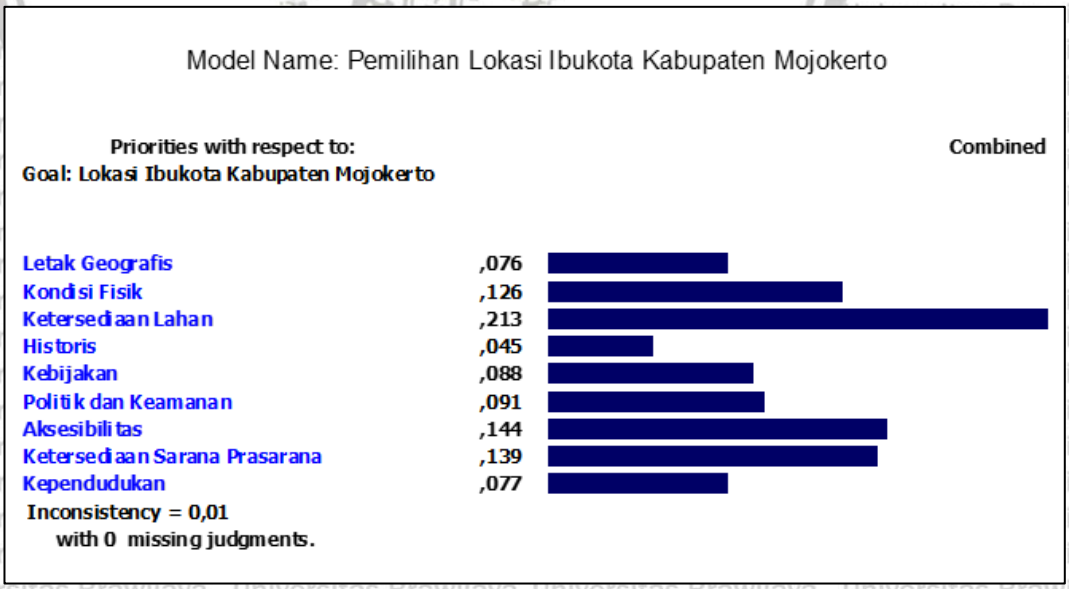

Gambar 4.1 Grafik Bobot Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan analisis Expert choice

4.2.2 Prioritas Alternatif Lokasi

Alternatif Lokasi Terpilih Ibukota Kabupaten Mojokerto dipertimbangkan dari setiap kriteria (kriteria 1-9). Penentuan prioritas alternatif lokasi yang terpilih ditentukan dengan menghitung setiap bobot alternative. Berdasarkan urutan 9 kriteria pada tabel 4.11 maka akan ditentukan prioritas lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto dari perbandingan berpasangan 8 pakar. Lokasi yang terpilih adalah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Bangsal. **Tabel 4.21** hingga **Tabel 4.29** serta **Lampiran 3.1** merupakan hasil perhitungan bobot setiap alternatif dari delapan pakar terpilih.

Tabel 4.21 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Letak Geografis

Letak Geografis		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,014	0,010	0,087	0,016	0,14	0,055	0,006	0,020	0,044	0,373	1
	Kec. Jetis	0,007	0,025	0,020	0,034	0,002	0,017	0,003	0,001	0,014	0,143	4
	Kec. Sooko	0,021	0,012	0,059	0,010	0,002	0,021	0,012	0,004	0,018	0,222	2
	Kec. Bangsal	0,003	0,003	0,022	0,004	0,003	0,033	0,005	0,003	0,010	0,109	5
	Kec. Trowulan	0,004	0,003	0,022	0,006	0,004	0,010	0,019	0,011	0,010	0,153	3

Tabel 4.22 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kondisi Fisik

Kondisi Fisik		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,088	0,100	0,011	0,013	0,041	0,017	0,006	0,046	0,040	0,347	1
	Kec. Jetis	0,020	0,099	0,050	0,044	0,005	0,004	0,003	0,003	0,029	0,152	5
	Kec. Sooko	0,088	0,051	0,017	0,015	0,008	0,009	0,012	0,004	0,026	0,179	2
	Kec. Bangsal	0,048	0,025	0,021	0,009	0,013	0,017	0,005	0,003	0,018	0,155	4
	Kec. Trowulan	0,031	0,021	0,021	0,007	0,021	0,004	0,019	0,017	0,018	0,167	3

Tabel 4.23 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Ketersediaan Lahan

Ketersediaan Lahan		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,036	0,013	0,042	0,025	0,048	0,037	0,063	0,050	0,039	0,249	1
	Kec. Jetis	0,163	0,145	0,014	0,126	0,008	0,014	0,029	0,008	0,063	0,229	2
	Kec. Sooko	0,030	0,017	0,032	0,021	0,009	0,026	0,079	0,004	0,027	0,140	5
	Kec. Bangsal	0,035	0,062	0,012	0,025	0,018	0,066	0,037	0,008	0,033	0,186	4
	Kec. Trowulan	0,051	0,075	0,011	0,032	0,028	0,020	0,028	0,014	0,032	0,196	3

Tabel 4.24 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Historis

Historis		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,001	0,002	0,002	0,003	0,111	0,002	0,009	0,027	0,020	0,212	2
	Kec. Jetis	0,003	0,003	0,005	0,007	0,012	0,004	0,002	0,002	0,005	0,150	4
	Kec. Sooko	0,002	0,003	0,002	0,003	0,014	0,006	0,005	0,006	0,005	0,157	3
	Kec. Bangsal	0,001	0,001	0,001	0,001	0,033	0,001	0,002	0,005	0,006	0,075	5
	Kec. Trowulan	0,010	0,011	0,013	0,017	0,036	0,009	0,001	0,028	0,016	0,406	1

Tabel 4.25 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kebijakan

Kebijakan		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,014	0,016	0,024	0,018	0,027	0,084	0,091	0,035	0,039	0,477	1
	Kec. Jetis	0,010	0,007	0,031	0,008	0,002	0,009	0,016	0,005	0,011	0,133	3
	Kec. Sooko	0,007	0,007	0,018	0,008	0,005	0,024	0,026	0,052	0,018	0,212	2
	Kec. Bangsal	0,001	0,002	0,004	0,002	0,010	0,027	0,018	0,025	0,011	0,099	4
	Kec. Trowulan	0,003	0,001	0,006	0,002	0,006	0,014	0,021	0,006	0,007	0,078	5

Tabel 4.26 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Politik dan keamanan

Politik dan Keamanan		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,011	0,012	0,024	0,022	0,031	0,048	0,034	0,161	0,043	0,423	1
	Kec. Jetis	0,007	0,007	0,034	0,013	0,003	0,030	0,008	0,008	0,014	0,141	4
	Kec. Sooko	0,005	0,015	0,016	0,010	0,005	0,055	0,009	0,030	0,018	0,186	2
	Kec. Bangsal	0,001	0,002	0,006	0,002	0,010	0,072	0,006	0,029	0,016	0,094	5
	Kec. Trowulan	0,004	0,004	0,011	0,007	0,011	0,023	0,031	0,029	0,015	0,155	3

Tabel 4.27 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Aksesibilitas

Aksesibilitas		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,005	0,004	0,053	0,114	0,074	0,042	0,068	0,095	0,057	0,373	1
	Kec. Jetis	0,003	0,019	0,020	0,013	0,009	0,005	0,018	0,008	0,012	0,103	5
	Kec. Sooko	0,008	0,005	0,070	0,033	0,020	0,012	0,060	0,024	0,029	0,219	2
	Kec. Bangsal	0,018	0,002	0,034	0,038	0,013	0,014	0,050	0,011	0,023	0,164	3
	Kec. Trowulan	0,009	0,007	0,027	0,014	0,026	0,005	0,027	0,013	0,016	0,141	4

Tabel 4.28 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Ketersediaan Sarana Prasarana

Ketersediaan Sarana Prasarana		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,059	0,038	0,040	0,087	0,099	0,041	0,016	0,072	0,057	0,455	1
	Kec. Jetis	0,017	0,018	0,019	0,041	0,026	0,011	0,002	0,003	0,017	0,108	3
	Kec. Sooko	0,042	0,041	0,043	0,093	0,037	0,026	0,008	0,020	0,039	0,297	2
	Kec. Bangsal	0,005	0,004	0,004	0,009	0,014	0,014	0,002	0,013	0,008	0,063	5
	Kec. Trowulan	0,006	0,007	0,008	0,016	0,020	0,009	0,002	0,012	0,010	0,077	4

Tabel 4.29 Pembobotan Alternatif berdasar Kriteria Kependudukan

Kependudukan		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Rata-Rata Geometrik	Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,057	0,052	0,018	0,015	0,039	0,026	0,015	0,050	0,034	0,471	1
	Kec. Jetis	0,004	0,004	0,005	0,002	0,041	0,007	0,003	0,003	0,009	0,083	5
	Kec. Sooko	0,029	0,029	0,011	0,010	0,018	0,016	0,010	0,013	0,017	0,250	2
	Kec. Bangsal	0,008	0,008	0,005	0,002	0,008	0,007	0,003	0,008	0,006	0,089	4
	Kec. Trowulan	0,013	0,010	0,005	0,002	0,009	0,007	0,008	0,006	0,008	0,107	3

Sumber : Hasil Analisis, 2018

4.2.3 Hasil Akhir Pemrioritasan Kriteria dan Alternatif Lokasi

Melalui AHP telah diketahui bobot kriteria dan alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto. Konsistensi pendapat para pakar telah memenuhi kriteria syarat ketidakkonsistenan di bawah 10% yang ditunjukkan oleh nilai *consistency ratio* ≤ 0,1. Oleh karena itu, hasil pebobotan layak digunakan sebagai penentu

alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto. Hasil dari lokasi terpilih ditunjukkan pada **Tabel 4.30 dan 4.31** dengan prirotas lokasi terpilih berdasarkan prioritas kriteria adalah Kecamatan Mojosari (1), Kecamatan Sooko (2), Kecamatan Trowulan (3), Kecamatan Jetis (4) dan Kecamatan Bangsal (5). Hierarki dan bobot alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada **Gambar 4.2, Lampiran 3.2** dan **Lampiran 4.1**

Tabel 4.30 Bobot Final dan Urutan Prioritas Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan 8 pakar

		Pakar 1	Pakar 2	Pakar 3	Pakar 4	Pakar 5	Pakar 6	Pakar 7	Pakar 8	Nilai Bobot Final	Prioritas
Vektor Bobot	Kec. Mojosari	0,285	0,247	0,302	0,314	0,484	0,353	0,356	0,557	0,351	1
	Kec. Jetis	0,233	0,327	0,198	0,288	0,109	0,101	0,089	0,042	0,157	4
	Kec. Sooko	0,232	0,180	0,267	0,203	0,120	0,196	0,234	0,158	0,195	2
	Kec. Bangsal	0,120	0,108	0,110	0,093	0,123	0,250	0,143	0,106	0,137	5
	Kec. Trowulan	0,130	0,139	0,123	0,103	0,163	0,101	0,178	0,138	0,161	3
Consistency Ratio		0,08	0,08	0,06	0,08	0,07	0,09	0,09	0,10		

Sumber : Hasil Analisis, 2018

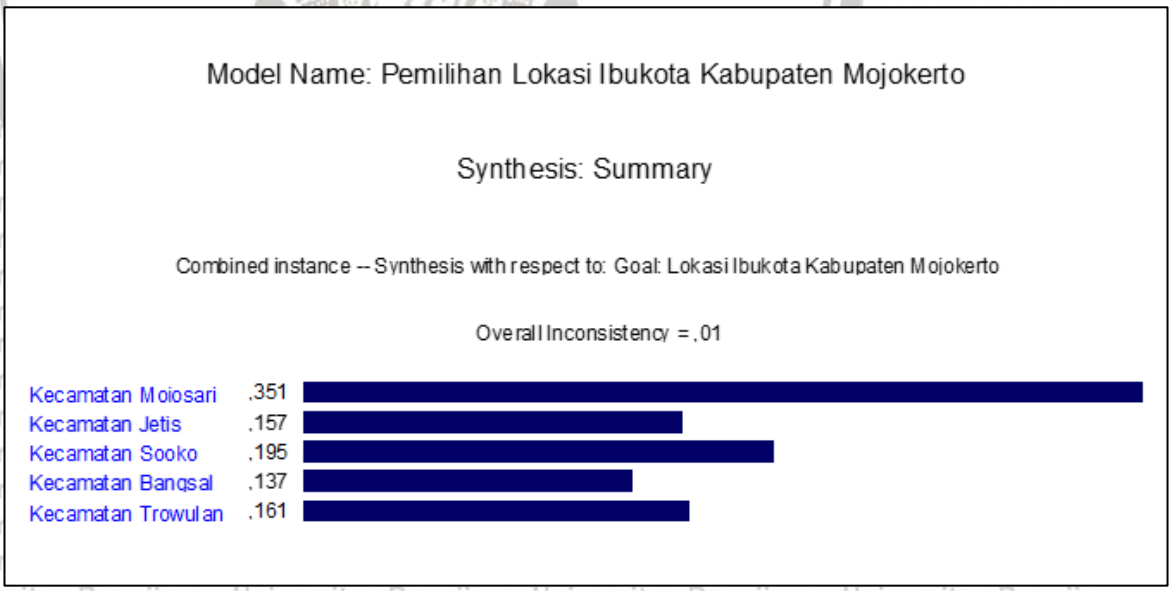

Gambar 4.2 Grafik Bobot Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dengan analisis Expert choice

Tabel 4.31 Bobot Final dan Urutan Prioritas Kriteria dan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto

Kriteria	Kecamatan Mojosari		Kecamatan Sooko		Kecamatan Trowulan		Kecamatan Jetis		Kecamatan Bangsal	
	Bobot Final	Urutan Prioritas	Bobot Final	Urutan Prioritas	Bobot Final	Urutan Prioritas	Bobot Final	Urutan Prioritas	Bobot Final	Urutan Prioritas
Letak Geografis	0,373	4	0,222	3	0,153	5	0,143	4	0,109	4
Kondisi Fisik	0,347	6	0,179	7	0,167	3	0,152	2	0,155	3
Ketersediaan Lahan	0,249	7	0,140	9	0,196	2	0,229	1	0,186	1
Historis	0,212	9	0,157	8	0,406	1	0,150	3	0,075	8
Kebijakan	0,477	1	0,212	5	0,078	8	0,133	6	0,099	5
Politik Dan Keamanan	0,423	8	0,186	6	0,155	4	0,141	5	0,094	6
Aksesibilitas	0,373	5	0,219	4	0,141	6	0,103	8	0,164	2
Ketersediaan Sarana Prasarana	0,455	3	0,297	1	0,077	9	0,108	7	0,063	9
Kependudukan	0,471	2	0,250	2	0,107	7	0,083	9	0,089	7

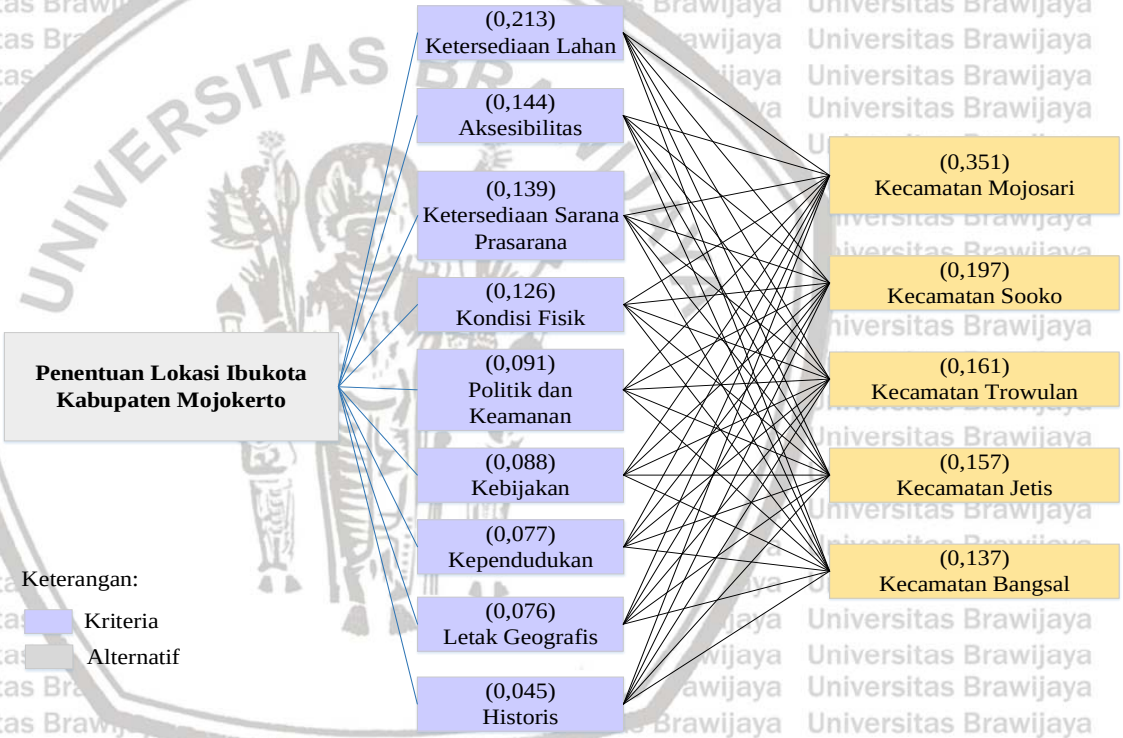

Gambar 4.3 Hierarki dan Bobot Prioritas Kriteria dan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan temuan tersebut diatas ketersediaan lahan menjadi kriteria yang paling utama dalam penentuan suatu lokasi (Tabel 4.20). Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Von Thunnen mengenai nilai lahan, bahwa lahan semakin jauh dari pusat kota nilainya akan semakin rendah. Oleh karena itu kebutuhan akan lahan, baik dari sisi luas lahan, harga lahan, status lahan, dan

penggunaan lahan dianggap kriteria yang paling utama oleh para stakeholder dalam penentuan lokasi ibukota. Sedangkan pada tabel 4.30, Lokasi Kecamatan yang terpilih prioritas 1 Kecamatan Mojosari. Apabila dikaitkan antara Kriteria Prioritas dan Alternatif Lokasi yang terpilih, maka permasalahan yang sebenarnya ada di lapangan adalah ketersediaan lahan terkait parameter penggunaan lahan yang telah terpilih oleh stakeholder, justru pada kecamatan terpilih, permasalahan mengenai harga lahan ini menjadi hambatan dalam pengembangan Kecamatan Mojosari sebagai Ibukota. Sejalan dengan teori Von Thunnen bahwa semakin dekat dengan pusat kota maka semakin mahal harga lahan. Karena Kecamatan Mojosari telah berkembang menjadi pusat pelayanan, sarana prasarana maupun strategis dilalui akses yang baik, maka harga tanah menjadi tinggi. Sedangkan untuk pengembangan Ibukota akan membutuhkan lahan yang luas sehingga kebutuhan akan lahan di Kecamatan Mojosari akan menjadi sangat mahal. Dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Sooko maupun Trowulan memiliki potensi harga lahan yang agak sedikit berada dibawah harga lahan di Kecamatan Mojosari, dengan nilai lahan di Kecamatan Sooko lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Trowulan. Berdasarkan pemilihan lokasi diatas maka Kecamatan Mojosari pada hakekatnya berdasarkan stakeholder merupakan lokasi yang masih bisa tetap diarahkan sebagai Ibukota Kabupaten karena dari segala aspek memang lebih unggul dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Namun disisi lain, perlu dilihat bahwa Stakeholder pada saat memberikan penilaian pada masing-masing kriteria, kecenderungan Pada Kecamatan Mojosari, menjadi pertimbangan dikarenakan karena kriteria “**kebijakan**”nya. Artinya karena pada kondisi eksisting Mojosari telah ditetapkan dalam Perda RTRW maka stakeholder memilih mojosari.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032 telah menetapkan/merencanakan Kecamatan Mojosari sebagai Pusat Pemerintahan sejak tahun 2012.

Berdasarkan temuan tersebut diatas ketersediaan lahan menjadi kriteria yang paling utama dalam penentuan suatu lokasi, hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Von Thunnen mengenai nilai lahan, bahwa lahan yang semakin jauh dari pusat kota nilainya akan semakin rendah maka biaya akan pembelian lahan untuk pembangunan tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu kebutuhan akan lahan, baik dari sisi luas lahan, harga lahan, status lahan, dan penggunaan lahan dianggap kriteria yang paling utama oleh para stakeholder dalam penentuan lokasi ibukota. Apabila ditinjau dari pertimbangan stakeholder berdasarkan masing-masing kriteria, maka Justru Kecamatan Mojosari bukan terpilih karena Ketersediaan Lahannya melainkan karena kriteria **"kebijakan"**, Kecamatan Sooko dipertimbangkan karena keunggulan dari sisi **"Ketersediaan Sarana Prasarana"**, Kecamatan Trowulan karena keunggulan **"Historis"**, Kecamatan Jetis karena keunggulan **"Ketersediaan Lahan"** dan Kecamatan Bangsal juga karena keunggulan **"Ketersediaan lahan"**.

Kecamatan Mojosari yang terpilih menjadi lokasi ibukota yang paling prioritas berdasarkan stakeholder merupakan Kecamatan yang memiliki sejarah sebagai Kota Praja dan telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032, karena telah dipersiapkan menjadi Pusat Pemerintahan, maka aksesibilitas serta sarana dan prasarana di Kecamatan Mojosari lebih memadai dibandingkan lokasi yang lain. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Christaller dimana pusat kota

merupakan wilayah dengan fasilitas pelayanan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah yang lain. Di lain sisi keberadaan lahan di Kecamatan Mojosari ditinjau dari luas lahan, harga lahan, status lahan, dan penggunaan lahan merupakan lokasi yang paling rendah dalam hal prioritas berdasarkan stakeholder sehingga dalam hal ini sejalan dengan permasalahan ketersediaan lahan di Mojosari, pada kesepakatannya pada saat berhadapan dengan potensial ketersediaan lahan, Para Stakeholder lebih memilih Kecamatan Jetis dan Kecamatan Bangsal.

4.3 Keterkaitan peranan stakeholder dengan penetapan kebijakan lokasi

Stakeholder berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang dimilikinya, dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu (Reed et al, 2009):

1. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (power) yang rendah diklasifikasi sebagai subyek (subject).
2. Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players).
3. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai pengikut lain (Crowd) atau disebut juga dengan penonton (*spectator*)
4. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (Contest setters) disebut juga dengan aktor (*actor*).

Kategori *stakeholder* menurut Reed et al (2009) akan dijadikan sebagai acuan pemetaan posisi dari setiap *stakeholder* yang keterlibatan pada penentuan lokasi Ibukota Kabupaten. Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variable pertama

Tingkat kepentingan dengan sub variabel yaitu keterlibatan stakeholder, ketergantungan *stakeholder*, peran masing-masing *stakeholder,* manfaat yang diperoleh *stakeholder,* kepentingan *stakeholder.* Variabel kedua **Tingkat pengaruh** dengan sub variabel instrumen dan sumber kekuatan (*power*), posisi *stakeholder* dalam pembuatan keputusan, dukungan sumber daya manusia, kemampuan pendanaan dan manajemen, dan interaksi dengan *stakeholder* yang lain. Beberapa stakeholder yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terdiri dari :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Kepala Sub Bidang Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3. Kepala Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
6. Wakil Masyarakat Kabupaten Mojokerto
7. Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
8. Konsultan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Provinsi Jawa Timur)

Dengan variable diatas berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Ibukota Kabupaten Mojokerto pada awalnya melibatkan peranan Bappeda dan Konsultan serta persetujuan Bupati. Menurut pengertian mengenai stakeholder, Bappeda

serta DPRD merupakan stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat pengaruh yang tinggi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai “Player”. Dengan posisi sebagai player maka Bappeda memang merupakan pihak terkait yang memiliki wewenang baik merencanakan maupun mengusulkan kepada Bupati mengenai lokasi-lokasi alternatif Ibukota.

Penentuan lokasi dalam hal ini adalah lokasi suatu Ibukota pada dasarnya membutuhkan pertimbangan dari beberapa pihak yang terlibat karena hal tersebut merupakan kaidah dalam perencanaan pembangunan, namun dalam pelaksanaan persetujuannya, hanya beberapa dinas yang mempunyai tanggungjawab maupun wewenang dalam implementasi suatu kebijakan sehingga menjadi wujud riil dalam bentuk implementasi pembangunan fisik. Secara penentuan lokasi, Mendagri melalui Permendagri no. 30 Tahun 2012 tentang kriteria lokasi Ibukota telah mengeluarkan komponen-komponen yang perlu dinilai dari suatu wilayah apabila wilayah tersebut akan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten. Penilaian ini pada kondisi dilapangan telah diterapkan dan pada akhirnya terpilihlah Kecamatan Mojosari. Pada saat penilaian wilayah menurut kriteria permendagri, stakeholder yang terlibat hanyalah Bappeda dan konsultan karena fungsi Bappeda memiliki wewenang sebagai perencana. Namun dalam perjalanannya, Kecamatan Mojosari mengalami kendala dalam pengimplementasiannya dikarenakan kendala harga lahan yang sangat tinggi dan luas lahan yang terbatas pada Kecamatan Mojosari sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto memutuskan untuk mencari alternative lokasi lain. Dalam proses penggantian ini, perubahan keputusan tidak lagi melalui prosedur penilaian dengan komponen yang telah ditetapkan permendagri, karena hasil dari permendagri hanyalah menunjuk lokasi yang memenuhi kriteria dalam hal ini

Kecamatan Mojosari yang “pada eksistingnya” tidak dapat diimplementasikan karena memiliki kendala.

Karena adanya kendala tersebut, akhirnya wewenang untuk mengubah lokasi dan menunjuk wilayah yang akan ditetapkan sebagai Ibukota, langsung berada di tangan Bupati Mojokerto. Dalam hal ini peranan Bappeda adalah menjadi pelaksana dimana memastikan apakah wilayah tersebut bisa diimplementasikan sebagai Ibukota Kabupaten. Beberapa wilayah pernah diusulkan kepada Bupati Mojokerto, seperti Kecamatan Bangsal, Kecamatan Trowulan, dan Kecamatan Sooko, dikarenakan pada kondisi lapangan, implementasi tetap sulit dilaksanakan karena adanya kendala-kendala baik minor maupun mayor. Kondisi ini tetap berlanjut sampai dengan tahun sekarang.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan daerah terkait penentuan Ibukota Kabupaten yang wewenang semulanya berada di Bappeda sebagai perencana, pada akhirnya bisa beralih diputuskan oleh Bupati secara langsung tanpa melalui pertimbangan proses perencanaan, apabila implementasi mengalami kendala dilapangan dan membutuhkan keputusan cepat. Hanya saja apabila kendala itu banyak ditemui dilapangan dan tanpa proses diskusi yang terarah dengan beberapa pihak maka keputusan yang diambil dan ditentukan tersebut akan “cacat” secara proses perencanaan karena tidak adanya unsur pelibatan dinas-dinas atau pihak lain dalam penentuan keputusan suatu perencanaan daerah.

Gambar 4.4 Alur Proses Keterkaitan Penelitian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil penelitian yang berupa Alternatif lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan kriteria suatu Ibukota Kabupaten dalam konteks pengambilan kebijakan, terletak pada hasil dari penelitian ini bisa menjadi data maupun bahan bagi pengambil keputusan/kebijakan dalam menentukan lokasi yang akan dijadikan Ibukota Kabupaten. Dengan pendekatan AHP ini, maka dapat dirumuskan pertimbangan-pertimbangan para pakar dalam hal ini para pihak terkait yang memang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai lokasi yang akan diarahkan sebagai Ibukota Kabupaten.

Pengambil kebijakan akan bisa mempertimbangkan lokasi yang akan dipilih dengan melihat kriteria-kriteria yang telah dianalisa berdasarkan pendapat para *stakeholder* dalam penelitian ini yang diolah dengan alat analisis pengambilan keputusan AHP yang dianggap memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam penentuan lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto sehingga dalam proses perencanaan dimana membutuhkan keterlibatan pihak-pihak lain, maka pendapat para stakeholder tersebut telah mewakili keterlibatan pihak-pihak internal maupun eksternal meskipun secara keputusan pelaksanaan perencanaan pembangunan tetap kembali kepada wewenang pemangku keputusan dalam hal ini Bupati Mojokerto. Hasil dari kriteria yang telah dirumuskan oleh para ahli berdasarkan AHP, telah mempertimbangkan pihak-pihak dari segala

kepentingan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan lebih obyektif dimana stakeholder berdasarkan pengertian yang dinyatakan pada teori stakeholder, yang dilibatkan dalam memberikan pertimbangan terdiri dari Player, Aktor, subyek dan penonton. Bappeda sebagai player tetap dimintai pertimbangan karena posisinya yang penting dan pengaruhnya yang tinggi, Sedangkan beberapa stakeholder seperti dinas PU, Dispenda dan BPKA Kabupaten Mojokerto dalam hal ini berperan sebagai "Aktor" dimana tingkat kepentingannya rendah dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Sedangkan dari stakeholder lainnya seperti wakil masyarakat, merupakan "subyek" karena pengaruhnya rendah dan tingkat kepentingannya tinggi. Sedangkan akademisi dan konsultan, posisinya cenderung lebih kepada "Penonton" karena tingkat kepentingan maupun tingkat pengaruhnya rendah. Dengan adanya hasil AHP yang telah melibatkan pertimbangan dari semua pihak terkait maka dengan kedudukan pihak-pihak yang berbeda, maka usulan mengenai alternative-alternatif lokasi beserta kriteria yang menjadi dasar pemilihan yang telah dirumuskan stakeholder, dapat digunakan Bupati sebagai bahan pertimbangan proses penetapan lokasi yang telah memenuhi kaidah perencanaan pembangunan daerah dimana pelibatan segala pihak telah dilaksanakan

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menentukan Ibukota kabupaten serta kontribusi penelitian terhadap prose perencanaan yang telah berjalan, dapat dilihat pada gambar 4.5

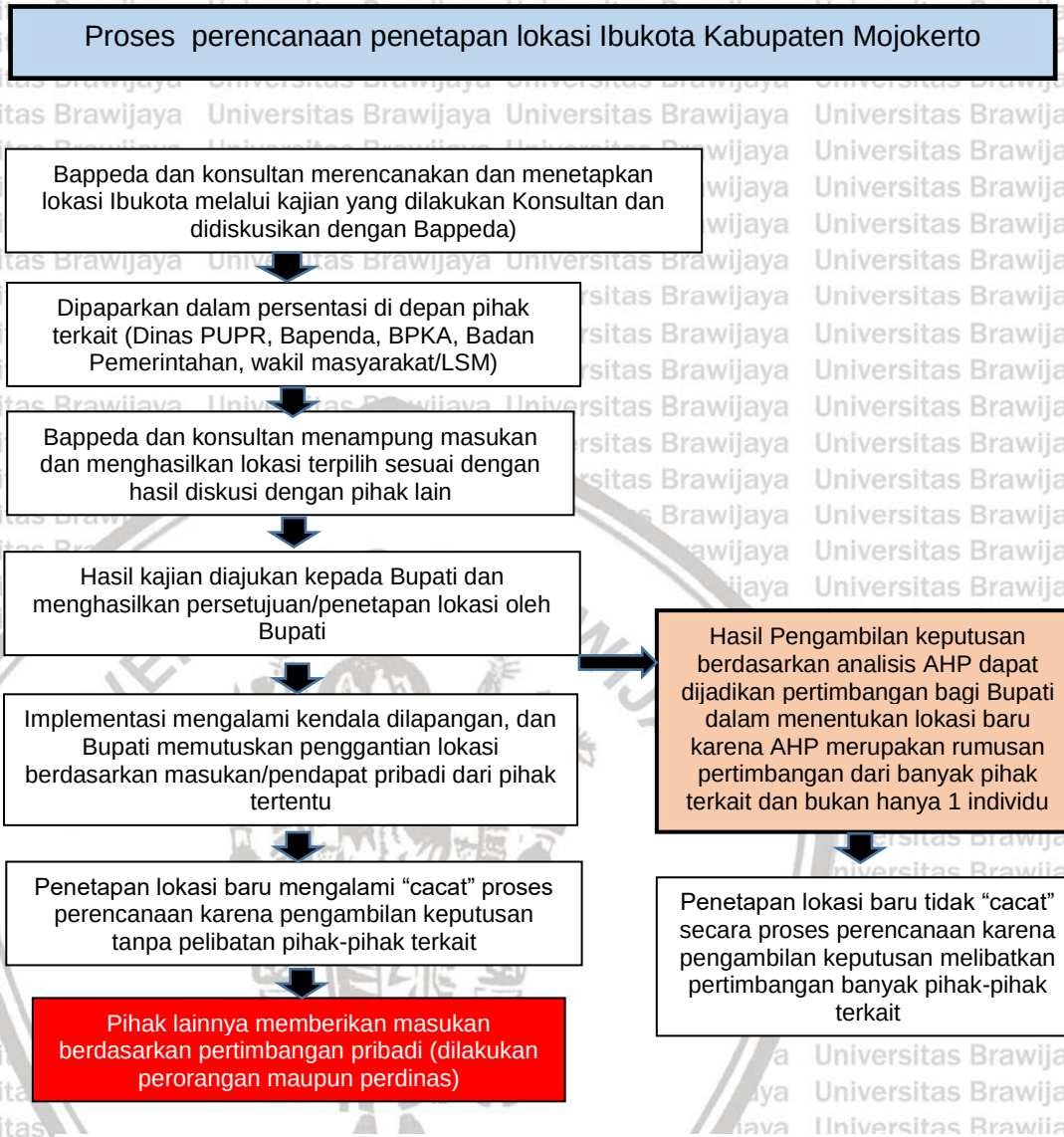

Gambar 4.5 Alur keterkaitan hasil penelitian dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetuan alternatif lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan stakeholder, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi kriteria dalam menentukan lokasi Ibukota, urutan kriteria yang diperlukan oleh suatu Ibukota Kabupaten Mojokerto berdasarkan *stakeholder* adalah Ketersediaan lahan (1), aksesibilitas (2), ketersediaan sarana prasarana (3), kondisi fisik (4), politik dan keamanan (5), Kebijakan (6), kependudukan (7), letak geografis (8) dan historis (9). Ketersediaan lahan merupakan kriteria utama yang menentukan apakah suatu wilayah sesuai difungsikan sebagai Ibukota Kabupaten karena keberadaan lahan diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan zona perkantoran terkait dengan fungsi pelayanan ibukota, juga diperlukan dalam mendukung perkembangan zona-zona lain yang tumbuh akibat keberadaan fungsi pelayanan tersebut.
2. Alternatif Lokasi Terpilih Ibukota Kabupaten Mojokerto yang dipertimbangkan dari setiap kriteria, berdasarkan urutan 9 kriteria berdasarkan stakeholder maka lokasi yang terpilih berdasarkan prioritasnya adalah Kecamatan Mojosari (1), Kecamatan Sooko (2), Kecamatan Jetis (3), Kecamatan Trowulan (4) dan Kecamatan Bangsal (5).
3. Pada Kecamatan Mojosari, aspek yang diprioritaskan adalah kriteria kebijakan, Kecamatan Sooko aspek yang diprioritaskan adalah kriteria

Ketersediaan Sarana Prasarana, Kecamatan Trowulan aspek yang diprioritaskan adalah Kriteria Historis, Kecamatan Jetis aspek yang diprioritaskan adalah Ketersediaan Lahan dan Kecamatan Bangsal aspek yang diprioritaskan adalah Ketersediaan lahan.

4. Berdasarkan temuan tersebut diatas ketersediaan lahan menjadi kriteria yang paling utama dalam penentuan suatu lokasi, hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Von Thunnen mengenai nilai lahan, bahwa lahan ayng semakin jauh dari pusat kota nilainya akan semakin rendah. Oleh karena itu kebutuhan akan lahan, baik dari sisi luas lahan, harga lahan, status lahan, dan penggunaan lahan dianggap kriteria yang paling utama oleh para *stakeholder* dalam penentuan lokasi ibukota. Dan ketersediaan lahan menjadi permasalahan utama diKecamatan Mojosari yan telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012, saat proses implementasi. Oleh karenanya diperlukan alternatiff lokasi lain yang memiliki kriteria ketersediaan lahan untuk menjadi Ibukota Kabupaten Mojokerto,dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian terdapat di Kecamatan Jetis dan Kecamatan Bangsal.
5. Kecamatan Mojosari yang terpilih menjadi alternative lokasi ibukota yang paling prioritas berdasarkan *stakeholder* merupakan Kecamatan yang memiliki sejarah sebagai Kota Praja dan telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032, karena telah dipersiapkan menjadi Pusat Pemerintahan, maka aksesibilitas serta sarana dan prasarana di Kecamatan Mojosari lebih memadai dibandingkan lokasi yang lain. Hal ini sejalan dengan teori yang

dikemukakan oleh *Christaller* dimana pusat kota merupakan wilayah dengan fasilitas pelayanan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah yang lain. Di lain sisi keberadaan lahan di Kecamatan Mojosari ditinjau dari luas lahan, harga lahan, status lahan, dan penggunaan lahan merupakan lokasi yang paling rendah dalam hal prioritas berdasarkan *stakeholder.*

6. Para *stakeholder* yang berfungsi sebagai responden merupakan wujud representative dari sebuah tim yang berguna sebagai penyaji data/bahan bagi pengambil Kebijakan mengenai penentuan lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto yang dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan, yaitu Bapak Bupati Mojokerto.
7. Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu bagian dari pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal tersebut dikarenakan Penentuan Lokasi sebagai bagian dari pengambilan keputusan oleh penguasa, dalam hal ini adalah Bupati Mojokerto. Penentuan lokasi juga merupakan bagian dari Perencanaan Pengembangan Wilayah yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran bagi dan penyempurnaan dalam pengembangan Ibukota Kabupaten Mojokerto yaitu:

1. Diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai kriteria utama yang menjadi pertimbangan didalam lokasi yang terpilih seperti permasalahan yang menjadi kendala utama yang dapat menghambat realisasi pembangunan daerah

menjadi suatu Ibukota Kabupaten seperti contohnya permasalahan terkat ketersediaan lahan dengan meninjau dari Parameter ketersediaan lahan antara lain harga lahan, status lahan, luasan lahan dan penggunaan lahan

2. Diperlukan pula kajian lebih lanjut mengenai pengembangan strategi berdasarkan kondisi wilayah dalam mengatasi permasalahan yang ada di setiap wilayah terpilih sehingga dapat difokuskan strategi mana yang paling bisa digunakan sesuai dengan kemampuan tiap lokasi maupun sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
3. Membentuk Tim yang focus dalam Pengembangan Ibukota Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh tiap SKPD terkait dan selanjutnya segera melakukan kajian hingga tersusun rencana pembangunan yang integrative sehingga setiap kendala dalam proses pengembangan daerah yang menjadi lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto dapat ditemukenali dan diatasi dengan cepat dan tepat
4. Kerjasama/koordinasi setiap *stakeholders* perlu disinergiskan agar implementasi perencanaan pembangunan Ibukota Kabupaten Mojokerto lebih terarah dan tepat sasaran dan dapat segera di implementasikan
5. Hasil penelitian ini dijadikan referensi bagi Kabupaten lain dalam penetapan lokasi Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan dengan pendekatan Stakeholder. Dengan temuan ini dapat dikembangkan strategi – strategi yang dapat mempercepat pembangunan Ibukota Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik.* Salemba Humanika. Yogyakarta.

Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Ali, Moh. Fitra U. 2010. *Evaluasi lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah.* Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Anonim. (2015). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2015.* Mojokerto: BPS.

Anonim. (2016). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2016.* Mojokerto: BPS.

Anonim. (2017). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2017.* Mojokerto: BPS.

Asmarani, Asri Dwi. 2010. *Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis Swot Dan Ahp.* Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Barlow, I.M. 1981. *Spatial Dimensions of Urban Government*. USA: Research Study Press.

Budiharjo, Eko. dan Sujarto, Djoko. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni

Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Campbell, S. 2004. The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era. *URRC*. 03(08):1-32.

Claval, Paul. 1998. An *Introduction to Regional Geography.* Blackwell Publisher. Inggris.

Claval, Paul. 2000. *The European System of Capital Cities*. *Geo Jurnal* 51 (1/2), 73-81.

Conyers, Diana dan Peter Hills. 1990. *An Introduction to Development Planning in The Third World.* John Wiley & Son Ltd. New York.

Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Terjemah oleh Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Darmawan, S. 2014. *Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provninsi Sulawesi Tenggara*. Tesis. Universitas Hasanudin. Makasar.

Dashcher, K. 2000. *Are Politics and Geography Related? Evidence from a Cross-Section of Capital Cities*. *Public Choice* 105 (3/4), 373- 392.

Daldjoeni. (1996). *Geografi Desa Kota*. Salatiga: Alumni.

Deda, Arry Ronny Danny. 2002. *Evaluasi Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Jayapura di wilayah Sentani.* Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Detiawati, Venni Meitaria. 2008. *Penetapan Pulau Dompak sebagai lokasi pusat perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Dijkink, G. 2000. *Eroupean Capital Cities as Political Frontiers*. *GeoJurnal* 51 (1/2), 65 – 71.

Djumantri et al. (2009). *Kamus Penataan Ruang*. Dirjen Pekerjaan Umum.

Fawcett, CB dan Litt, B. 1918. *The Position of Some Capital Cities.* The Geographical Teacher 9 (6), 238 – 243.

Gallion, Arthur B and Simon. (1994). *Pengantar Perencanaan Kota*. Surabaya: Erlangga.

Golany, G. 1976. *New-Town Planning: Principles and Practice*. New York: A Wiley-Interscience Publication.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik.* Widya Karya. Semarang.

Hakim, Abdul. 2004. *Analisis Data Kuantitatif*. Surya Pena Gemilang. Malang.

Hall, P. 2006. *Seven Types of Capital City*. Dikutip dalam Gordon P, editor. *Planning Twentieth Century Capital Cities*. Routledge. London (GB).

Hartshorn, T. A. 1980. *Interpreting The City: An Urban Geography*. New York: John Wiley & Sons.

Heryanto, B. 2011. *Roh dan Citra Kota: Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilian Internasional.

Hidayat, Syarif. (2004). *Kegamangan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for the Real World.* Oxford Unversity Press. Dikutip dalam Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Ibrahim, A. Malik. 2001. *Evaluasi Penetapan Lokasi Ibukota Provinsi Maluku Utara.* Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Indradi, Sjamsiar S. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Admnistrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang.

Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Islamy, M. Irfan. 1991. *Policy Analysis*. FIA Brawijaya. Malang.

Kartasasmita, Ginandjar.1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia.* LP3ES. Jakarta.

Lester, James P. dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont. Wadsworth. Dikutip dalam Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Linn, J. F. 1983. *Cities In The Developing World*. Oxford: Oxford University Press

Marangkup H, Ulin E. 2006. *Identifikasi Pola Pengembangan Daerah Pinggiran dan Pola Jaringan Jalan Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

M.T. Zen. (1999). *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. Jakarta: BPPT

Muslihin. 2008. *Pemindahan Ibukota Definitif Provinsi Maluku Utara : Studi tentang masalah- masalah yang muncul dalam proses pemindahan ibukota dari Ternate ke Sofifi*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Myoe, Maung Aung. 2006. *The Road to Naypyitaw: Making Sense of The Myanmar Government's Decision to Move It's CapitalGovernment.* Jurnal.

Nagel, S.S.1984. *Public Policy: Goals, Means, and Methods*. New York: S. Martin's Press.

Nasution. (2004). *Metode Research*. Bandung: PT. Jemar

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Northam, R. M. 1979. *Urban Geography*. New York: John Wiley & Sons.

Novita, F. 2003. *Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media komputindo. Jakarta.

Nurcahyo, R., dkk. 2011. *"Penentuan Dan Pengembangan Kompetensi Inti Kabupaten Bekasi"*. Jurnal Manajemen Teknologi. Volume 10, Nomor 3, 252-263.

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto tahun 2012 – 2032*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 *tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota*

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 *tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*

Qi, D. 2008. *Early Capital Cities- The Key Simbol of Early Chinese Civilization*. Front. Hist. China 3 (1), 1 – 11.

Rahab, *et al.* 2013. *Local Economic Development Strategy Based on Local Industrial Core Competence*. International Journal of Business and Manage ment; Vol. 8, No. 16, 41-47.

Revid, H. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatra Barat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Rianse, U dan Abdi. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ricks, B. 1970. *New Town Development and The Theory of Location*. *Land Economics* 46 (1), 5-11.

Ridwan, Juniarso. (2008). *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Bandung:* Nuansa.

Rijanta, R. 2006. *Ruang dan Tempat dalam Studi Pemekaran Wilayah: Perspektif Teori dan Pengalaman Empirik Kabupaten Kutai*. *Majalah Geografi Indonesia* 20 (2), 114-136.

Riyadi dan Deddy S. Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Roscoe. 1982. *Research Methods For Business.* Dikutip dalam Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. CV. Alfabeta. Bandung.

Saaty, Thomas L. (1993). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Terjemahan Liana Setiono. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Sari, Endang S. 1993. *Audience Research:* Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa. Yogyakarta:Andi Offset.

Sarundajang. (1997). *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siagian, Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Siagian, Sondang P.2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta.

Simeon, R.1976. *Studying Public Policy*. *Canadian Journal of Political Science* 9 (4), 548-580.

Sinulingga, Budi. D. (2005). *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Edisi Revisi. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Siong, Ho Chin. 2006. *Putrajaya-Administrative center of Malaysia: Planning, Concept, and Implementation*. Jurnal

Spate, OHK. 1942. *Factors in The Development of Capital Cities*. *Geographical Review* 32 (4), 622 – 631.

Sukidin dan Damai Darmadi. 2011. *Administrasi Publik.* L Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. CV. Alfabeta. Bandung.

Syafrizal, 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.* Rajawali Pers. Jakarta.

Syaifullah, 2010. Pengenalan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process).* Syaifullah08.files.wordpress.com.(12/11/2013).

Syarif, A. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fisik Kota Baubau*.Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjokroamidjojo, Bintoro 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Torjman, S. 2005. *What is Policy?*. Ottawa: The Caledon Institute of Social Policy.

Traugott, M. 1995. *Capital Cities and Revolution. Social Science History*, 19 (1), 147 – 168.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

Waldo, Dwight. 1982. Diterjemahkan oleh Drs. Slamet W. Admosoedarmo. *Pengantar Studi Publik Administrasi*. Aksara Baru. Jakarta.

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Wusten, HVD. 2000. *The Cityscape of European Capital Cities.* Geo Jurnal 51 (-), 129 – 133.

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, H. S. (2008). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zetter, J. 1986. Challenges fo Japanese Urban Policy. *The Town Planning Review* 57 (2), 135-140.